



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

#Ber  
**#AKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#**bangga**  
melayani  
**bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



*Komisi Yudisial RI*

PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKj)  
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat  
*Website:* [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77  
Faksimile: (021) 31903755 Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)  
Email: [kyri@komisiyudisial.go.id](mailto:kyri@komisiyudisial.go.id)

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas  
NIP 19690318 199603 1 001

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	2
Bab I Pendahuluan .....	4
Bab II Perencanaan Kinerja Palinfo Tahun 2024 .....	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan .....	15
Bab IV Penutup.....	163
Lampiran.....	165

# Kata Pengantar

Segala puji kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi di tahun 2024 ini. Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

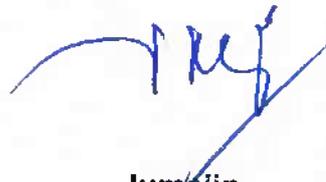
Pada tahun 2024, Palinfo melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) kelembagaan. Target kinerja sebagaimana yang dimuat dalam Renstra tersebut dilaksanakan oleh dua bidang yaitu: 1). Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman; dan 2). Bidang Data dan Layanan Informasi. Target kinerja Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yaitu memberikan rekomendasi kebijakan praktis bagi pimpinan untuk menyikapi isu peradilan dan melakukan kajian untuk mendukung penguatan tugas dan fungsi kelembagaan Komisi Yudisial serta memfasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap Fungsional Penata Kehakiman yang ada di lingkungan Komisi Yudisial. Sementara itu, Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki target kinerja sebagai berikut: pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi; pemutakhiran data dan informasi; sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi; layanan informasi publik; monitoring media; edukasi publik; pengelolaan perpustakaan; dan penyusunan dan pencetakan bahan

diseminasi publik di bidang yudisial. Selain itu, Palinfo juga memiliki target kinerja berupa peningkatan layanan perkantoran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pencapaian target kinerja Palinfo sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024, serta penyerapan anggarannya untuk pencapaian target tersebut.

Jakarta, Januari 2025

**Kepala Pusat Analisis dan  
Layanan Informasi,**



**Juma'in**

**NIP. 196805151989121001**

## BAB I

# Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk jangka waktu lima tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana amanat tersebut, Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) sesuai kewenangan, tugas pokok, dan fungsinya telah menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk Periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Palinfo diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan visi Komisi Yudisial yang tercantum dalam Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu "Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim".

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Palinfo mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan data dan layanan informasi, hubungan masyarakat, serta pembinaan jabatan

fungsional Penata Kehakiman di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya Palinfo menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan;
2. Penyusunan desain, penelaahan dan perumusan hasil dalam rangka penelitian dan/atau kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial;
3. Perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan basis data;
4. Penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, serta pengelolaan perpustakaan;
5. Pembinaan dan pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
6. Penerjemahan lisan dan/atau tulisan;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
8. Pelaksanaan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

## **2. Struktur Organisasi**

Pusat Analisis dan Layanan Informasi terdiri atas:

1. Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman;
2. Bidang Data dan Layanan Informasi; dan
3. Sub Bidang Fasilitasi Pembinaan JF Penata Kehakiman
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, desain, penelaahan, dan perumusan hasil analisis dan kajian terhadap hakim, badan peradilan, kelembagaan Komisi Yudisial, pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan analisis, serta evaluasi dan penyusunan laporan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Sementara Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai tugas penyusunan rencana, kegiatan, perancangan, pembangunan, pemeliharaan, pengembangan aplikasi dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan basis data, penyiapan bahan, pengolahan dan penyajian informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan; pengelolaan perpustakaan; dan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengelolaan data dan layanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Palinfo didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1  
SDM Pusat Analisis dan Layanan Informasi Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian			Berdasarkan Pendidikan			Berdasarkan Jenis Kelamin	
	CPNS	ASN	PPNPNS	D-III	S1	S2	L	P
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	29	1	4	17	9	17	13

### 3. Isu Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024. Isu strategis prioritas dari Palinfo pada tahun ini disesuaikan dengan Renstra Komisi Yudisial Periode 2020 s.d 2024 yaitu melakukan strategi perencanaan komunikasi publik, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi lembaga. Namun, implementasi dari isu strategis ini belum optimal karena Tim Komunikasi Krisis belum terbentuk sesuai dengan peta jalan yang telah disusun.

## BAB II

# Perencanaan Kinerja

### A. Rencana Strategis Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2020 s.d 2024

Sejalan dengan Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024, Palinfo mengukuhkan peran dan fungsinya melalui visi sebagai berikut:

***“Terwujudnya pemberdayaan stakeholder dan publik yang partisipatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, Palinfo menjabarkannya ke dalam misi, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi stakeholder dan publik;
- b. Meningkatkan integrasi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

### B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Palinfo serta kontribusi pencapaian Palinfo pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	a) Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		b) Persentase pemutakhiran data dan informasi	80%
2	Terkelolanya sistem manajemen keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	a. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Informatif
		b. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori positif
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	- Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15%
		- Tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Puas
		- Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik KY	Kategori Baik
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

### **C. Kontribusi dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga**

Palinfo memiliki dua sasaran program untuk mendukung pencapaian sasaran program dan sasaran strategis lembaga. Sasaran program yang pertama yaitu terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik. Indikator kinerja sasaran program tersebut adalah persentase kontribusi stakeholder Komisi Yudisial (KY) dan publik. Pada tahun 2024, target persentase kontribusi stakeholder KY dan publik adalah 70%. Sasaran program Palinfo yang kedua adalah terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif. Indikator kinerja sasaran program kedua ini adalah persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 95% pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga memanfaatkan teknologi informasi. Kedua sasaran program Palinfo sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat mendukung dua sasaran strategis lembaga.

Renstra Komisi Yudisial periode 2020 s.d 2024 mencantumkan dua sasaran strategis lembaga yaitu meningkatnya integritas hakim dan meningkatnya kapasitas manajemen internal. Untuk sasaran strategis pertama, meningkatnya integritas hakim, telah ditetapkan indikator kinerjanya yaitu indeks integritas hakim mencapai skor 8,00 pada tahun 2024. Adapun indikator kinerja untuk sasaran strategis lembaga yang kedua, meningkatnya kapasitas manajemen internal, terdiri atas dua hal. Pertama, nilai indeks reformasi birokrasi pada tahun 2024 ditargetkan mencapai kategori "A". Kedua, nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat "Sangat Baik" pada tahun 2024. Data mengenai sasaran program Palinfo untuk mendukung penetapan kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan sasaran strategis Komisi Yudisial pada tahun 2024 disajikan dalam dua tabel di bawah ini:

- **Kontribusi Palinfo dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial**

Tabel 2.2  
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Terlaksananya pemberdayaan <i>stakeholder</i> dan publik	Persentase kontribusi <i>stakeholder</i> KY dan publik	70 %	Rekapitulasi jumlah <i>stakeholder</i> dan publik KY
2	Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	Persentase pemanfaatan teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas wewenang lembaga	95%	Rekapitulasi jumlah aplikasi yang dihasilkan

- **Target Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024**

Tabel 2.3  
Target Kinerja Komisi Yudisial Berdasarkan Kerangka Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
1	Meningkatnya integritas hakim	Indeks Integritas Hakim	8,00	Rekapitulasi hasil survey terbatas kepada hakim
2	Meningkatnya kapasitas manajemen internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Sangat Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

#### D. Rencana Kerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana kinerja juga merupakan suatu komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Rincian rencana kerja Palinfo tahun 2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Rencana Kerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi Tahun 2024

<b>WA.3868</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik</b>	<b>Output</b>	<b>15.118.599.000</b>
<b>3868.EBA.001</b>	<b>Layanan Manajemen Keamanan TIK</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>240.612.000</b>

<b>3868.EBA.002</b>	<b>Layanan Komunikasi Publik</b>	<b>9 Laporan</b>	<b>668.213.000</b>
051	Layanan Keterbukaan Informasi	<b>1 Laporan</b>	63.178.000
052	Media Monitoring	<b>6 Laporan</b>	224.001.000
053	Pengelolaan Perpustakaan	<b>1 Laporan</b>	204.041.000
054	Layanan Penerjemah	<b>1 Laporan</b>	176.993.000
<b>3868.EBA.003</b>	<b>Edukasi Publik</b>	<b>23 laporan</b>	<b>1.451.992.000</b>
051	Penyusunan bahan diseminasi dan informasi publik	<b>1 Laporan</b>	670.750.000
052	Pelaksanaan Edukasi Publik	<b>22 Laporan</b>	781.242.000
<b>3868.EBA.963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>	<b>5 Laporan</b>	<b>1.137.011.000</b>
051	Pengelolaan Infrastruktur TIK Terintegrasi	<b>1 Laporan</b>	446.382.000
052	Pemutakhiran Data dan sistem informasi	<b>2 Laporan</b>	424.590.000
053	Implementasi SPBE	<b>2 Laporan</b>	266.039.000
<b>3868.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1 Layanan</b>	<b>8.571.200.000</b>
<b>3868.EBD.001</b>	<b>Layanan Analisis dan Pengkajian</b>	<b>27 Dokumen</b>	<b>1.412.356.000</b>
051	Dokumen Hasil Kajian Lembaga		192.440.000
052	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi		496.644.000

053	Analisis Putusan		723.272.000
<b>3868.EBD.002</b>	<b>Fasilitasi Fungsional Penata Kehakiman</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.007.117.000</b>
051	Layanan Manajemen Fungsional Penata Kehakiman		377.416.000
052	Pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman		629.701.000
<b>3868EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>15 Dokumen</b>	<b>40.098.000</b>
<b>FAB.001</b>	<b>Laporan Hasil Pemuktahiran Sistem Informasi</b>	<b>3 sistem Informasi</b>	<b>590.000.000</b>

### BAB III

# Akuntabilitas Kinerja & Keuangan

## A. CAPAIAN KINERJA

Kinerja Palinfo pada tahun 2024 telah mencapai target sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Perbandingan Target dengan Capaian Kinerja Palinfo  
Tahun 2021 s.d 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi			Target 2024 Akhir Renstra
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi	100%	100%	100%	133,33%
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	76,12%	100%	100%	108,74%	100,45 %
2	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001	100%	100%	100%	100%
3	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Informatif	106,13%	100%	125%	100%
		2. Kategori publisitas positif media monitoring	Kategori Positif	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi	15,46%	113,33%	111,33 %	103,06%	109%
		2. Laporan pengelolaan perpustakaan	1 laporan	100%	100%	100%	100%

		3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial	45	100%	100%	100%	-
		4. Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik KY	-	-	-	-	100%
6	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 10 indikator kinerja yang mendukung 6 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target dengan sangat baik. Berikut uraian terhadap pencapaian kinerja sebagaimana tersebut di atas:

### **1. Meningkatkan Layanan Pengembangan TIK yang Terintegrasi**

#### **a. Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi**

Pengembangan Aplikasi Terintegrasi adalah salah satu amanat dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sedang digaungkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Komisi Yudisial melalui Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (Cetak Biru TIK) 2020-2024 dan pada tahun 2024 telah disusun Cetak Biru TIK 2025-2029.

Dari rekomendasi Cetak Biru TIK tersebut ada target pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Salah satu syarat penggunaan anggaran TIK diperlukan rekomendasi *clearance* dari Kementerian PANRB, Kominfo, dan Bappenas. Pusat Analisis dan Layanan Informasi sudah memulai pengajuan *clearance* sejak Semester I 2024 dengan mengajukan permohonan melalui aplikasi EGA SPBE Kementerian PAN RB. Pusat Analisis dan Layanan Informasi sudah mengajukan permohonan melalui Surat Nomor 85/SET/SI.05/03/2024 tanggal 22

Maret 2024 perihal Penyampaian Permohonan Evaluasi Anggaran (*Clearance*) SPBE KY TA 2024.

Dalam perjalanannya, Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai penanggung jawab kegiatan melakukan upaya-upaya percepatan dengan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PAN RB. Sehubungan dengan adanya insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan adanya pergantian Direktur Aptika di Kominfo, sehingga penandatanganan rekomendasi sedikit terkendala.

Komisi Yudisial mendapat rekomendasi *clearance* melalui surat Bersama Kementerian PANRB, Kominfo dan Bappenas tanggal 4 Juli 2024 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2024 di Lingkup Komisi Yudisial. Kemudian Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI mengajukan usulan revisi anggaran dengan Nomor 310/SET/PR.03.03/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Pada tanggal 5 September 2024 dilakukan rapat penelaahan revisi anggaran DIPA Komisi Yudisial RI TA 2024 (Undangan Nomor UND-94/AG.4/AG.43/2024 tanggal 4 September 2024).

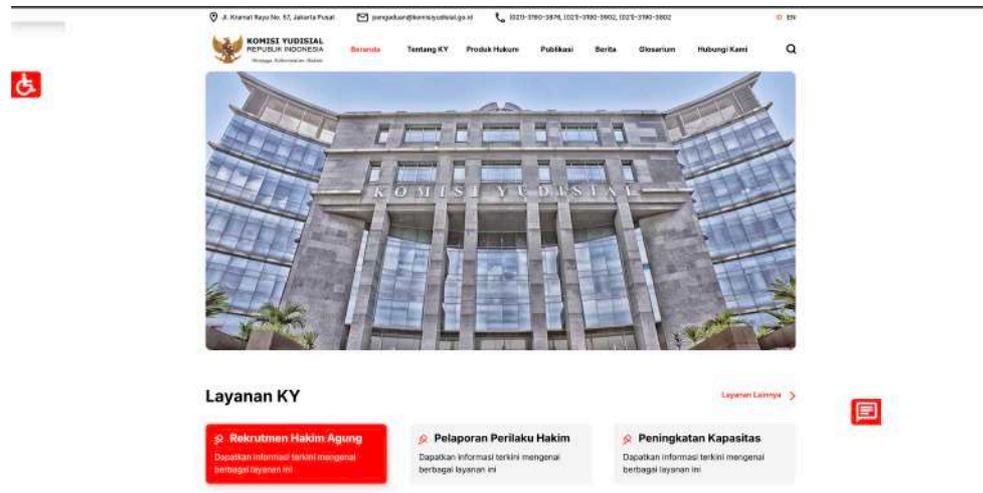
Adapun capaian output Pusat Analisis dan Layanan Informasi untuk target kinerja ini adalah tiga kegiatan pengembangan aplikasi sebagai berikut:

### **1) Pengembangan Website Komisi Yudisial dan KY Mobile**

#### **Website Komisi Yudisial**

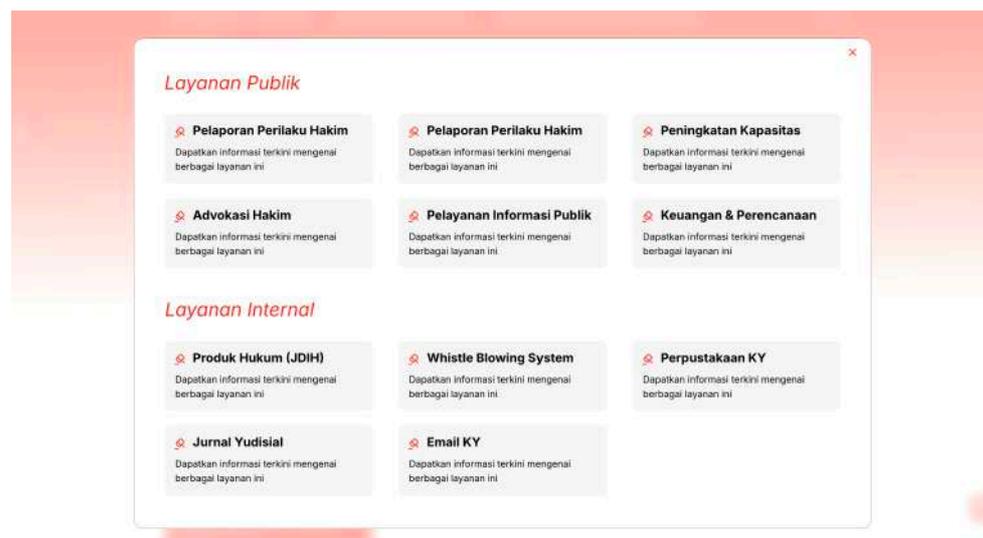
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Komisi Yudisial terus melakukan transformasi dengan melakukan pemutakhiran website sebagai etalase lembaga. Adapun pengembangan yang dilakukan terkait pembaruan *engine* dan penyempurnaan fitur-fitur

baru pada website Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini.



Gambar 3.1  
Pengembangan Website Komisi Yudisial

Selain penyempurnaan fitur, dengan pengembangan website yang baru ini lebih menonjolkan layanan yang ada di Komisi Yudisial. Semua layanan yang dimiliki Komisi Yudisial dikelompokkan dalam satu *dashboard*. Dengan demikian, akan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan yang disediakan Komisi Yudisial.



Gambar 3.2  
Akses Layanan dalam Satu Dashboard pada Website Komisi Yudisial

## KY Mobile

Kehadiran Komisi Yudisial dalam berbagai *platform* menjadi kewajiban menghadapi era digitalisasi saat ini. Komisi Yudisial mulai melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan *mobile app*. Pada tahun 2024 Komisi Yudisial sudah mengembangkan *KY mobile* yang diharapkan menjadi *Super Apps* Komisi Yudisial dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aplikasi ini sebelumnya sudah tersedia, tetapi belum dimutakhirkan. Selain untuk meningkatkan *engagement*, *mobile app* juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat agar tetap *update* terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan Komisi Yudisial.



Gambar 3.3  
Fitur dalam KY Mobile

Adapun fitur yang tersedia di antaranya tampilan *headline* berita berupa *slideshow* gambar dan infografik. Pengelompokan layanan Komisi Yudisial dalam satu tampilan. Penyajian konten juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan untuk menelusuri konten. Pada setiap konten yang menyediakan file lampiran juga dilengkapi menu unduhan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk mendapatkan file lampiran seperti bahan-bahan publikasi dan siaran pers. Dalam aplikasi *KY Mobile* juga disediakan konten dalam bentuk video.

Untuk mempermudah pengguna menerima *update* terkini dari *KY Mobile*, maka dilengkapi dengan fitur notifikasi. Fitur/modul Notification ini menggunakan layanan dari Google yang disebut dengan *Google Cloud Messaging* (GCM) atau *Firebase Cloud Messaging* (FCM). Adapun manfaat dari fitur ini agar pengguna semakin aktif dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.



Gambar 3.4  
Pengembangan KY Mobile

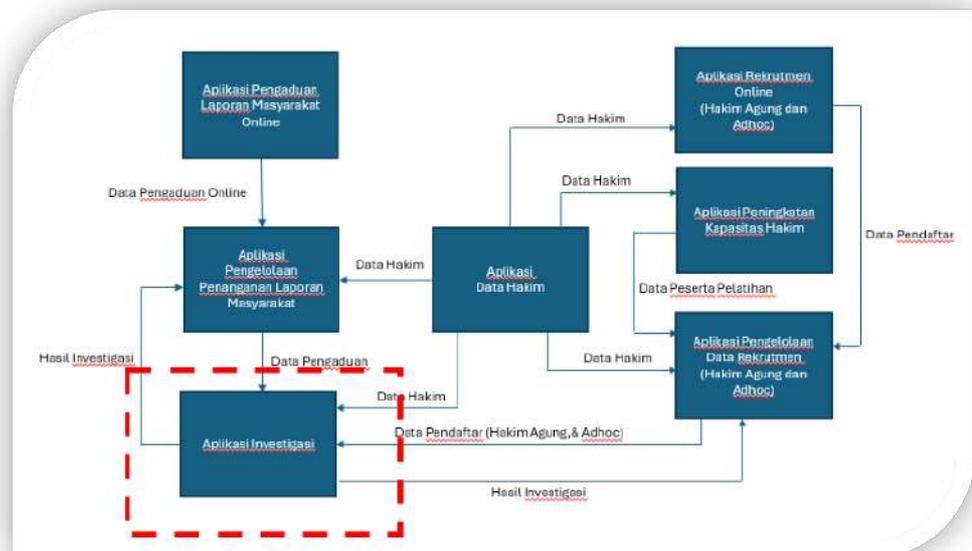
## 2) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disebutkan bahwa Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Investigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kegiatan;
2. Pelaksanaan analisis informasi investigasi, produksi, dan dokumentasi hasil investigasi;
3. Pelaksanaan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
4. Pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim, calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung; dan
5. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Adapun konsep integrasi sistem informasi yang sedang dibangun di Komisi Yudisial, tergambaran seperti gambar di bawah ini:



Gambar 3.5  
Konsep Integrasi Sistem Informasi di Komisi Yudisial

Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI) merupakan aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut laporan serta pelaporan hasil penanganan penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh Biro Investigasi.



Gambar 3.6  
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

SIMI hanya dapat diakses melalui jaringan khusus (*Virtual Private Network*), hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan sistem dari ancaman eksternal (*hacker*). Sistem ini terdapat 1 (satu) fungsi *back end* untuk pelaksanaan investigasi dan administrator sistem. Adapun halaman administrator ini berfungsi sebagai halaman pengelolaan hasil penelusuran rekam jejak dan pelaporan.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi dibutuhkan dikarenakan perlunya *upgrade* teknologi, *patch script* dan adanya permintaan dari *user* yakni Biro Investigasi. Adapun pengembangan sistem yang dilakukan di antaranya:

- Menu Monitoring Penelusuran Rekam Jejak, berfungsi sebagai media pengolahan hasil penelusuran rekam jejak yang terdiri dari Laporan Analisis Awal, Laporan Penelusuran Rekam Jejak dan Summary Penelusuran Rekam Jejak.

Monitoring Investigasi > Penelusuran Rekam Jejak

**Penelusuran Rekam Jejak**  
Data yang ditampilkan sesuai dengan user yang aktif

PK:

No	NIP	Nama	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Periode	#
1			Pati	1993-04-15	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
2			Amurang	1999-09-22	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
3			HABARA	1992-09-23	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
4			MAGEJANG	1999-10-19	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
5			TALUK KUANJAN	1991-10-14	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
6			MEDAN	1999-09-02	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
7				2000-02-03	2024Q1	<input type="button" value="Q"/>
8			SUMBUH	1999-10-31	2023Q1	<input type="button" value="Q"/>
9			MEDAN	1999-09-02	2023Q1	<input type="button" value="Q"/>
10			PENAKTONG BANGOR	1992-9-15	2023Q1	<input type="button" value="Q"/>

Totol Data : 7/8

1 2 3 4 5 ... 7/8 Next

Gambar 3.7  
Pengembangan Menu Monitoring Penelusuran Rekam Jejak

- Menu Monitoring Semua Kasus, berfungsi untuk melihat keseluruhan data pendalaman kasus (PK) yang telah diinput ke dalam sistem pada menu ini. Terdapat fitur “filter data” untuk mempermudah pencarian data.

Monitoring Investigasi > Semua Kasus

**Semua Kasus**  
Data yang ditampilkan sesuai dengan user yang aktif

PK:

No	Nip Hakim	Nama Hakim	No Investigasi	Jenis	#
1			11/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
2			02/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
3			18/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
4			14/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
5			09/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
6			04/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
7			04/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
8			01/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
9			03/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>
10			04/19/19/1/10/2017	ATISND	<input type="button" value="Q"/>

Totol Data : 2/8

1 2 3 4 5 ... 2/8 Next

Gambar 3.8  
Pengembangan Menu Monitoring Semua Kasus

- Menu Monitoring Data Hakim, berfungsi untuk melihat keseluruhan data hakim yang terdapat pada database hakim pada menu ini

Monitoring > Data Hakim

**Data Hakim**  
Data hakim yang ditampilkan merupakan data hakim karir

Filter Data

Filter data berdasarkan "nama\_lengkap" dengan kata kunci "budi"

No	Nama Hakim	NIP Baru	NIP Lama	Tanggal Lahir	Tempat Lahir	#
1				1975-10-23		
2				1981-01-14	UDUH	
3				1978-09-10	JAKARTA	
4				1951-01-20	SEMARANG	
5				1975-12-05	SALAJARAJEN	
6				1979-09-10	BUMENEG	
7				1988-10-23	ILATON	
8				1989-02-03	JAKARTA	
9				1959-01-20	WEDITH	
10				1980-12-08	SEMARANG	

Gambar 3.9  
Pengembangan Menu Monitoring Data Hakim

- Menu Monitoring Data Pengaduan, berfungsi untuk pengguna dapat melihat keseluruhan data pengaduan hakim yang terdapat pada aplikasi Pelaporan Masyarakat pada menu ini

Monitoring > Data Pengaduan

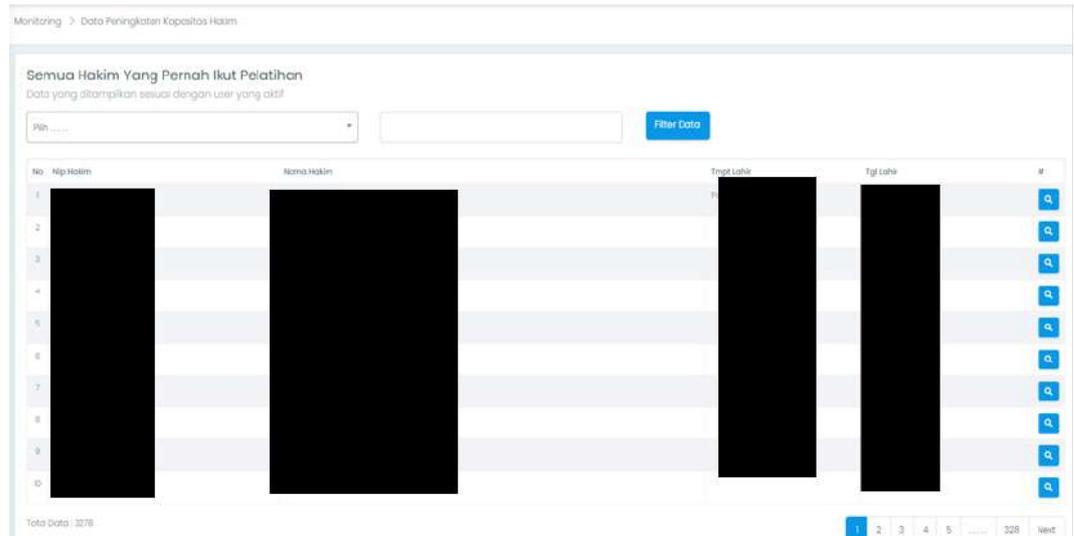
**Data Pengaduan Diteruskan ke Investigasi**  
Data yang ditampilkan sesuai dengan usut yang aktif

Filter Data

No	No Penelimaan	Tgl Penelimaan	No Register	Isi Laporan (Kakim)	Paraf
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Gambar 3.10  
Pengembangan Menu Monitoring Data Pengaduan

- Menu Monitoring Data Pelatihan Kapasitas Hakim (PKH), berfungsi untuk melihat keseluruhan data pelatihan hakim yang terdapat pada aplikasi Peningkatan Kapasitas Hakim pada menu ini



Gambar 3.11  
Pengembangan Menu Monitoring Data Pelatihan Kapasitas Hakim

- Menu Penelusuran Rekam Jejak Hakim Agung, Hakim Adhoc Tipikor, Hakim Adhoc PHI dan Hakim Adhoc HAM di Mahkamah Agung berfungsi untuk melihat keseluruhan rekam jejak hakim yang mendaftar. Terdapat fitur “filter data” untuk mempermudah pencarian data



Gambar 3.12  
Pengembangan Menu Penelusuran Rekam Jejak Hakim SCHA, SCHA dan SCHA

Selain menu tersebut, dikembangkan juga fungsi pengolahan data dan laporan Penelusuran Rekam Jejak Berkala, Jejing/Informan dapat melakukan penginputan informasi terkait Data Profiling Hakim

dan Informasi sanksi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat terinput ke dalam sistem sebagai tambahan informasi yang terdapat dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investigasi tahun 2024

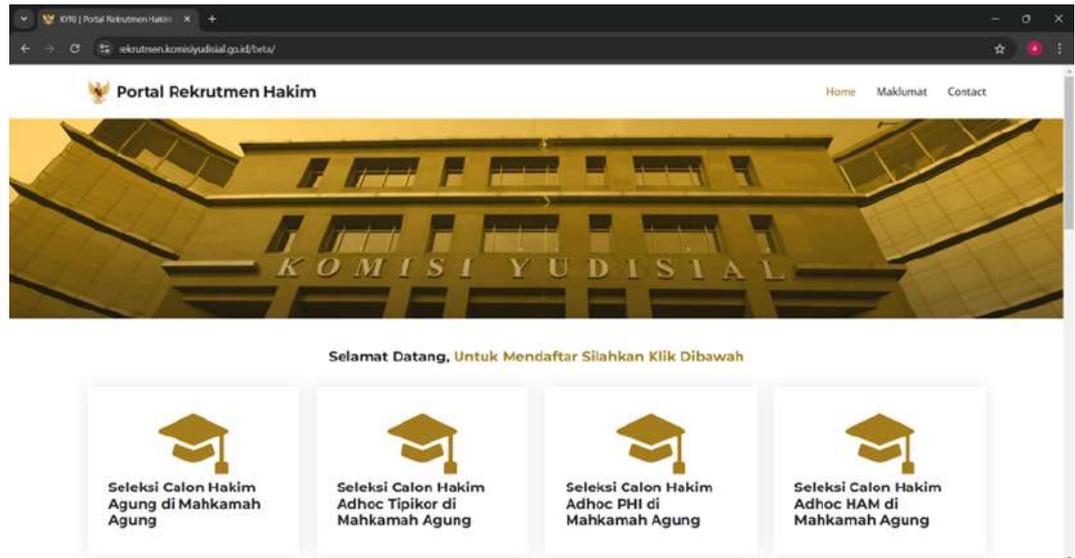
### **3) Pengembangan Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung Terintegrasi**

Pengembangan SI SCHA perlu dilakukan dikarenakan perlunya *upgrade* teknologi, *patch script*, dan adanya permintaan dari *user* yakni Bagian Rekrutmen Hakim di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim terkait penambahan menu/fungsi dalam sistem informasi tersebut, di antaranya:

1. Perubahan tampilan, fitur dan fungsi *front end* dan *back end* SI SCHA sesuai kebutuhan *user*;
2. Penambahan fitur sinkronisasi data pendaftar terakhir;
3. Penambahan fitur *upload* dokumen pendaftar pada sistem;
4. Fitur notifikasi pada *email* pendaftar.

Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SI SCHA) Terintegrasi merupakan aplikasi yang terdiri dari penerimaan pendaftaran, pengelolaan data, dan tindak lanjut pelaksanaan rekrutmen hakim.

SI SCHA dibangun di dua *framework* (struktur) yaitu *framework user* dan *framework administrator*. *Framework user* diperuntukkan bagi seorang user yaitu hakim dan masyarakat yang akan melakukan pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sedangkan *framework administrator* diperuntukkan bagi seorang admin yang akan melakukan pengelolaan data hasil pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.



Gambar 3.13  
Portal Rekrutmen Hakim

Adapun pada sistem ini terdapat menu-menu:

- Home, berfungsi sebagai halaman pertama yang tampil saat aplikasi diakses;
- Maklumat, berfungsi sebagai halaman pendaftaran yang diakses oleh *user* (Hakim/Masyarakat).
- Contact, berfungsi sebagai halaman informasi terkait nomor kontak dan alamat Komisi Yudisial RI
- Menu Pilihan Pendaftaran Hakim

### **Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (Halaman *User*)**

Sistem ini dapat digunakan oleh hakim/masyarakat yang akan melakukan pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

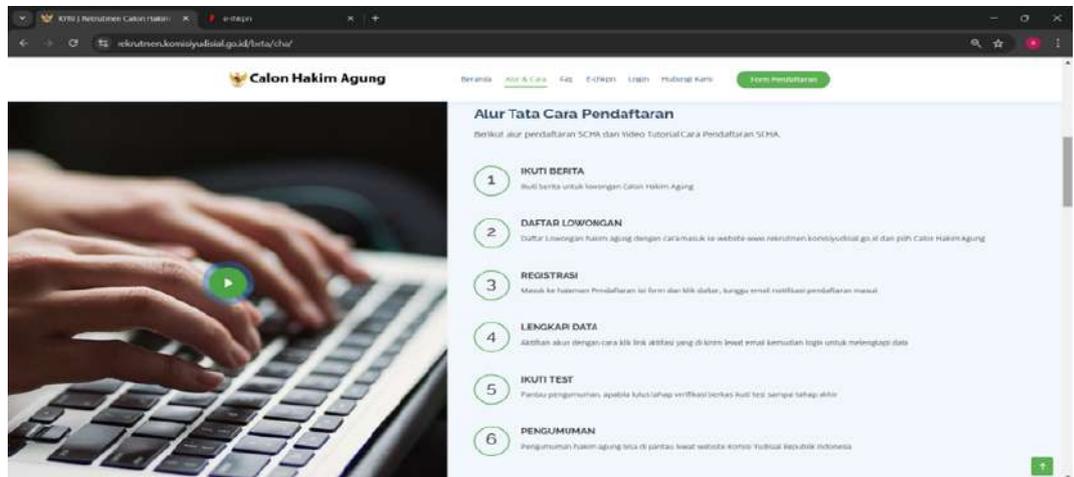


Gambar 3.14  
Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung

Adapun pada sistem ini terdapat menu-menu:

- Home, berfungsi sebagai halaman pertama yang tampil saat aplikasi diakses;
- Alur & Cara, berfungsi sebagai halaman informasi terkait alur proses pelaksanaan rekrutmen hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.
- Maklumat, berfungsi sebagai halaman pendaftaran yang diakses oleh *user* (Hakim/Masyarakat).
- FAQ, sebagai halaman informasi terkait daftar pertanyaan yang sering diajukan oleh user
- Contact, berfungsi sebagai halaman informasi terkait nomor kontak dan alamat Komisi Yudisial RI
- E-Lhkpn, berfungsi sebagai halaman informasi LHKPN di KPK
- [Login](#), merupakan halaman informasi login ke halaman administrator user. [Menu Pilihan Pendaftaran Hakim](#)
- Hubungi Kami, berfungsi sebagai halaman informasi terkait nomor kontak dan alamat Komisi Yudisial RI

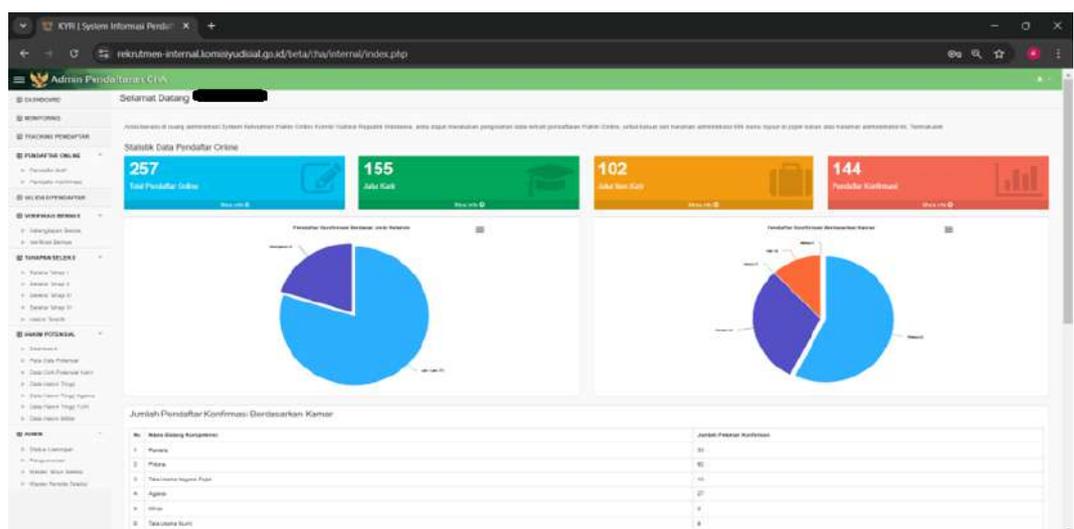
- Form Pendaftaran, merupakan halaman pendaftaran rekrutmen hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung



Gambar 3.15  
Sistem Informasi SCHA Menu Alur & Cara

### Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (Halaman Administrator)

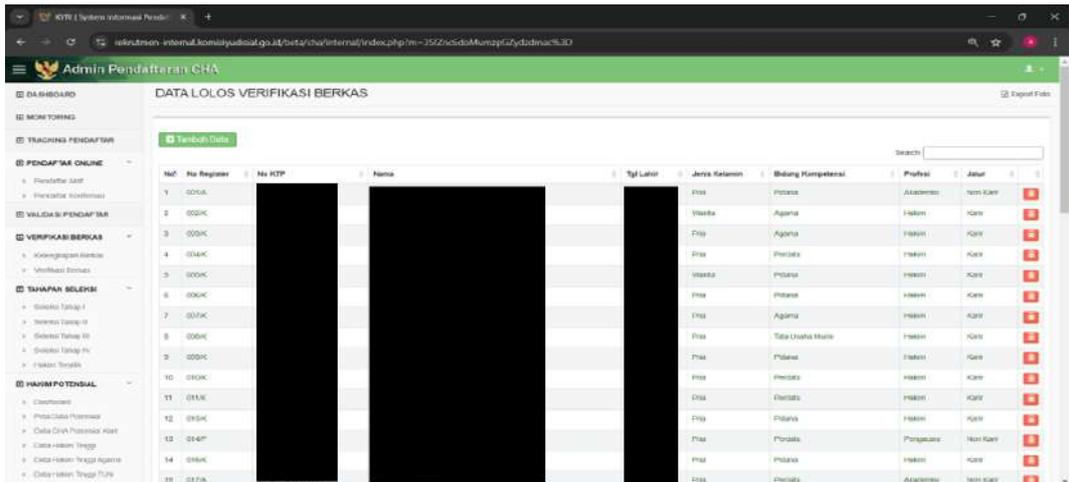
Sistem ini dapat digunakan oleh administrator (admin) yang akan melakukan pengolahan data pendaftaran calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.



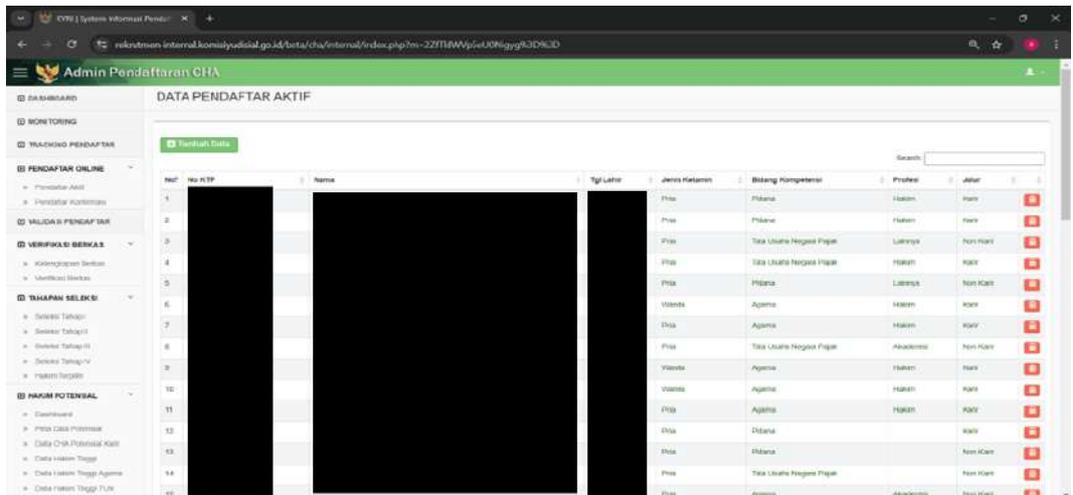
Gambar 3.16  
Sistem Informasi SCHA Halaman Administrator

Adapun pada sistem ini terdapat menu-menu:

- Dashboard, berfungsi sebagai halaman pertama yang tampil saat halaman admin aplikasi diakses;
- Pendaftar, berfungsi sebagai halaman informasi profil pendaftar seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung
- Pendaftar Konfirmasi, berfungsi sebagai halaman data pengolahan pendaftar yang telah melakukan konfirmasi terkait pendaftaran seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung
- Verifikasi Berkas, berfungsi sebagai halaman pengolahan data berkas pendaftar seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung
- Tahapan Seleksi, berfungsi sebagai halaman pengolahan data pendaftar dalam tahapan seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung
- Menu Pengumuman, berfungsi sebagai halaman data pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung
- Master Tahun SCHA, berfungsi sebagai halaman data master tahun seleksi calon hakim agung atau hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung



Gambar 3.17  
Sistem Informasi SCHA Menu Verifikasi



Gambar 3.18  
Sistem Informasi SCHA Menu Pendaftar



Gambar 3.19  
Notifikasi terkait pendaftaran seleksi melalui email

## b. Persentase Pemutakhiran Data dan Informasi

Target untuk sasaran kegiatan persentase pemutakhiran data dan informasi adalah 80%. Pencapaian dari target tersebut dihitung berdasarkan jumlah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan total data hakim yang dimiliki KY yang berjumlah lebih kurang 8.284. Selama tahun 2024 sebanyak 6.911 data hakim telah dimutakhirkan. Data bersumber dari berbagai informasi yang dikumpulkan Komisi Yudisial, di antaranya data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan. Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan KY, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan target perjanjian kinerja sasaran kegiatan ini adalah 80% dari data hakim yang dikelola Komisi Yudisial. Sedangkan untuk tahun 2023, target dari pemutakhiran data adalah 70% dari data hakim yang dikelola Komisi Yudisial. Untuk tahun 2024 proses pemutakhiran data hakim apabila diuraikan dapat dilihat dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Data Hakim : 8.284 data hakim

Target sesuai sasaran : 80% dari data hakim

Data yang dimutakhirkan : 6.911 data hakim

Hasil pemutakhiran :  $[(6.911 : 8.284) \times 100\%] = 83,42\%$ .

Sehingga, capaian kinerja pemutakhiran data hakim adalah realisasi persentase dibagi target persentase dikali 100% yaitu  $[(83,42\% : 80\%) \times 100\%] = 104\%$ .

Adapun kendala dalam memutakhirkan data hakim dengan mengandalkan data dari TPM adalah hal tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung/waktu nyata/*real time*. Ditambah lagi, data yang dapat dimutakhirkan sebatas jabatan masing-masing hakim sesuai hasil TPM. Adapun data yang lain semisal riwayat

pendidikan, riwayat pelatihan, dan lain-lain belum dapat dilakukan. Untuk menjawab permasalahan mendasar ini, integrasi data hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat diharapkan dapat segera terwujud.

## 2. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO/IEC 27001. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen KY terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek *confidentiality, integrity, dan availability* (CIA). Komisi Yudisial telah memulai implementasi ISO/IEC 27001 dengan tersertifikasi pertama kali pada tahun 2017. Dari siklus pelaksanaan sertifikasi ISO/IEC 27001 ini, pada tahun 2024 telah sampai pada siklus surveillance 1. Dimana sejak 2023, dilakukan upgrade dari ISO/IEC 27001:2013 menjadi ISO/IEC 27001:2022.



Gambar 3.20  
Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Tahun 2024 Komisi Yudisial

Berdasarkan ringkasan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi eksternal, KY dinyatakan berhak untuk memperoleh sertifikat ISO

27001:2022 dengan ruang lingkup *data center*, *helpdesk*, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%.

Hasil audit SMKI tahun 2024 mencatat ada tiga temuan minor. Adapun temuan tersebut adalah penggunaan *password* yang belum sesuai standar untuk aplikasi penanganan laporan masyarakat (PLM) dan aplikasi pelaporan masyarakat <https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/>. Temuan kedua belum dilakukan sinkronisasi waktu (NTP) pada *access door*, dan catatan ketiga di saat dilakukan observasi di ruangan genset, ditemukan karyawan/teknisi yang merokok, sehingga ada resiko kebakaran karena ada bahan bakar solar pada ruangan genset. Dari dua temuan minor yang menjadi catatan audit telah ditindaklanjuti oleh tim SMKI dengan menyerahkan *corrective action plan* (CAP) kepada auditor (lembaga sertifikasi eksternal).



Gambar 3.21  
Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi dan Tim SMKI Mendampingi Auditor Internal Saat Melakukan Audit di Disaster Recovery Center Komisi Yudisial

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 202 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

- a.** pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2023;
- b.** menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2022;
- c.** sosialisasi dokumen dan *awareness* SMKI;
- d.** evaluasi dan monitoring implementasi SMKI;
- e.** audit internal;
- f.** tinjauan manajemen;
- g.** audit surveillance 1 SMKI (28-29 November 2024) oleh pihak eksternal.

**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
**ISO/IEC 27001:2022**  
 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

This is to certify, that:

**Komisi Yudisial Republik Indonesia**

Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat - 10450

*has been found to conform with the requirements of the Management System Standard mentioned above.*

**Scope of Certification**

The provision of Information Security Management Systems of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services

This is in-accordance with Statement of Applicability Document, Number 12/AL.2/SI.04/02/2023, Revision 5.0, Released date 13 February 2023

Yessiva, S.T., M.B.A.  
 President Director

**Cert. Number: ISMS1001009**

*(please click above for certificate validity)*

Initial Certification Date : 02 February 2018  
 Latest Certification Date : 22 January 2024  
 Issue Date : 23 January 2024  
 Expired Date : 31 January 2027



(scan me)



(Barcode KAN)

This certificate is issued according to the agreed Certification Agreement of certification services that can be accessed at [www.cbqa-global.com/certification-agreement](http://www.cbqa-global.com/certification-agreement). This certificate's validity is subject to the continued satisfactory maintenance of the Organisation's Management System. Certificate could be validated by clicking on the link provided above (on the left-hand side) or by scanning both codes provided above (on the middle & right-hand side) with a smartphone.  
 Office Address: South Quarter Tower A, 17th floor Unit B2-C1, Jl. R.A. Kartini Kav. B, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430



Gambar 3.22  
 Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 Komisi Yudisial oleh Lembaga Sertifikasi CBQA Global Indonesia

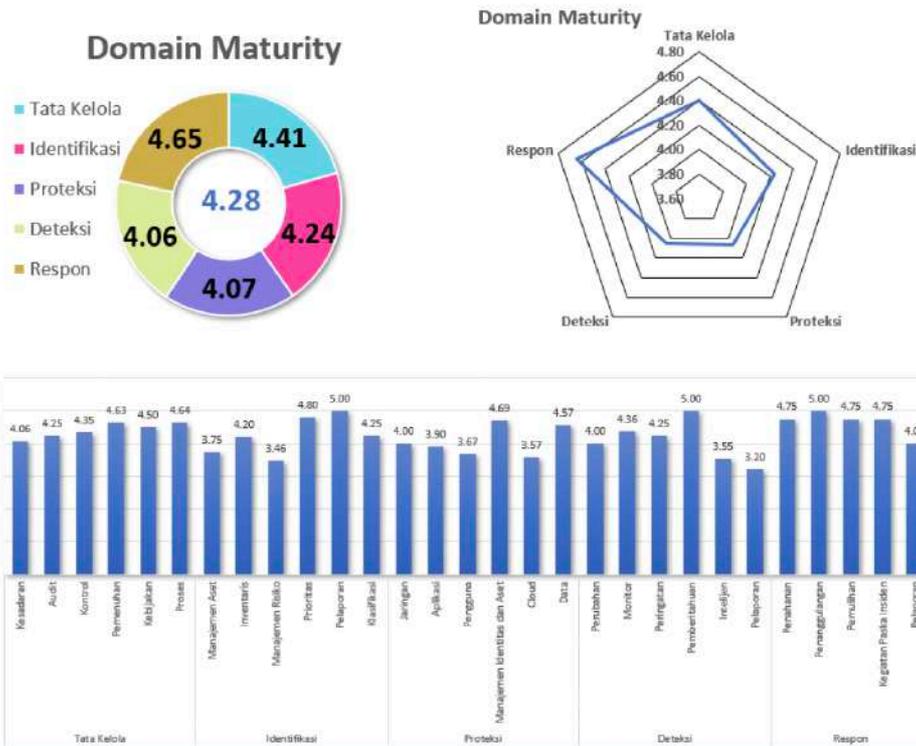


Gambar 3.23  
Tim SMKI KY Mendampingi Auditor Eksternal Saat Audit dan Melakukan  
Pengecekan Fasilitas Disaster Recovery Center Komisi Yudisial

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah membentuk tim penanganan insiden siber atau *Computer Security Incident Response Team* (KY-CSIRT) sejak tahun 2022. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Yudisial melakukan pelatihan penanganan insiden siber seperti *cyber drill* dan penerapan *devsecops* dan *vulnerability management* dalam pengelolaan risiko keamanan siber.

Sebagai bagian komitmen terhadap keamanan informasi, Komisi Yudisial juga melakukan pengukuran tingkat kematangan keamanan siber yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini untuk mengetahui gambaran tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu ditingkatkan pada setiap aspek keamanan siber sehingga KY secara mandiri maupun bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dapat menyusun strategi peningkatan kematangan keamanan siber (*Cyber Security Maturity*) dengan lebih efektif.

Tata Kelola		Identifikasi		Proteksi		Deteksi		Respon	
4.41		4.24		4.07		4.06		4.65	
Kesadaran	4.06	Manajemen Aset	3.75	Jaringan	4.00	Perubahan	4.00	Penhanaan	4.75
Audit	4.25	Inventaris	4.20	Aplikasi	3.90	Monitor	4.36	Penanggulangan	5.00
Kontrol	4.35	Manajemen Risiko	3.46	Pengguna	3.67	Peringatan	4.25	Pemulihan	4.75
Pemenuhan	4.63	Prioritas	4.80	Manajemen Identitas dan Aset	4.69	Pemberitahuan	5.00	Kegiatan Paska Insiden	4.75
Kebijakan	4.50	Pelaporan	5.00	Cloud	3.57	Intelijen	3.55	Pelaporan	4.00
Proses	4.64	Klasifikasi	4.25	Data	4.57	Pelaporan	3.20		



Berdasarkan penilaian instrumen CSM tersebut diperoleh bahwa:

**Total Score Indeks Kematangan: 4.28**

Gambar 3.24

Hasil Indeks Kematangan Cyber Security Maturity Komisi Yudisial

Dari hasil penilaian, Komisi Yudisial memperoleh Total Score Indeks Kematangan: 4.28. Secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber prosesnya sudah terorganisir dengan baik namun belum dilakukan proses otomatisasi, bersifat formal, dilakukan secara berulang dan direviu secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini dapat terukur dengan baik.

Sebagai tindaklanjut kerja sama Komisi Yudisial dan Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Analisis dan Layanan Informasi juga rutin melakukan koordinasi dengan BIN baik melakukan pertemuan atau sharing informasi melalui Buletin Ancaman Serangan Siber Infrastruktur Komisi Yudisial yang diterbitkan BIN secara berkala.



Gambar 3.25  
Buletin Ancaman Serangan Siber Infrastruktur IT Komisi Yudisial

### 3. Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian

Target indikator kinerja pada sasaran kegiatan terlaksananya penelitian dan pengkajian adalah tiga rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian. Pada tahun 2024, Bidang Analisis dan Fasilitas Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi berhasil menghasilkan tiga rekomendasi sebagaimana dimaksud, antara lain:

## **A. Kajian Kelembagaan**

### **1. Kajian Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial Periode 2017 s.d 2023**

Komisi Yudisial, merupakan salah satu organ konstitusi yang memiliki mandat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Amanah konstitusi tersebut kemudian diturunkan ke dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Komisi Yudisial dalam pelaksanaan amanah tersebut, telah menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Sejak berdirinya tahun 2005, Komisi Yudisial telah melaksanakan kegiatan seleksi hakim agung, yang kemudian telah menghasilkan kurang lebih 82 Hakim Agung yang saat ini bertugas di Mahkamah Agung. Kegiatan yang berlangsung secara rutin ini memerlukan masukan-masukan untuk penyempurnaan terhadap proses rekrutmen, dan sekaligus untuk melihat ekspektasi dari para calon potensial pendaftar hakim

agung di masa depan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa KY menjaring kandidat terbaik yang dapat ditawarkan oleh komunitas hukum di Indonesia untuk menjadi Hakim Agung.

Dalam periode 2017 s.d 2022 saja, terdapat kurang lebih 709 pendaftar hakim agung dari berbagai latar belakang keahlian hukum. Para pendaftar tersebut memperebutkan kurang lebih 69 kursi Hakim Agung. Hal ini menyebabkan, perebutan kursi Hakim Agung menjadi sangat kompetitif, dengan setiap 1 kursi lowongan Hakim Agung diperebutkan oleh setidaknya 10 Kandidat.

Tabel 3.2  
Rekapitulasi Tahap Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2017-2022

Periode	Permintaan	Pendaftar	Lulus KY	Lulus DPR
2017-1	6	86	5	5
2017-2	8	84	2	2
2018	8	87	4	0
2019	11	80	6	5
2020	1	16	1	0
2021-1	13	127	11	7
2021-2	11	134	8	2
2022	11	95	8	3

*\*Sumber Sistem Informasi Rekrutmen Hakim Agung Komisi Yudisial, 2023*

Berangkat dari keinginan untuk memastikan proses rekrutmen hakim agung dapat menjaring talenta-talenta terbaik, Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Komisi Yudisial merasa perlu untuk melaksanakan survei terkait seleksi calon hakim agung, terutama sekali untuk melihat faktor-faktor pendorong bagi seseorang untuk mendaftarkan diri menjadi Hakim Agung, dan melihat faktor penghambat bagi seseorang untuk mendaftarkan diri menjadi Hakim Agung.

Tujuan dilakukan kajian ini adalah untuk melihat bagaimana minat dari kandidat potensial calon hakim agung untuk mendaftarkan diri menjadi calon hakim agung, serta melihat bagaimana gambaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA) dan

dampaknya terhadap minat dari kandidat calon hakim agung untuk mendaftarkan diri.

Berdasarkan rencana kerja 2024 dan anggaran tahun 2024, langkah-langkah dalam penyelenggaraan kajian ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

**a. Pemetaan dan Analisa Permasalahan**

Pada tahapan ini, Tim Kajian melakukan diskusi dengan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Bpk. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D, dan akhirnya diperoleh tema untuk melakukan kajian mengenai Seleksi Calon Hakim Agung, dengan fokus utama adalah mencari tahu minat masyarakat untuk mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung. Tema tersebut sama dengan tema kajian pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2023 sifatnya hanya sebagai *pilot project* sedangkan pelaksanaan finalnya pada tahun 2024.

Selanjutnya, dari tema Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode 2017-2023, Tim Kajian melakukan perbaikan materi kuesioner dan menambahkan metode wawancara bagi responden dan narasumber terpilih bersama dengan Akademisi dari Universitas Padjajaran Bpk. Giri Ahmad Taufik dan Bpk. Dikdik Rahmat Mulyana selaku peneliti senior dari IDERPRC, sebagai langkah melakukan pemetaan dan menganalisa permasalahan apakah materi kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara sudah relevan dan tepat untuk menjawab rumusan permasalahan yang terdapat dalam kajian. Hasilnya, diperoleh sekitar 50 materi pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam kuesioner dan panduan untuk melakukan wawancara kepada responden dan narasumber terpilih.

Selain itu, pada tanggal 16 Februari 2024, Tim Pelaksana Kajian Bersama jajaran struktural di Pusat Analisis dan Layanan Informasi, melakukan kunjungan dan koordinasi kelembagaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan

Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta bantuan kepada Dirjen Dikti dalam penyebaran kuesioner di kalangan akademisi. Hasil yang diperoleh dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Dirjen Dikti menyanggupi untuk membantu penyebaran kuesioner di kalangan akademisi yang ada di Indonesia.



Gambar 3.26  
Kunjungan dalam rangka diskusi dengan dari Sesditjen Dikti

### **b. Pelaksanaan Kajian**

Pelaksanaan kajian dimulai dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan responden dosen/akademisi yang pernah mengikuti kegiatan seleksi calon hakim agung pada periode 2017 s.d 2023 dan juga para hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada Bulan Agustus s.d Oktober 2024. Setelah kuesioner disebar, maka dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber yang meliputi dosen/akademisi yang pernah mengikuti kegiatan seleksi

dalam periode 2017 s.d 2023, dan hakim tinggi di dua daerah yakni Bandung (pada tanggal 3 s.d 6 September 2024) dan Yogyakarta (pada tanggal 19 s.d 21 September 2024).

Hasil dari penyebaran kuesioner, responden yang mengisi kuesioner secara lengkap berjumlah 281 responden.

Hasil dari kegiatan wawancara, narasumber yang berhasil di wawancara berjumlah 8 orang yang terdiri dari 5 akademisi, 2 hakim tinggi, dan 1 Hakim Agung. Daftar narasumber sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Daftar Narasumber Yang Diwawancara

No	Responden	Profesi	Daerah
1	Prof. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururi, M.Ag., M.Si.	Dosen Universitas Gunung Djati	Bandung
2	Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum	Dosen Universitas Padjadjaran	Bandung
3	Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.	Dosen Universitas Islam Bandung	Bandung
4	Dr. Nur Aslam Gustaman, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Bandung
5	Dr. Theresia Endang, S.H., M.Kn.	Dosen UGM	Yogyakarta
6	Dr. M. Muslih KS., M.Ag	Dosen UII	Yogyakarta
7	Setyawan Hartono, S.H., M.H	Hakim Tinggi	Yogyakarta
8	Dr. Nani Indrawati., S.H., M.H. [1]	Hakim Agung	DKI Jakarta



Gambar 3.27  
Wawancara dengan narasumber di Universitas Islam Bandung

### c. Hasil Survei

Secara keseluruhan, survei ini menunjukkan bahwa proses seleksi calon hakim agung telah dilaksanakan dengan baik di sebagian besar tahapan, namun masih terdapat beberapa area yang perlu perbaikan, terutama dalam hal transparansi penilaian, biaya seleksi, dan pengaruh politik dalam tahapan *fit & proper test* DPR. Dengan memperbaiki pada aspek ini, Komisi Yudisial dapat meningkatkan kepercayaan dan minat partisipasi dalam seleksi di masa yang akan datang.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan kajian yang meliputi penyebaran kuesioner dan wawancara beserta pengolahan data dan Analisa adalah sebagai berikut:

#### 1. Transparansi Penilaian

Salah satu masalah terbesar yang ditemukan dalam proses seleksi adalah kurangnya transparansi penilaian. Mayoritas responden mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui dengan jelas kekurangan mereka pada setiap tahapan seleksi.

Hal ini disebabkan oleh penilaian yang dilakukan secara tertutup, tanpa memberikan umpan balik yang jelas kepada peserta mengenai alasan mereka diterima atau tidak pada setiap tahap seleksi. Akibatnya, peserta merasa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki kekurangan mereka atau memahami aspek apa yang perlu ditingkatkan agar mereka bisa lolos pada seleksi berikutnya.

## 2. Biaya Seleksi

Biaya seleksi yang tinggi menjadi salah satu hambatan terbesar yang ditemukan dalam survei. Sebagian besar responden, terutama mereka yang berasal dari jalur non-karir, seperti akademisi atau dosen hukum, menyatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti seleksi terlalu tinggi, baik dari sisi biaya administrasi maupun biaya transportasi dan akomodasi. Biaya seleksi yang tinggi menyebabkan beberapa calon peserta terhalang untuk mengikuti seleksi, terutama mereka yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menanggung biaya tersebut. Hal ini mengurangi keragaman peserta yang dapat ikut seleksi dan menurunkan partisipasi dari kelompok non-karir, seperti akademisi yang memiliki kompetensi teoritis namun tidak memiliki sumber daya untuk menanggung biaya seleksi.

## 3. Pengaruh Sosial (*Subjective Norms*)

Dalam survei, pengaruh sosial dari keluarga, rekan kerja, dan atasan sangat berperan dalam keputusan seseorang untuk mengikuti seleksi. Responden mengungkapkan bahwa mereka merasa terdorong oleh dukungan dari lingkungan sosial, yang memberikan motivasi untuk mengikuti seleksi. Banyak responden, khususnya dari kalangan hakim dan akademisi, mengatakan bahwa rekomendasi dan dorongan dari atasan menjadi faktor utama dalam keputusan mereka untuk berpartisipasi. Dukungan

sosial menjadi motivator yang sangat penting dalam mendorong peserta untuk mengikuti seleksi. Tanpa dukungan ini, calon peserta mungkin merasa tidak cukup percaya diri untuk mengikuti proses seleksi yang kompetitif.

#### 4. Penilaian Terhadap Proses Seleksi oleh Komisi Yudisial (KY)

Mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, khususnya dalam seleksi kualitas, kesehatan, dan kepribadian. Mereka merasa bahwa tahapan seleksi ini cukup komprehensif dan adil, serta memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki kompetensi untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi yang baik di Komisi Yudisial memperkuat kepercayaan peserta terhadap objektivitas seleksi. Hal ini membuat calon hakim agung merasa bahwa seleksi dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan kriteria yang diperlukan untuk menjadi hakim agung.

#### 5. Proses Fit & Proper Test DPR yang Buruk

Proses Fit & Proper Test DPR mendapatkan kritik yang cukup tajam dari sebagian besar responden. Mereka merasa bahwa tahapan ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politis daripada oleh kompetensi calon hakim agung. Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa tahapan ini tidak efektif dan lebih bersifat formalitas politis. Proses fit & proper test yang politis dapat menurunkan minat partisipasi karena calon peserta merasa bahwa penentuan kelulusan lebih ditentukan oleh faktor politik daripada oleh kualitas dan integritas mereka. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan pada proses seleksi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, secara umum saran perbaikan adalah untuk memberikan umpan balik yang jelas kepada peserta tentang kekuatan dan kelemahan mereka di setiap tahapan seleksi, mengurangi biaya seleksi dengan mengurangi beban

administrasi, dan memperbanyak sistem elektronik, memperkuat pengaruh sosial dengan mendorong lebih banyak dukungan dari atasan dan kolega melalui program mentoring atau pembinaan yang dapat dilakukan oleh KY; mengoptimalkan proses seleksi di Komisi Yudisial dengan mempertahankan standar seleksi yang tinggi dan profesional; dan menguji kembali peran fit & proper test oleh DPR, dengan mempertimbangkan penghapusan atau pengurangan intervensi politis dalam tahapan ini, agar seleksi lebih berfokus pada kompetensi calon.



Gambar 3.28

d. **Diseminasi Hasil Kajian**

Diseminasi hasil kajian kelembagaan dengan tema Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Periode 2017 s.d 2023 akan dilakukan pada awal tahun 2025 sebagaimana arahan dari Ketua Bidang Bpk. Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D selaku Anggota Komisi Yudisial yang membawahi Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

**B. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi**

Selama tahun 2024, kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi telah memilih 20 putusan dari perkara perdata, pidana, agama dan TUN. Dua puluh putusan tersebut juga dilengkapi dengan 40 putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran bahwa setiap yurisprudensi seharusnya diikuti oleh minimal dua putusan lain. Kelima belas putusan tersebut juga diperkaya dengan 60 anotasi yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang kredibel.

Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, melainkan untuk memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Ketiga langkah dalam kegiatan karakterisasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi terkait dengan putusan khususnya bagi hakim dan secara umum bagi masyarakat.

Pada kegiatan ini Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata (Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK) Kehakiman melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Bidang Analisis dan Fasilitasi

Pembinaan JFPK juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 3.4  
Data Putusan Yurisprudensi dan Putusan Pengikut Kaidah Yurisprudensi

NO	NOMOR PUTUSAN YURISPRUDENSI	NO PUTUSAN PENGIKUT
1	5/Yur/Pdt/2018 (976 K/Pdt/2015)	290 K/Pdt/2016
		170 K/Pdt/2017
2	1/Yur/PHI/2018 (158 K/Pdt.Sus/2007)	1339K/Pdt.Sus-PHI/2017
		652 K/Pdt.Sus-PHI/2017
3	5096 K/Pdt/1998	7/Pdt.G.S/2022/PN Bau
		26/Pdt.G/2020/PN Pol
4	3676 K/Pdt/1991	999 K/Pdt.Sus-HKI/2019
		20 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
5	6/Yur/Pdt/2018 (158 K/Pdt/2005; 403 PK/Pdt/2015}	1775 K/Pdt/2017
		2520 K/Pdt/2017
6	2/Yur/Pdt/2018 (244 K/Sip/1959)	573 K/Pdt/2017
		2490 K/Pdt/2015
7	329 K/Pid/1996	25/PID.B/2017/PT.PBR
		22/PID/2022/PT.BDG
8	1677 K/Pid/1993	567 K/Pid/2023
		191/Pid.B/2021/PN Pti
9	1213 K/Pid/1994	567 K/Pid/2023
		100/Pid.B/2021/PN. Jkt.Utr
10	2399 K/Pid.Sus/2010	2476 K/PID.SUS/2010
		110 K/Pid.Sus/2016
11	1542 K/Pid.Sus/2008	436 / Pid.Sus / 2013 / PT.SBY
		862 K/Pid.Sus/2010
12	137 K/AG/2007	Putusan No. 608/AG/2003

		Putusan No. 299 K/AG/2003
13	01 K/AG/1979	Putusan No. 351 K/Pdt/2015
		Nomor 65/Pdt.G/2015/PTA.PBR
14	15 K/AG/1980	Nomor 0113/Pdt.G/2013/PA Crp.
		Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tnn
15	285 K/AG/2000	Putusan No.55/Pdt.G/2016/PA.Sgt.
		Putusan No. 4/Pdt.G/2013/PA- Pst
16	04 K/AG/1979	Nomor 0375/Pdt.G/2012/PA.Crp
		Nomor 127/Pdt.G/2021/PA.Ek
17	154 PK/TUN/2010	No. 89/G/2018/PTUN.BDG
		No. 11/G/2021/PTUN.BJM
18	93 K/TUN/1996	No. 473K/TUN/2020
		No. 29/G/2022/PTUN.MTR
19	312K/TUN/1996	No. 459 K/TUN/2020
		No. 134/G/2020/PTUN.MDN
20	5 K/TUN/1992	No. 207/G/2020/PTUN-JKT
		No. 9/G/2021/PTUN.BJM

Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali diseminasi hasil karakterisasi putusan berbasis aplikasi ke berbagai perguruan tinggi dan pengadilan.



Gambar 3.29  
Dokumentasi Kegiatan Diskusi Terkait Program Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi dengan Hakim di PN Batam



Gambar 3.30  
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi & Diseminasi Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi di Universitas Muhammadiyah Cirebon

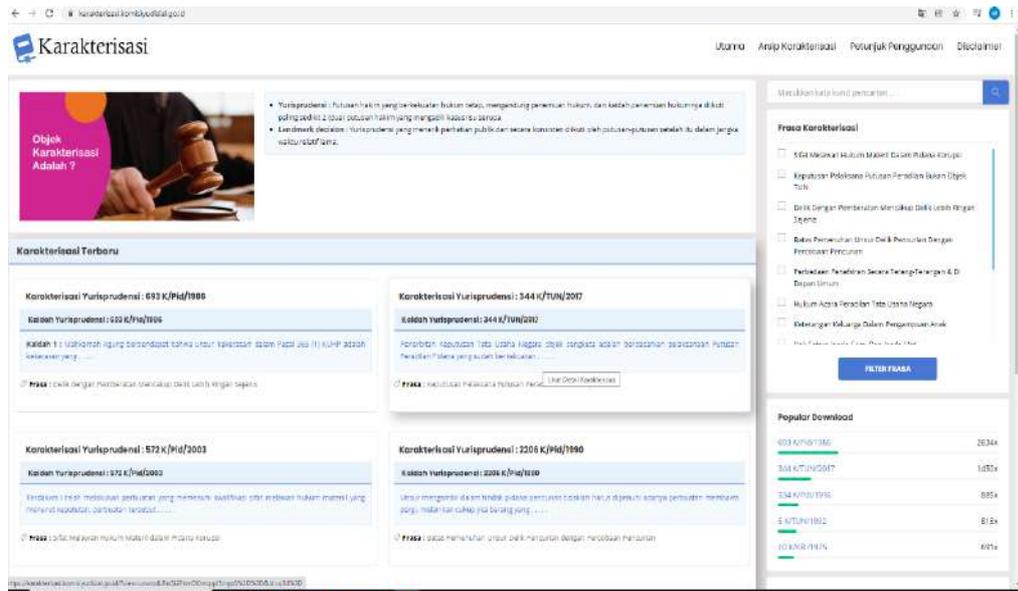


Gambar 3.31  
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi & Diseminasi Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Pada tahun 2024, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 120 dokumen. Kegiatan karakterisasi putusan berbasis aplikasi ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat [karakterisasi.komisiyudisial.go.id](http://karakterisasi.komisiyudisial.go.id),
- 2) Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Rekomendasi sebagaimana disebutkan di atas telah diterima. Rencananya, program karakterisasi putusan berbasis aplikasi akan dilaksanakan kembali pada tahun 2025. Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan kegiatan ini pada tahun 2024 adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs [karakterisasi.komisiyudisial.go.id](http://karakterisasi.komisiyudisial.go.id) sebanyak 60.000 kali.



Gambar 3.32  
Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan

### C. Analisis Putusan

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK pada tahun 2024 melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan empat perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan satu LSM. Walaupun saat ini KY tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjangkau calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:

- 1) Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi dan LSM.

Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, *Institutes for Criminal Justices Reform* (ICJR), Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Fakultas Hukum Universitas Mataram dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 2024 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 60 putusan pengadilan.

- 2) Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan pedoman analisis putusan berupa metode dan format penulisan yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu sebagai bahan dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan reviu terhadap draf final hasil analisis putusan.

- 3) Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra di tempat kedudukan.

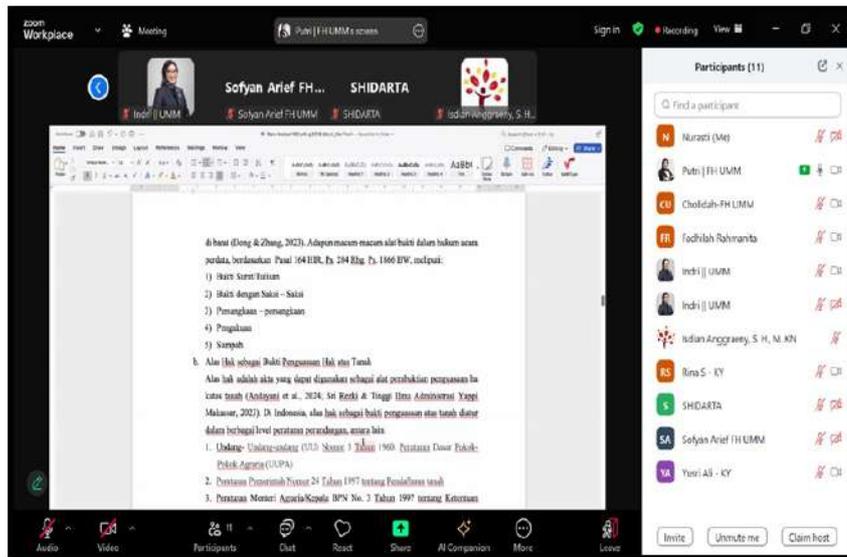
Sebagai tahap akhir dalam program analisis putusan, mitra analisis melakukan diseminasi hasil analisis putusan sebagai publikasi kepada sosialisasi kepada publik – civitas akademika hukum.

- 4) Bahan Publikasi

Adapun bahan publikasi program analisis putusan 2024 merupakan hasil pengolahan dari hasil analisis putusan yang dilakukan tahun sebelumnya (begitupun akan dilakukan di tahun 2025).



Gambar 3.33  
Penyamaan persepsi mitra analisis



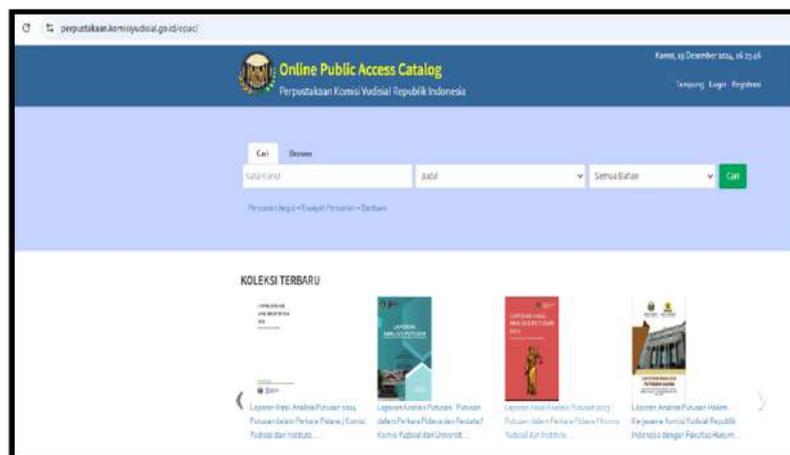
Gambar 3.34  
Reviu draf hasil analisis putusan



Gambar 3.35  
Diseminasi hasil analisis putusan



Gambar 3.36  
Diseminasi hasil analisis putusan



Gambar 3.37  
Bahan Publikasi hasil analisis putusan berupa Buku Hasil Analisis Putusan Chapter I & Publikasi Hasil Laporan Analisis Putusan di Website Perpustakaan Komisi Yudisial

Pada tahun 2024 indikator kinerja ini masih memasang target yang sama yaitu tiga rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Renstra. Oleh sebab itu upaya atau strategi untuk mencapai target yang akan dilakukan oleh Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK di tahun 2024 akan identik dengan yang dilakukan pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK juga melakukan kegiatan penunjang di luar sasaran kegiatan yang ada dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Para pejabat fungsional analis hukum yang ada di Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan JFPK dilibatkan oleh Bagian Rekrutmen Hakim Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim untuk membuat soal kasus hukum kamar pidana, perdata, agama, TUN, TUN khusus pajak, dan HAM yang akan dipergunakan dalam seleksi kualitas calon hakim agung. Kegiatan ini dilakukan pada semester II tahun 2024.

#### **4. Terlaksananya Layanan Manajemen Fungsional Penata Kehakiman**

Terdapat target indikator kinerja pada layanan manajemen fungsional penata kehakiman yaitu pengelolaan administrasi fungsional penata kehakiman yang dilakukan oleh Unit Pembina JF Penata Kehakiman di bawah pelaksanaan teknis Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Pada tahun 2024, pengelolaan administrasi fungsional penata kehakiman berfokus pada antara lain:

##### **a. Penyusunan Naskah Soal Kompetensi Teknis Pengadaan CASN**

Unit Pembina JF Penata Kehakiman menjadi fasilitator dalam penyusunan naskah soal kompetensi teknis CASN JF Penata Kehakiman TA 2024. Penyusunan naskah soal dilakukan oleh tim penyusun yang terdiri dari 13 orang dari Biro Teknis yaitu Biro Pengawasan Perilaku (Waskim), Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP-KH), dan Biro Investigasi. Terdapat 350 dari 700 soal yang perlu disusun dan jumlah soal yang terbagi pada 3 Biro Teknis yaitu BRAP-KH 110 soal, Biro Waskim 127 soal, dan Biro Investigasi 128 soal. Terdapat standar kompetensi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal seperti kompetensi, deskripsi, dan indikator kompetensi. Dalam menyusun naskah soal, setiap penyusun wajib melakukan tanda tangan pakta integritas guna menjaga kerahasiaan naskah soal yang telah dibuat.



Gambar 3.38  
Penyusunan naskah soal kompetensi teknis CASN JF Penata Kehakiman TA 2024



Gambar 3.39  
Penyusunan naskah soal kompetensi teknis CASN JF Penata Kehakiman TA 2024

- b. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Focus Group Discussion (FGD) antara Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial RI dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN (Puslatbang PKASN) LAN RI**

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan *Focus Group Discussion* (FGD) telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di Bandung. Penandatanganan PKS dilakukan antara Kepala Pusat Palinfo Komisi Yudisial dan Kepala Puslatbang PKASN LAN RI. Kegiatan ini dihadiri mulai dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Sestama LAN RI (via zoom), Kapus Palinfo Komisi Yudisial dan jajaran, serta Kepala Puslatbang PKASN LAN RI dan jajarannya. Maksud dan tujuan dari PKS ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Penata Kehakiman serta untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Penata Kehakiman. Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun ruang lingkup dari PKS ini yaitu:

- ✓ Penyusunan Cetak Biru Pengembangan Kompetensi Penata Kehakiman;
- ✓ Pemetaan Kompetensi Teknis;
- ✓ Penyusunan Kurikulum dan Modul Pengembangan Kompetensi JF Penata Kehakiman;
- ✓ Pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- ✓ Pemanfaatan sarana dan prasarana Pengembangan Kompetensi.



Gambar 3.40  
Proses Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Palinfo dengan  
Puslatbang PKASN LAN RI



Gambar 3.41  
Foto bersama

Setelah melakukan penandatanganan PKS, kegiatan dilanjut dengan pelaksanaan FGD yang mana diawali dengan pemaparan masing-masing bisnis proses tiap Biro yaitu Biro Investigasi, Biro Pengawasan Perilaku, dan Biro Rekrutmen,

Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Kemudian dilanjutkan diskusi mengenai *blueprint* pengembangan kompetensi, manajemen penyelenggaraan pelatihan, uji kompetensi, *outline* dan *timeline* untuk *blueprint*, pemetaan kompetensi, hingga penyusunan kurikulum.



Gambar 3.42  
Pelaksanaan FGD antara Palinfo dengan Puslatbang PKASN LAN RI

### c. Uji Kompetensi Perpindahan dari Fungsional Umum ke Fungsional Penata Kehakiman

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, salah satu tugas Unit Pembina adalah menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Uji kompetensi bertujuan sebagai alat untuk mendapatkan bukti valid secara otentik sebagai acuan apakah peserta uji kompetensi tersebut sudah kompeten atau tidak terhadap materi kompetensi yang telah diujikan. Uji kompetensi tersebut diselenggarakan secara transparan, tanpa adanya diskriminasi. Metode pelaksanaan uji kompetensi peralihan Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan beberapa metode yang pelaksanaannya dipusatkan di Pusat Pengembangan Pemetaan Kompetensi ASN (Puslatbang PKASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jatinangor,

Sumedang Jawa Barat. Uji Kompetensi terdiri dari bidang Manajerial dan Sosio Kultural yang dilakukan oleh Tim Assesmen Balai Pemetaan Kompetensi PPKASN LAN dan Uji Kompetensi Teknis dilakukan oleh Tim Uji kompetensi yang terdiri dari representasi Struktural, Unit Pembina dan Fungsional Penata Kehakiman.

Tabel 3.5  
Peserta Uji Kompetensi perpindahan Jabatan ke Fungsional Penata Kehakiman

NO	NAMA	NIP	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Fitria Irfanila	198107212007122001	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
2.	Maimuna Saimima	197307022008122001	Analisis Pelanggaran KEPPH	BRAPKH
3.	Nelly Novianty	198111062008122001	Analisis Sumber Daya Manusia	Umum
4.	Rendro Bowo Wahyudi	197906132008121001	Analisis Keuangan	Umum
5.	Rohmah Dwi Cahyaningsih	198502222010122001	Analisis Pelanggaran KEPPH	BRAPKH
6.	Bunga Permata Hediningih	198907172014022002	Analisis Advokasi	BRAPKH
7.	Albertus Purwo Nugroho	198610242014021002	Penelaah Teknis Kebijakan	Umum
8.	Anggi Quartir Sitohang	199002032014022002	Penelaah Teknis Kebijakan	Umum
9.	Adrianus Umbora	198510192014071001	Analisis Barang Milik Negara	Umum
10.	Farid Misdar Khoiri	198406222015021001	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
11.	Santoso Ari Wibowo	198703112015021001	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
12.	Peony Tarida Uli Purba	198310112015022001	Analisis Kompetensi	BRAPKH
13.	Dini Wahyuni	199011262015022001	Analisis Advokasi	BRAPKH
14.	Abdul Haris	198612122017121001	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
15.	Kathon Bagus Kuncoro	199403172017121004	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
16.	Tandi Arion	199404032017121007	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
17.	Alfaiz Fadli	199501082017121005	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim
18.	Frida Hanaritantoro	199509082017122004	Analisis Pelanggaran KEPPH	Waskim

Uji kompetensi perpindahan jabatan dari Fungsional Umum ke Fungsional Penata Kehakiman ini dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Juli 2024. Dalam tiga hari tersebut peserta menjalani rangkaian proses ujian yang telah di desain untuk para peserta membuktikan bahwa para peserta layak diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Setelah pelaksanaan uji kompetensi selesai, Unit Pembina mendapatkan hasil tes manajerial sosio kultural dari Puslatbang PKASN LAN, tim uji kompetensi mengadakan rapat pleno hasil penetapan Uji Kompetensi perpindahan Jabatan Fungsional

Penata Kehakiman. Hasil dari rapat pleno disampaikan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi yang berbentuk Nota Dinas kepada Kepala Biro masing-masing.



Gambar 3.43

Pelaksanaan CAT uji kompetensi perpindahan jabatan dari fungsional umum ke Fungsional Penata Kehakiman di Assessment Center Puslatbang PKASN LAN RI



Gambar 3.44

Foto bersama peserta dan Kepala Puslatbang PKASN LAN RI

## 5. Terlaksananya Pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan

Fungsional Penata Kehakiman, Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman adalah memiliki tugas dalam pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan tugas teknis lain yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Unit Pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman berperan dalam pengelola Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan khususnya pada Fungsional Penata Kehakiman. Oleh karena itu, terdapat capaian kinerja pada pengembangan jabatan fungsional penata kehakiman di tahun 2024 diantaranya:

**a. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penata Kehakiman**

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional atau Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional atau Teknis adalah kegiatan dalam peningkatan dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang sesuai dengan profesi Penata Kehakiman. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pembina JF Penata Kehakiman maka perlu diselenggarakannya pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Pelatihan merupakan suatu bentuk pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melalui pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelatihan teknis merupakan program pengembangan Kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman sedangkan pelatihan fungsional terdiri atas pelatihan fungsional Penata Kehakiman Ahli Pertama, pelatihan fungsional Penata

Kehakiman Ahli Muda, pelatihan fungsional Penata Kehakiman Ahli Madya, dan pelatihan fungsional Penata Kehakiman Ahli Utama. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan dua pelatihan teknis JF Penata Kehakiman yaitu:

**1) Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama**

Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Penata Kehakiman adalah sebuah kegiatan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN khususnya pada Fungsional Penata Kehakiman di Biro Teknis melalui pendidikan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi kebutuhan Standar Kompetensi dan pengembangan karier sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, dan meningkatkan kinerja organisasi dengan peningkatan profesionalitas Fungsional Penata Kehakiman. Metode pembelajaran dalam Pelatihan ini yaitu menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan latihan soal yang hasilnya dipresentasikan.

Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 8 Mei 2024 di Bogor ini diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) peserta dari tiga Biro Teknis yaitu Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP-KH), Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim), dan Biro Investigasi.

Tabel 3.6  
Daftar Peserta Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata Kehakiman  
Jenjang Ahli Pertama

NO	NAMA	NIP	BIRO
1	Kurniawan Desiarto	197712012008121001	BRAP
2	Narwanto	197310132008121001	BRAP
3	Rika Dwijayanti	198501072008122001	BRAP
4	Rury Rikawati	198201112007122001	BRAP
5	Ilham Sanjaya	199009152014021001	BRAP
6	Alvi Hidayat	198801152019021002	BRAP
7	Candrika Putrie Irandi	199405222017122004	BRAP
8	Niken Evita Novianti	198703062010122001	BRAP
9	Belia Farah Adila	199307272017122002	WASKIM
10	Fhadilah Eka Pratiwi	199106032017122002	WASKIM
11	Fina Puspita Fitriyanti	199503152017122001	WASKIM
12	Hendro Tri Wibowo	199105182019021006	WASKIM
13	Maruly Jeska Simanjuntak	199312282017121008	WASKIM
14	Maully Nova Risya	198611012017122001	WASKIM
15	Mega Ayu Werdiningsih	199209172017122003	WASKIM
16	Novalina Gresy Astika	199101282017122001	WASKIM
17	Novendia Dara Cintaanito	199211222017122001	WASKIM
18	Onni Dyah Prameswari	199212142017122001	WASKIM
19	Rahadian ihtisyamuddin	199504272019021003	WASKIM
20	Rahmawati Cahyaningrum	199605092017122003	WASKIM
21	Richard Johan Suweny	198905052019021005	WASKIM
22	Rifatul Husniah	199304042017122002	WASKIM
23	Riki	198509072009121002	WASKIM
24	Riyo Eka Sahputra	199210312017121007	WASKIM
25	Sendy Prasetya	199308102017121000	WASKIM
26	Shahnaz Hani Sofi	199210252019022006	WASKIM

27	Sri Devi Annisa Fitri	199412202017122002	WASKIM
28	Wiwi Widianti	199306262019022006	WASKIM
29	Fikri Amali	199202152023211001	WASKIM
30	Mulyadi Nur	198201082023211000	WASKIM
31	Surya Purnama	199107262023211006	WASKIM
32	Adam Tri Kurniawan	199704052024211001	BRAP

Pelatihan Teknis Dasar Kompetensi Bidang Investigasi Fungsional Penata Kehakiman dilakukan selama tiga hari pembelajaran dengan melibatkan 6 (enam) tim pengajar dari lintas instansi atau organisasi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang intelijen dan investigasi. Adapun daftar sesi-sesi pembelajaran dan pengajar sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Daftar Pembelajaran dan Pengajar Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama

NO	MATERI	PENGAJAR
1	Pelaksanaan peran investigasi di KPK	Tim Penyidik KPK
2	Pelaksanaan peran investigasi di KY RI	Kabag. Analisis, Produksi dan Dokumentasi
3	Investigasi tindak pidana korupsi di dunia peradilan	Satgas Pencegahan Korupsi POLRI
4	Strategi pengumpulan informasi intelejen di Kejaksaan RI	Jaksa Madya Kasi A.2.2 Direktorat A Jam Intelijen
5	Teknik investigasi dalam kepolisian	Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
6	<i>Open-Source Intelligence (OSINT)</i>	Praktisi OSINT

Pelaksanaan Pelatihan Teknis Dasar Kompetensi Bidang Investigasi Fungsional Penata Kehakiman yang diselenggarakan dapat disimpulkan berjalan dengan baik, lancar dan mendapatkan apresiasi dari peserta. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran dimana terdapat lima elemen evaluasi berupa evaluasi metode dan media, evaluasi relevansi dan kemanfaatan, evaluasi fasilitas diklat, evaluasi

konsumsi, dan evaluasi suasana pembelajaran dengan hasil rata-rata semua elemen evaluasi yaitu Memuaskan.



Gambar 3.45  
Foto bersama peserta Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata  
Kehakiman Jenjang Ahli Pertama



Gambar 3.46  
Pemaparan pembelajaran oleh salah satu pengajar Pelatihan Teknis Dasar  
Investigasi Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama



Gambar 3.47  
Sesi tanya jawab peserta Pelatihan Teknis Dasar Investigasi Fungsional Penata  
Kehakiman Jenjang Ahli Pertama



Gambar 3.48  
Penyerahan plakat ke salah satu pengajar Pelatihan Teknis Dasar Investigasi  
Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama

## 2) Pelatihan Penguatan Kompetensi Fasilitator Penata Kehakiman Ahli Muda

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan  
pelatihan masih menjadi media efektif bagi jabatan

fungsional. Unit Pembina JF Penata Kehakiman telah menyelenggarakan pelatihan untuk Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Ahli Muda pada 12 s.d 16 November 2024 di Puslatbang PKASN LAN RI. Pelatihan ini menjadi prioritas untuk tahapan awal dalam pembentukan ekosistem pembelajaran bersama melalui *knowledge sharing* sebagai salah satu bentuk strategi pengembangan kompetensi Fungsional Penata Kehakiman yang lebih profesional dan berintegritas yang kemudian akan diintegrasikan melalui kurikulum terpadu pelatihan teknis yang direncanakan pada masa yang akan datang.



Gambar 3.49  
Pemaparan pembelajaran oleh salah satu pengajar Pelatihan Penguatan Kompetensi Fasilitator Penata Kehakiman Ahli Muda

Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan Fungsional Penata Kehakiman yang kompeten dan handal dalam memberikan pengembangan kompetensi melalui *knowledge sharing* bagi fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Pelatihan Penguatan

Kompetensi Fasilitator Penata Kehakiman Ahli Muda diikuti oleh total 24 (dua puluh empat) peserta.

Tabel 3.8  
Daftar Peserta Pelatihan Penguatan Kompetensi Fasilitator Penata Kehakiman Ahli Muda

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	Hendro Sukmono, S.H., M.H.	198009162007121001	Investigasi
2	Junaidi Syamfran, S.H.	197909092008121001	Waskim
3	Arif Budiman, S.Sos.	197904252008121001	Investigasi
4	Prasita Purwi Andini, S.I.P.	198706082009122001	Waskim
5	Deddy Isniyanto, S.H., M.H.	198412022010121001	Waskim
6	Rohmah Suaidiyah, S.H.	197809182009122001	Waskim
7	Tabah Sulisty, S.H., M.H.	198208212010121001	BRAP
8	Rachmanto Dwi Nugroho, S.H	198810092010121001	Waskim
9	Praverli Bandoro Elmularso, S.H., M.H.	198703312010121001	Waskim
10	Muslih Anhar, S.H.	198210102014021002	Waskim
11	Rista Magdalena Situmorang, S.H., M.H.	198506222014022002	Waskim
12	Putra Rahmatan Septian Walulima, S.H, M.H.	198509262014021002	Waskim
13	Dewi Masyitha, S.H., M.H.	198604062014022001	Investigasi
14	Muhammad Ananda Salahuddin Al Ayyubi Basmalah, S.H., M.S.I	199005102014021002	Investigasi
15	Taufiq Tri Adi Sunarko, S.H.,M.H.	199010302014021001	Investigasi
16	Ratih Imelda, S.H.	198505022014022001	Investigasi
17	Daniel Trienta Tarigan, S.H	198806022014021001	Investigasi
18	Hawari Tadyf, S.H.	198809182014021001	Investigasi
19	Irma Sianturi, S.H	198810082014022002	Investigasi
20	Miftahul Ardi, S.H	199109092014021001	Investigasi
21	Fina Puspita Fitriyanti, S.H., M.H.	199503152017122001	Waskim
22	Farid Misdar Khoiri, S.H., M.H.	198406222015021001	Waskim
23	Atsnaita Husna, S.H., M.Tr.A.P	198408122010122001	Unit Pembina
24	Aditya Billi Pritiwahyuning, S.M.	198903312024212005	Unit Pembina

Adapun indikator hasil belajar dalam pelatihan ini yaitu:

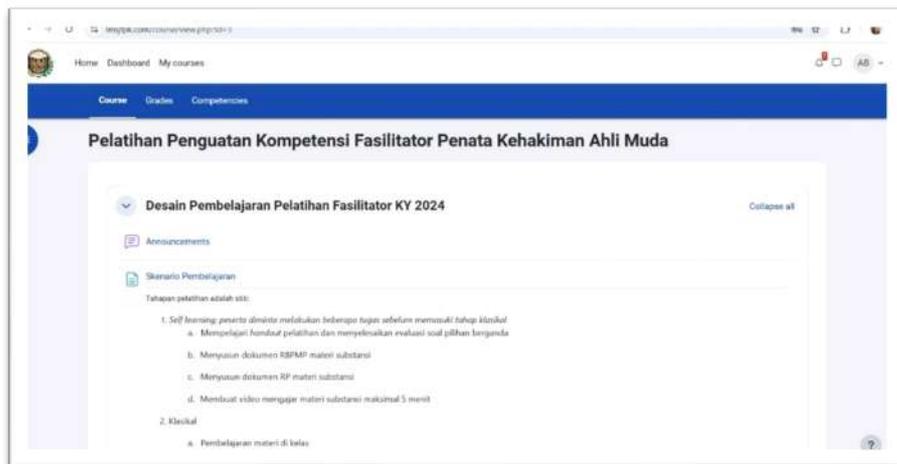
- ✓ Memahami proses Pembelajaran Orang Dewasa;
- ✓ Mempraktikkan penyusunan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan dan Rancangan Pembelajaran (RBPMP & RP);
- ✓ Mempraktikkan penggunaan metode pembelajaran;

- ✓ Mempraktikkan penggunaan media pembelajaran; dan
- ✓ Mempraktikkan *microteaching*.



Gambar 3.50  
Praktik *microteaching* oleh salah satu peserta Pelatihan Penguatan Kompetensi Fasilitator Penata Kehakiman Ahli Muda

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah beberapa teknik diantaranya adalah belajar mandiri melalui *Learning Management System* (LMS) yang juga dibantu oleh Puslatbang PKASN LAN, ceramah kelas atau pemaparan, diskusi dan tanya jawab serta *microteaching* yang sangat membantu para peserta mendapatkan pengalaman langsung yang dibutuhkan untuk mempraktekkan teori yang telah didapat selama masa pembelajaran sehingga diharapkan akan mampu ketika dihadapkan pada saat mengajar di kelas sesungguhnya.



Gambar 3.51  
Learning Management System (LMS) Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

## **b. Evaluasi Terhadap Implementasi Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman**

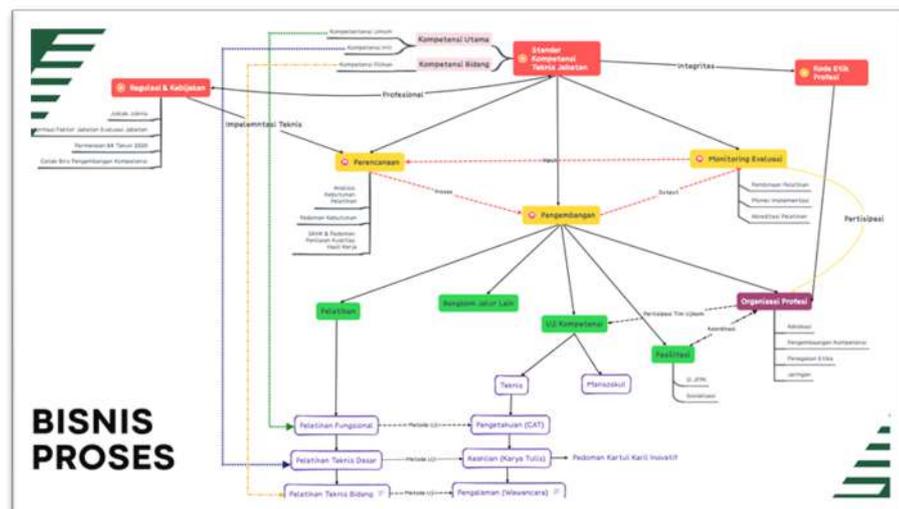
Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2022, salah satu tugas Unit Pembina JF Penata Kehakiman adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF Penata Kehakiman berdasarkan tugas tersebut Unit Pembina JF Penata Kehakiman melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan tugas JF Penata Kehakiman dan persiapan pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dalam bentuk kegiatan sarasehan Fungsional Penata Kehakiman pada tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024. Peserta dalam kegiatan ini yaitu 27 (dua puluh tujuh) perwakilan Fungsional Penata Kehakiman (berdasarkan proporsi jumlah JF Penata Kehakiman pada masing-masing Biro Teknis).



Gambar 3.52

Foto bersama pelaksanaan sarasehan evaluasi terhadap implementasi penerapan tugas JF Penata Kehakiman di Ibis Hotel Cikini, Jakarta

Kegiatan sarasehan ini juga dilakukan diskusi terkait arah kebijakan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman yang didalamnya juga terdapat pemaparan mengenai bisnis proses yang telah diperbaharui oleh Unit Pembina JF Penata Kehakiman.



Gambar 3.53

Bisnis proses JF Penata Kehakiman

Agenda lain yang dilakukan dalam acara sarasehan ini yaitu menginventarisir daftar isian masalah dari JF Penata Kehakiman yang juga didiskusikan untuk dibuat rekomendasi solusi dari permasalahan yang selama ini terjadi di tataran teknis oleh JF Penata Kehakiman dalam melakukan tugas fungsinya. Daftar isian masalah yang terinventarisir telah diberikan kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

Sebagai persiapan dalam pembentukan organisasi profesi pada kegiatan sarasehan yang dilaksanakan telah terpilih ketua pokja dan presidium kongres yang nantinya akan memimpin jalannya sidang sekaligus sebagai tim yang harus membentuk organisasi profesi JF Penata Kehakiman pada tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 2020.



Gambar 3.54  
Ketua Pokja dan Presidium Kongres terpilih pada Organisasi Profesi JF  
Penata Kehakiman

## **6. Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung**

### **a. Layanan Keterbukaan Informasi Publik**

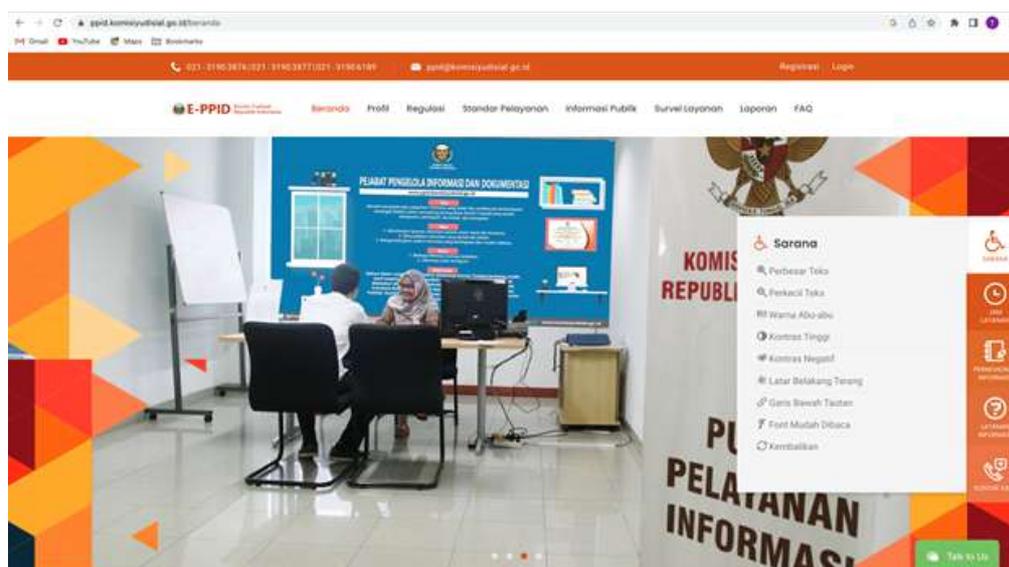
Sasaran kegiatan keempat dari Palinfo adalah meningkatnya efektivitas komunikasi publik melalui media maupun langsung. Salah satu target indikator kinerja yang harus dicapai Palinfo dalam sasaran kegiatan ini adalah predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di tahun 2024. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*) dan membangun legitimasi serta memperkuat kepercayaan publik.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Yudisial mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam keterbukaan informasi publik terdapat elemen penting untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka yaitu hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Komisi Yudisial kemudian membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. Sebagai dasar hukum, maka ditetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Publik. PPID Komisi Yudisial bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Visi PPID Komisi Yudisial yaitu terwujudnya pelayanan informasi yang dilakukan secara terbuka, profesional, cepat, dan tepat waktu untuk

mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten. Dalam memberikan pelayanan informasi publik, masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan datang langsung ke Komisi Yudisial ataupun daring melalui situs [www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id), yang ramah pengguna.



Gambar 3.55  
Ruang Pelayanan Informasi Publik Komisi Yudisial

Salah satu kewajiban badan publik adalah menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik, namun tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Daftar Informasi Publik tersebut harus dikelola dan dimuktakhirkan secara berkala.

Berikut tautan Daftar Informasi Publik Tahun 2024:  
[https://ppid.komisiyudisial.go.id/download\\_file?path=informasi publik/uCv0gJcCaJvW0xlxiq4LREjnixMew9JU6r4Sq3ux.pdf&name=Daftar%20Informasi%20Publik.pdf](https://ppid.komisiyudisial.go.id/download_file?path=informasi publik/uCv0gJcCaJvW0xlxiq4LREjnixMew9JU6r4Sq3ux.pdf&name=Daftar%20Informasi%20Publik.pdf)

Pemutakhiran konten informasi publik dilaksanakan di website Komisi Yudisial ([www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)) dan website PPID Komisi Yudisial ([www.ppid.komisiyudisial.go.id](http://www.ppid.komisiyudisial.go.id)). Informasi tersebut terkait informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Komisi Yudisial, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi berkaitan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, laporan keuangan Komisi Yudisial, rencana kerja dan anggaran, DIPA, laporan kinerja Komisi Yudisial, informasi pengadaan, dan peraturan.

Selain melalui website, informasi juga disajikan melalui media sosial Komisi Yudisial seperti facebook (@komisiyudisialri), X (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri). Informasi yang dimutakhirkan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Tabel 3.9  
Rekapitulasi Laporan Pelayanan Informasi PPID KYRI  
Januari s.d Desember 2024

BULAN	PERMOHONAN INFORMASI	DIKABULKAN SEBAGIAN	DIKABULKAN SELURUHNYA	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	WAKTU PENYELESAIAN	
JANUARI	0	0	0	0	0	0	
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	
MARET	0	0	0	0	0	0	
APRIL	0	0	0	0	0	0	
MEI	1	0	1	0	0	3 hari	
JUNI	0	0	0	0	0	0	
JULI	1	1	0	0	Sebagian Bukan kewenangan KY	5 hari	
AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	
OKTOBER	0	0	0	0	0	0	
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	
DESEMBER	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2						

Untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. Penilaian Uji Publik dilakukan terhadap:

1. Aspek Kualitas Informasi
2. Aspek Jenis Informasi
3. Aspek Sarana Prasana
4. Aspek Komitmen Organisasi
5. Aspek Digitalisasi
6. Aspek Inovasi dan Strategi

Berdasarkan nilai verifikasi kuesioner dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024, Komisi Yudisial memperoleh nilai 100. Komisi Yudisial berhasil mempertahankan predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 95,72. Nilai ini melesat naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 91,69.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum. KY menjadi salah satu lembaga negara yang menduduki peringkat sepuluh besar pada kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian. Komisi Yudisial bekerja profesional dengan menyajikan informasi transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga menjadi lembaga kredibel dalam mewujudkan hakim yang mandiri dan berintegritas dengan menjaga dan menegakkan etika hakim.



Gambar 3.56  
Dokumentasi penerimaan penghargaan Komisi Informasi Publik kategori "informatif" Tahun 2024



Gambar 3.57  
Piagam penghargaan kepada Komisi Yudisial sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif tahun 2024

## **b. Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring**

Untuk sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung, Palinfo memiliki indikator kinerja kedua yang harus dipenuhi, yaitu kategori publisitas positif KY melalui pengelolaan media massa. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan siaran pers, penyelenggaraan konferensi pers, media gathering, dan media monitoring.

Untuk mengetahui sejauh mana hasil publikasi KY, maka perlu dilakukan media monitoring baik untuk media massa cetak dan daring, ataupun media sosial melalui *insight social media*. Media monitoring adalah kegiatan pengumpulan data dari berbagai saluran media untuk dianalisis dan diidentifikasi. Proses ini meliputi membaca, menonton, mencatat sampai mendengarkan sebuah konten editorial yang merupakan sumber media. Proses pemantauan akan menghasilkan suatu informasi tentang reputasi KY di mata media cetak dan daring termasuk media sosial. Monitoring media ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga dalam membuat dan menentukan sebuah kebijakan yang tepat.

Sebelum mengetahui sejauh mana hasil publikasi yang diterima, Palinfo perlu melakukan pengelolaan media massa dan media sosial. Palinfo menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin media. Pada tahun 2024, Palinfo membina hubungan dengan 34 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Meningkatnya dukungan media ini dikarenakan banyak perkara-perkara yang menarik perhatian publik sehingga salah satu upaya mendiseminasi tugas Komisi Yudisial adalah melalui media massa.

Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri, Facebook @KomisiYudisial, X @KomisiYudisial, dan YouTube @KomisiYudisial.

## 1) Pengelolaan Media Massa

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk media massa. Pengelolaan media massa merupakan kegiatan rutin Palinfo yang dilakukan terutama oleh pranata humas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan informasi kepada wartawan seperti memenuhi kebutuhan data terkait capaian kinerja KY, memenuhi permohonan wawancara dalam hal ini melalui Juru Bicara KY, pelaksanaan konferensi pers, penyebaran siaran pers, media briefing terkait isu tertentu, media gathering untuk meningkatkan sinergi antara KY dan media massa, dan evaluasi pengelolaan media massa melalui diskusi dengan perwakilan media massa.

Di tahun 2024, ada 50 siaran pers yang diproduksi dan didiseminasi kepada publik, terutama terkait respons atau pernyataan kelembagaan. Selain menghasilkan siaran pers juga dibuat video *statement* yang diunggah di Youtube Komisi Yudisial.

Tabel 3.10  
Rekapitulasi Kegiatan Pengelolaan Media Massa Tahun 2024

No	Tanggal	Judul	Keterangan
1	16 Januari 2024	Nomor: 01/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024 tentang KY Siap Pantau Persidangan Perkara Pemilu dan Pilkada 2024  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/309/ky-siap-pantau-persidangan-perkara-pemilu-dan-pilkada">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/309/ky-siap-pantau-persidangan-perkara-pemilu-dan-pilkada</a>	Hanya penyebaran siaran pers

2	17 Januari 2024	<p>Nomor: 02/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024 tentang Dukung Kelancaran Pemilu, KY Gelar Deklarasi Pengawasan Persidangan Pemilu</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/310/dukung-kelancaran-pemilu-ky-gelar-deklarasi-pengawasan-persidangan-pemilu">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/310/dukung-kelancaran-pemilu-ky-gelar-deklarasi-pengawasan-persidangan-pemilu</a></p>	Konferensi pers digelar setelah pelaksanaan deklarasi.
3	24 Januari 2024	<p>Nomor: 03/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024 tentang Kembali Jalani MKH Karena Selingkuh, Hakim IS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/311/kembali-jalani-mkh-karena-selingkuh-hakim-is-diberhentikan-tidak-dengan-hormat">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/311/kembali-jalani-mkh-karena-selingkuh-hakim-is-diberhentikan-tidak-dengan-hormat</a></p>	Hanya penyebaran siaran pers
4	30 Januari 2024	<p>Nomor: 04/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/1/2024 tentang KY Buka Pendaftaran 10 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/312/ky-buka">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/312/ky-buka</a></p>	Diadakan konferensi pers dengan narasumber Anggota KY M. Taufiq HZ dan Mukti Fajar Nur Dewata

		<u>pendaftaran-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham</u>	
5	1 Februari 2024	Nomor: 05/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang KY Sosialisasikan Penjaringan Calon Hakim Agung  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/313/ky-sosialisasikan-penjaringan-calon-hakim-agung">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/313/ky-sosialisasikan-penjaringan-calon-hakim-agung</a>	Hanya penyebaran siaran pers
6	6 Februari 2024	Nomor: 06/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang Buka Seleksi, KY Harap Kebutuhan Hakim ad hoc HAM di MA Segera Terpenuhi  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/314/buka-seleksi-ky-harap-kebutuhan-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-segera-terpenuhi">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/314/buka-seleksi-ky-harap-kebutuhan-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-segera-terpenuhi</a>	
7	16 Februari 2024	Nomor: 07/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang H-7 Pendaftaran Seleksi CHA dan Calon Hakim Ad Hoc HAM di MA Ditutup, KY Ingatkan Pendaftar Segera Lengkapi Data  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend">https://komisiyudisial.go.id/frontend</a>	Hanya penyebaran siaran pers

		<a href="#">nd/pers_release_detail/315/h- pendaftaran-seleksi-cha-dan- calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma- ditutup-ky-ingatkan-pendaftar- segera-lengkapi-data</a>	
8	17 Februari 2024	Nomor: 08/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang Terbukti Langgar KEPPH, Hakim Terlapor V Disanksi Pemberhentian dengan Hormat  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/316/terbukti-langgar-kepph-hakim-terlapor-v-disanksi-pemberhentian-dengan-horma">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/316/terbukti-langgar-kepph-hakim-terlapor-v-disanksi-pemberhentian-dengan-horma</a>	Hanya penyebaran siaran pers
9	22 Februari 2024	Nomor: 9/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang KY Perpanjang Pendaftaran Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/317/ky-perpanjang-pendaftaran-seleksi-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/317/ky-perpanjang-pendaftaran-seleksi-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma</a>	Hanya penyebaran siaran pers
10	22 Februari 2024	Nomor: 10/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/2/2024 tentang	Diadakan konferensi pers dengan

		133 Calon Hakim Agung dan 20 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Administrasi  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/318/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-lolos-seleksi-administrasi">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/318/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-lolos-seleksi-administrasi</a>	narasumber Anggota KY M. Taufiq HZ dan Mukti Fajar Nur Dewata
11	7 Maret 2024	Nomor: 11/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/3/2024 Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Masuki Seleksi Kualitas  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/319/seleksi-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-masuki-seleksi-kualitas">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/319/seleksi-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-masuki-seleksi-kualitas</a>	Hanya penyebaran siaran pers
12	15 Maret 2024	Nomor: 12/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/3/2024 KY Pantau Kasus Sidang Tindak Pidana Pemilu PPLN Kuala Lumpur di PN Jakpus <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/320/ky-pantau-kasus-sidang-tindak-pidana-pemilu-ppln-kuala-lumpur-di-pn-jakpus">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/320/ky-pantau-kasus-sidang-tindak-pidana-pemilu-ppln-kuala-lumpur-di-pn-jakpus</a>	Hanya penyebaran siaran pers
13	21 Maret 2024	Nomor: 13/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/3/2024 KY	Hanya penyebaran

		<p>Pantau Kasus Sidang Pemalsuan Dokumen Tanah Mabes TNI Jatikarya di PN Bekasi</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/321/ky-pantau-kasus-sidang-pemalsuan-dokumen-tanah-mabes-tni-jatikarya-di-pn-bekasi">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/321/ky-pantau-kasus-sidang-pemalsuan-dokumen-tanah-mabes-tni-jatikarya-di-pn-bekasi</a></p>	siaran pers
14	2 April 2024	<p>Nomor: 14/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/4/2024</p> <p>Ketua KY Sampaikan Capaian dan Prestasi Sepanjang 2023</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/322/ketua-ky-sampaikan-capaian-dan-prestasi-sepanjang">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/322/ketua-ky-sampaikan-capaian-dan-prestasi-sepanjang</a></p>	Mengundang media dalam Laptah KY Tahun 2023
15	3 April 2024	<p>Nomor: 15/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/4/2024</p> <p>37 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Lolos Seleksi Kualitas</p> <p><a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/323/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-lolos-seleksi-kualitas">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/323/calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-lolos-seleksi-kualitas</a></p>	Diadakan konferensi pers dengan narasumber Anggota KY M. Taufiq HZ dan Mukti Fajar Nur Dewata
16	22 April 2024	<p>Nomor: 16/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/4/2024</p> <p>Calon Hakim Agung dan ad hoc HAM di MA Jalani Seleksi Kesehatan-Kepribadian</p>	Hanya penyebaran siaran pers

		<a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/324/calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-jalani-seleksi-kesehatankepribadian">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/324/calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-jalani-seleksi-kesehatankepribadian</a>	
17	24 April 2024	Nomor: 17/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2024 Ajak Publik Lakukan Pemantauan, KY Gelar ToT Pemantauan PBH <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/325/ajak-publik-lakukan-pemantauan-ky-gelar-tot-pemantauan-pbh">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/325/ajak-publik-lakukan-pemantauan-ky-gelar-tot-pemantauan-pbh</a>	Hanya penyebaran siaran pers
18	30 April 2024	Nomor: 18/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2024 Terbukti Berselingkuh, Hakim A Diberhentikan dengan Hak Pensiun <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/326/terbukti-berselingkuh-hakim-a-diberhentikan-dengan-hak-pensiun">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/326/terbukti-berselingkuh-hakim-a-diberhentikan-dengan-hak-pensiun</a>	Hanya penyebaran siaran pers
19	16 Mei 2024	Nomor: 19/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/04/2024 Ungkap Kendala Pemantauan PBH, KY Ajak Masyarakat Berkolaborasi <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/327/ungkap-kendala-pemantauan-pbh">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/327/ungkap-kendala-pemantauan-pbh</a>	Mengundan g media dan penyebaran siaran pers

		ky-ajak-masyarakat-berkolaborasi	
20	20 Mei 2024	Nomor: 20/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/5/2024 KY Terus Bekali Calon Pemantau Soal Mekanisme Pemantauan Mandiri Sidang Pemilu dan Pilkada 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/328/ky-terus-bekali-calon-pemantau-soal-mekanisme-pemantauan-mandiri-sidang-pemilu-dan-pilkada">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/328/ky-terus-bekali-calon-pemantau-soal-mekanisme-pemantauan-mandiri-sidang-pemilu-dan-pilkada</a>	Penyebaran siaran pers
21	20 Mei 2024	Nomor: 21/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/5/2024 Januari–April 2024, KY Terima 267 Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/329/januariapril-ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/329/januariapril-ky-terima-laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim</a>	Konferensi pers dan penyebaran siaran pers
22	20 Mei 2024	Nomor: 22/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/5/2024 KY Usulkan 33 Hakim Dijatuhi Sanksi <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/330/ky-usulkan-hakim-dijatuhi-sanksi">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/330/ky-usulkan-hakim-dijatuhi-sanksi</a>	Konferensi pers dan penyebaran siaran pers

23	20 Mei 2024	Nomor: 23/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/5/2024 Januari–April 2024, KY Terima 314 Permohonan Pemantauan dan Inisiatif KY <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/331/januariapril-ky-terima-permohonan-pemantauan-dan-inisiatif-ky">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/331/januariapril-ky-terima-permohonan-pemantauan-dan-inisiatif-ky</a>	Konferensi pers dan penyebaran siaran pers
24	2 Juli 2024	Nomor: 24/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/6/2024 KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 ad hoc HAM di MA Menuju Wawancara <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/332/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-menuju-wawancara">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/332/ky-loloskan-calon-hakim-agung-dan-ad-hoc-ham-di-ma-menuju-wawancara</a>	Konferensi pers dan penyebaran siaran pers
25	4 Juli 2024	Nomor: 25/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2024 Respons terkait Kasus-Kasus Menarik Perhatian Publik yang Dilaporkan ke KY <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/333/respons-terkait-kasuskasus-menarik-perhatian-publik-yang-dilaporkan-ke-ky">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/333/respons-terkait-kasuskasus-menarik-perhatian-publik-yang-dilaporkan-ke-ky</a>	Konferensi pers dan penyebaran siaran pers
26	8 Juli 2024	Nomor: 26/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/2024 KY Mulai Wawancara 19 Calon	Penyebaran siaran pers

		Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/334/ky-mulai-wawancara-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-tahun">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/334/ky-mulai-wawancara-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-tahun</a>	
27	2 Juli 2024	Nomor: 27/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/07/20241 KY Usulkan 9 Calon Hakim Agung dan 3 Calon Hakim ad hoc HAM di MA ke DPR <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/335/ky-usulkan-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-ke-dpr">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/335/ky-usulkan-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-ke-dpr</a>	Penyebaran siaran pers
28	7 Agustus 2024	Nomor: 28/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Telah Menjadwalkan Periksa Pelapor Kasus PN Surabaya <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/336/ky-telah-menjadwalkan-periksa-pelapor-kasus-pn-surabaya">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/336/ky-telah-menjadwalkan-periksa-pelapor-kasus-pn-surabaya</a>	Penyebaran siaran pers
29	9 Agustus 2024	Nomor: 29/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 Gelar Pelatihan Tematik PBH, KY Harap Hakim Terapkan Kesetaraan Gender dalam Mengadili Perkara PBH	Mengundang peliputan media dan penyebaran siaran pers

		<a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/337/gelar-pelatihan-tematik-pbh-ky-harap-hakim-terapkan-kesetaraan-gender-dalam-mengadili-perkara-pbh">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/337/gelar-pelatihan-tematik-pbh-ky-harap-hakim-terapkan-kesetaraan-gender-dalam-mengadili-perkara-pbh</a>	
30	16 Agustus 2024	Nomor: 30/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 Presiden Jokowi Apresiasi Upaya KY Wujudkan Hakim Berintegritas dan Berkualitas  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/338/presiden-jokowi-apresiasi-upaya-ky-wujudkan-hakim-berintegritas-dan-berkualitas">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/338/presiden-jokowi-apresiasi-upaya-ky-wujudkan-hakim-berintegritas-dan-berkualitas</a>	penyebaran siaran pers
31	19 Agustus 2024	Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Benarkan Telah Periksa Majelis Hakim PN Surabaya untuk Dalami Dugaan Pelanggaran Etik  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/339/ky-benarkan-telah-periksa-majelis-hakim-pn-surabaya-untuk-dalami-dugaan-pelanggaran-etik">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/339/ky-benarkan-telah-periksa-majelis-hakim-pn-surabaya-untuk-dalami-dugaan-pelanggaran-etik</a>	Penyebaran siaran pers
32	23 Agustus 2024	Nomor: 32/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Minta Media Massa Kawal Penegakan Integritas Hakim	Media gathering dan penyebaran

		<a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/340/ky-minta-media-massa-kawal-penegakan-integritas-hakim">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/340/ky-minta-media-massa-kawal-penegakan-integritas-hakim</a>	siaran pers
33	26 Agustus 2024	Nomor: 33/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 KY Rekomendasikan Majelis Hakim PN Surabaya Disanksi Pemberhentian dengan Hormat <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/341/ky-rekomendasikan-majelis-hakim-pn-surabaya-disanksi-pemberhentian-dengan-hormat">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/341/ky-rekomendasikan-majelis-hakim-pn-surabaya-disanksi-pemberhentian-dengan-hormat</a>	Penyebaran siaran pers
34	29 Agustus 2024	Nomor: 34/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/08/2024 Respons KY terkait Penolakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA Tahun 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/342/respons-ky-terkait-penolakan-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-tahun">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/342/respons-ky-terkait-penolakan-calon-hakim-agung-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma-tahun</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
35	3 September 2024	Nomor: 35/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Perlu Antisipasi Kerawanan Keamanan Pengadilan Pilkada 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/343/pemerintah-dan-penyelenggara-">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/343/pemerintah-dan-penyelenggara-</a>	Penyebaran siaran pers

		pemilu-perlu-antisipasi-kerawanan-keamanan-pengadilan-pilkada	
36	4 September 2024	Nomor: 36/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 Mangkir Kerja 70 Hari, Hakim AGRG Diberhentikan sebagai Hakim <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/344/mangkir-kerja-hari-hakim-agrg-diberhentikan-sebagai-hakim">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/344/mangkir-kerja-hari-hakim-agrg-diberhentikan-sebagai-hakim</a>	Penyebaran siaran pers
37	6 September 2024	Nomor: 37/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 KY Berikan Klarifikasi Resmi Kepada DPR Terkait Penolakan CHA dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/345/ky-berikan-klarifikasi-resmi-kepada-dpr-terkait-penolakan-cha-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/345/ky-berikan-klarifikasi-resmi-kepada-dpr-terkait-penolakan-cha-dan-calon-hakim-ad-hoc-ham-di-ma</a>	Penyebaran siaran pers
38	10 September 2024	Nomor: 38/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 Respons KY terhadap Vonis PN Pangkal Pinang terhadap Terdakwa TT  <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/346/respons-ky-terhadap-vonis-pn">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/346/respons-ky-terhadap-vonis-pn-</a>	Video statement, penyebaran siaran pers

		pangkal-pinang-terhadap-terdakwa-tt	
39	30 September 2024	Nomor: 39/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 KY Mendukung Upaya Para Hakim Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/347/ky-mendukung-upaya-para-hakim-memperoleh-peningkatan-kesejahteraan">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/347/ky-mendukung-upaya-para-hakim-memperoleh-peningkatan-kesejahteraan</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
40	30 September 2024	Nomor: 40/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/09/2024 Respons KY terkait Kasus PK MM <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/348/respons-ky-terkait-kasus-pk-mm">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/348/respons-ky-terkait-kasus-pk-mm</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
41	16 Oktober 2024	Nomor: 41/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024 KY Ucapkan Selamat Atas Terpilihnya Prof. Sunarto sebagai Ketua MA Periode 2024-2029 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/349/ky-ucapkan-selamat-atas-terpilihnya-prof-sunarto-sebagai-ketua-ma-periode">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/349/ky-ucapkan-selamat-atas-terpilihnya-prof-sunarto-sebagai-ketua-ma-periode</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
42	22 Oktober	Nomor: 42/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024	Video statement,

	2024	KY Apresiasi Pemerintah dan MA atas Terbitnya PP No. 44 Tahun 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/350/ky-apresiasi-pemerintah-dan-ma-atas-terbitnya-pp-no-tahun">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/350/ky-apresiasi-pemerintah-dan-ma-atas-terbitnya-pp-no-tahun</a>	penyebaran siaran pers
43	23 Oktober 2024	Nomor: 43/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024 KY Dukung Langkah Tegas Kejaksaan Agung Lakukan Penegakan Hukum OTT Hakim PN Surabaya <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/351/ky-dukung-langkah-tegas-kejaksaan-agung-lakukan-penegakan-hukum-ott-hakim-pn-surabaya">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/351/ky-dukung-langkah-tegas-kejaksaan-agung-lakukan-penegakan-hukum-ott-hakim-pn-surabaya</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
44	26 Oktober 2024	Nomor: 44/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2024 Penetapan Tersangka ZR: KY Siap Koordinasi dengan Kejaksaan dan MA untuk Pendalaman Kasus <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/352/penetapan-tersangka-zr-ky-siap-koordinasi-dengan-kejaksaan-dan-ma-untuk-pendalaman-kasus">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/352/penetapan-tersangka-zr-ky-siap-koordinasi-dengan-kejaksaan-dan-ma-untuk-pendalaman-kasus</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
45	6	Nomor: 45/SIARAN	Mengundan

	November 2024	PERS/AL/LI.04.05/11/2024 KY Pantau 74 Sidang Tindak Pidana Pemilu <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/353/ky-pantau-sidang-tindak-pidana-pemilu">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/353/ky-pantau-sidang-tindak-pidana-pemilu</a>	g media dan penyebaran siaran pers
46	13 November 2024	Nomor: 46/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024 KY Prioritaskan Usut Majelis Kasasi Terdakwa GRT <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/354/ky-prioritaskan-usut-majelis-kasasi-terdakwa-grt">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/354/ky-prioritaskan-usut-majelis-kasasi-terdakwa-grt</a>	Video statement, penyebaran siaran pers
47	14 November 2024 14 November 2024	Nomor: 47/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2 Penuhi Akses Informasi Publik, KY Ikuti Uji Publik <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/355/penuhi-akses-informasi-publik-ky-ikuti-uji-publik">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/355/penuhi-akses-informasi-publik-ky-ikuti-uji-publik</a>	Penyebaran siaran pers
48	25 November 2024	Nomor: 48/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/11/2024 Respons KY terhadap Putusan Etik Tim MA bahwa Tidak Ditemukan Pelanggaran KEPPH Majelis Kasasi GRT <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/356/respons-ky-terhadap-putusan-etik-">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/356/respons-ky-terhadap-putusan-etik-</a>	Video statement, penyebaran siaran pers

		tim-ma-bahwa-tidak-ditemukan-pelanggaran-kep-ph-majelis-kasasi-grt	
49	27 Desember 2024	Nomor: 49/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2024 KY Pertahankan Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/357/ky-pertahankan-predikat-badan-publik-informatif-dalam-anugerah-keterbukaan-informasi-publik">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/357/ky-pertahankan-predikat-badan-publik-informatif-dalam-anugerah-keterbukaan-informasi-publik</a>	Penyebaran siaran pers
50	27 Desember 2024	Nomor: 50/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/12/2024 Respons KY terhadap Vonis Korupsi 300T Terdakwa HM <a href="https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/358/respons-ky-terhadap-vonis-korupsi-t-terdakwa-hm">https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/358/respons-ky-terhadap-vonis-korupsi-t-terdakwa-hm</a>	Penyebaran siaran pers

Pada tahun 2024, KY melaksanakan media gathering atau konsolidasi dengan perwakilan media massa bertema “Refleksi Penegakan Integritas Hakim untuk Peradilan Bersih” pada Jumat s.d Minggu, 23 s.d 25 Agustus 2024.

Relasi Komisi Yudisial dan media massa ini sangat penting sebagai corong dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus

dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing.

Acara ini diikuti media massa nasional dan lokal dari wilayah Purwokerto.

- *Media Briefing*: “Refleksi Penegakan Integritas Hakim untuk Peradilan Bersih”

1. Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H. M.Hum (Anggota Komisi Yudisial RI sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial RI)

Tema : Kiprah Komisi Yudisial dalam Penegakan Integritas Hakim

2. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Akademisi Fakultas Hukum UGM)

Tema : Refleksi Kritis Publik terkait Eksistensi Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

3. Fasilitator : Festy Rahma Hidayati, S.Sos., M.Si (Pranata Humas Ahli Muda)

- *Media Discussion* : Fenomena “No Viral, No Justice”

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)

Tema : Fenomena “No Viral, No Justice” dan Dampak Hukumnya

2. Eko Riyadi, S.H., M.H. (Direktur PUSHAM UII)

Tema : Kolaborasi Masyarakat Sipil dan Media dalam Mengawal Penegakan Integritas Hakim

3. Fasilitator : Dinal Fedrian. S.IP., M.A (Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi)

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers\\_release\\_detail/340/k-y-minta-media-massa-kawal-penegakan-integritas-hakim](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/340/k-y-minta-media-massa-kawal-penegakan-integritas-hakim),

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15709/media-massa-andil-menjaga-independensi-ky](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15709/media-massa-andil-menjaga-independensi-ky), dan

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15710/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum)



Gambar 3.58  
Diskusi media dalam rangkaian acara Media Gathering KY



Gambar 3.58  
Jeep tour Media Gathering KY yang diikuti Puluhan Media Massa

Selain melakukan kegiatan-kegiatan di atas, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, khususnya pranata humas juga melakukan *brainstorming* media untuk memperoleh masukan pengembangan

komunikasi publik di Komisi Yudisial dan menyusun masukan respons jawaban atas pertanyaan media massa kepada juru bicara.

## **2) Pengelolaan Media Sosial**

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2024, tercatat ada 129.807 pengikut Instagram, 26.926 pengikut Facebook, dan 72.400 pengikut X. Adapun rincian mengenai penambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2024 yaitu +5.707 Instagram, Facebook +814 dan - 905 untuk X.

Apabila dibandingkan antara data jumlah pengikut media sosial KY pada tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan adanya kenaikan jumlah pengikut di media sosial Instagram dan Facebook. Namun, untuk X terjadi penurunan. Hal ini merupakan suatu kendala bagi tim humas KY. Penurunan performa pada platform media sosial X bisa disebabkan oleh pengguna X berpindah menjadi pengguna platform Threads dan kemungkinan lain seperti perlu pemetaan konten pilar menjadi konten turunan (penguasaan isu) yang lebih maksimal dan tepat sasaran.

Tabel 311  
Konten Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2024

Bulan	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari	Etika Hakim	30
Februari	Pemilu	29
Maret	Advokasi Hakim	31
April	Kesetaraan Gender dalam Hukum dan Peradilan	30
Mei	Badan Peradilan	31
Juni	Peradilan Inklusif	30
Juli	Komisi Yudisial	31
Agustus	Kemerdekaan Indonesia	31
September	Pengawasan hakim	30
Oktober	Trivia Hukum	31
November	Trivia Hukum	30
Desember	Kaleidoskop KY 2024	31

Tabel 3.12  
Rekapitulasi *Engagement* Media Sosial Komisi Yudisial Tahun 2024

Bulan	Facebook		X		Instagram	
	<i>Reach</i>	Interaksi	<i>Tayangan</i>	<i>Kunjungan Profil</i>	<i>Reach</i>	<i>Interaksi</i>
Januari	6.400	3.700	4.300	4.338	233.120	11.575
Februari	5.002	2.800	5.144	5.466	148.910	6.703
Meret	5.847	3.168	3.266	4.000	159.048	9.256
April	6.455	3.273	5.377	6.100	145.213	9.249
Mei	7.678	3.420	3.772	3.011	119.000	6.517
Juni	8.576	1.940	3.111	2.973	132.061	7.992
Juli	3.578	1.870	3.218	2.140	165.280	7.594

Agustus	4.340	2.447	4.003	3.711	251.474	9.521
September	3.450	2.008	3.817	2.890	362.779	7.034
Oktober	4.531	2.830	3.111	2.502	277.796	10.965
November	8.950	1.008	2.950	2.111	209.420	8.180
Desember	6.110	1.235	3.005	2.890	183.854	5.375

Adapun strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah merumuskan kembali konten pilar dan memperkaya topik konten media sosial. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi pengelola media sosial KY dari K/L lain yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan media sosial. Selain itu, pengelola media sosial KY juga perlu menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan media sosial serta keahlian teknis lain baik grafis ataupun videografi guna mengoptimalkan pembuatan konten. Dengan begitu, hambatan mengenai pemahaman pengelolaan media sosial yang belum lengkap dapat diatasi sehingga kinerja pengelolaan media sosial dapat menjadi lebih efektif dan proporsional.

### 3) Pengelolaan Situs Web Komisi Yudisial

Sebagai etalase lembaga, maka situs web KY perlu dikelola secara profesional. Konten utama situs KY adalah berita tentang kegiatan Pimpinan, Anggota KY dan Sekretariat Jenderal KY. Jumlah total berita di situs web KY pada tahun 2024 adalah 247 berita. Situs web KY, <https://www.komisiyudisial.go.id>, dirancang dengan responsive web design (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan.

Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia-Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web

mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersih sesuai dengan filosofi KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store.

Dengan mengunduh KY Mobile, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, KY Mobile juga menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakterisasi putusan, maupun produk hukum KY.

#### **4) Monitoring Media**

Sepanjang 2024, Palinfo melakukan pemantauan terhadap 1.844 pemberitaan yang terdiri dari 248 berita dari [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) dan 1.596 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah [tribunnews.com](http://tribunnews.com) (94 berita). [Antarnews.com](http://antaranews.com) (93 berita), dan [kompas.com](http://kompas.com) (76 berita). Aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Komisioner sekaligus juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dengan 550 berita. Sementara terbanyak kedua yaitu Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai dengan total 156 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim, kelembagaan KY, dan seleksi calon hakim agung menjadi yang dominan.

Tabel 3.13

Daftar Topik Pemberitaan tentang KY Tahun 2023

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	61
2	Kelembagaan KY	372
3	Pemantauan Persidangan	187
4	Pengawasan Hakim	907
5	Peningkatan Kapasitas Hakim	12
6	Peradilan	20
7	Majelis Kehormatan Hakim	28
8	Seleksi Calon Hakim Agung	257

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 29 berita dengan tones negatif, 1.844 berita dengan tones netral, dan 2 berita dengan tones positif. Pemberitaan dengan tones netral didominasi oleh pengumuman kegiatan seperti pembukaan seleksi calon hakim agung, pengumuman lain yang dirilis oleh KY serta kegiatan kelembagaan internal KY sendiri. Berdasarkan total tones yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2024 ini dominan berada pada cakupan tones netral hingga positif. Merujuk kepada hasil pemantauan pemberitaan ini, dapat dikatakan bahwa kategori publisitas positif untuk pemberitaan tentang KY telah tercapai atau 100% sesuai target.

##### 5) Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik

Layanan penerjemahan bahan diseminasi publik merupakan elemen strategis dalam memperkuat komunikasi Komisi Yudisial (KY) dengan publik nasional maupun internasional. Berlandaskan Pasal 64 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, fungsi penerjemahan yang diemban oleh Bidang Data dan Layanan Informasi bertujuan untuk memastikan tersampainya

informasi secara akurat, profesional, dan relevan secara lintas bahasa serta budaya. Bidang Data dan Layanan Informasi memiliki fungsi layanan informasi dengan salah satu cakupan yaitu bertanggung jawab atas layanan penerjemahan, baik tulis maupun lisan, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

Sebagai jembatan diseminasi informasi secara akurat, profesional, dan sesuai konteks serta segmentasi audien yang dituju, layanan penerjemahan dirancang untuk mendukung tujuan strategis KY dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan komunikasi dan layanan informasi kepada publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

### **Capaian Output**

Kegiatan penerjemahan bahan diseminasi publik yang dilakukan pada tahun 2024 meliputi beragam output, seperti artikel berita, naskah siaran pers, dokumen kelembagaan, hingga glosarium terminologi yang menjadi rujukan standar dalam komunikasi KY dengan rincian sebagai berikut:

#### **1. Penerjemahan Artikel Berita**

Total 247 artikel berita web KY telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bulan Januari hingga Desember 2024, dengan rincian: Januari (23), Februari (31), April (17), Mei (14), Juni (7), Juli (38), Agustus (32), September (37), Oktober (34), November (8), Desember (6).

#### **2. Penerjemahan Naskah Siaran Pers**

Sebanyak 61 naskah siaran pers telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan melalui web KY dari periode Januari hingga Desember 2024.

#### **3. Penyuntingan Terjemahan dan Pemutakhiran Konten Statis Web KY**

Penerjemahan dan penyuntingan konten statis website KY mencakup informasi kelembagaan, antara lain dasar hukum, visi

dan misi, sejarah pembentukan, sasaran strategis, dan sebagainya. Konten statis situs web KY tersebut telah disunting dan diperbarui terjemahannya secara berkala pada tahun 2024.



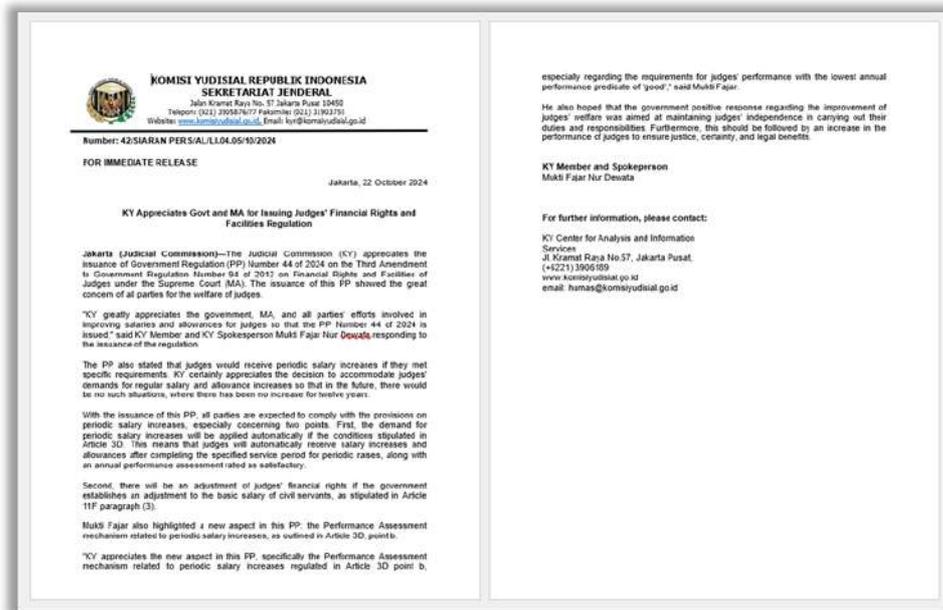
Gambar 3.59  
Tampilan artikel berita Web KY yang telah diterjemahkan.

#### 4. Penerjemahan Abstrak dan Artikel Ilmiah

Selain penerjemahan teks jurnalistik berupa berita dan siaran pers, dan konten statis website, penerjemahan teks lain seperti naskah karya ilmiah juga telah dilakukan, khususnya abstrak dan artikel Jurnal Yudisial. Pada tahun 2024, total 21 abstrak Jurnal Yudisial telah diterjemahkan dan dilakukan penyuntingan untuk 1 artikel Jurnal berbahasa Inggris.

#### 5. Penerjemahan Dokumen Kerja Kunjungan Luar Negeri

Para pejabat fungsional penerjemah Komisi Yudisial juga melakukan penerjemahan bahan-bahan kerja dan dokumen dalam rangka persiapan kunjungan kerja pimpinan KY ke Italia, Irlandia, Portugal, Selandia Baru dan Australia di tahun 2024. Untuk kegiatan ini dilakukan penerjemahan kerangka acuan kegiatan dan surat-surat dinas untuk kunjungan kerja tersebut.



Gambar 3.60.  
Terjemahan Naskah Siaran Pers KY

## 6. Penyusunan Glosarium Lembaga

Glosarium terminologi hukum disusun dan dikembangkan sebagai acuan terminologi kelembagaan KY. Glosarium disusun dan dimutakhirkan secara berkala sesuai kebutuhan lembaga.

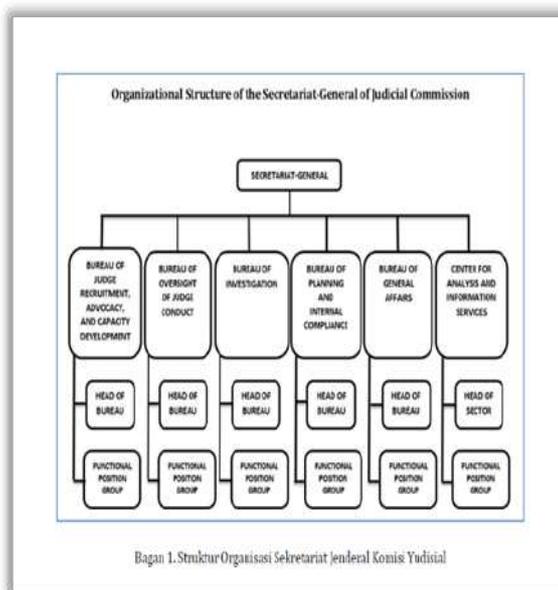
## 7. Penerjemahan Produk Hukum Kelembagaan

Pada tahun 2024, KY berhasil menyelesaikan beberapa penerjemahan teks hukum, termasuk penetapan terminologi resmi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 122 Tahun 2024 tentang Nomenklatur dan Titelatur dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Komisi Yudisial.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2024 TANGGAL 9 JULI 2024 TENTANG NOMENKLATUR DAN TITELATUR DALAM BAHASA INGGRIS DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL

No.	NOMENKLATUR		TITELATUR
	BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS	
1.	Ketua Komisi Yudisial	Judicial Commission	Chair of the Judicial Commission
2.	Wakil Ketua Komisi Yudisial	Judicial Commission	Vice Chair of the Judicial Commission
3.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Rekrutmen Hakim	Judicial Commission	Member of the Judicial Commission for Judge Recruitment
4.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi	Judicial Commission	Member of the Judicial Commission for Judge Oversight and Investigation
5.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Hakim	Judicial Commission	Member of the Judicial Commission for Judge Capacity Development and Appointment Promotion
6.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Riset, Penelitian dan Pengembangan	Judicial Commission	Member of the Judicial Commission for Human Resources, Advocacy, Legal, Research, and Development
7.	Anggota Komisi Yudisial/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	Judicial Commission	Member of the Judicial Commission for Interagency Relations and Information Services
8.	Sekretariat Jenderal	Secretariat-General of the Judicial Commission	Secretary-General of the Judicial Commission

Guidelines: \*Ditampilkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BAKI.



Gambar 3.61  
Nomenklatur dan Titelatur KY

Selain itu, layanan penerjemahan KY juga menghasilkan:

1. Draf terjemahan Undang-Undang Komisi Yudisial, yang akan diusulkan menjadi terjemahan resmi.
2. Draf terjemahan Peraturan Komisi Yudisial (PerKY): PerKY Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim, dan PerKY Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat profesionalisme KY dalam menyediakan produk/dokumen hukum berstandar internasional, mendukung transparansi, dan memperluas jejaring global.

## 8. Penerjemahan Lisan

Kegiatan penerjemahan lisan mencakup penerjemahan lisan publik/kemasyarakatan, simultan, konsekutif, dan konferensi. Penerjemahan lisan di Komisi Yudisial dilakukan untuk mendukung kegiatan dalam rapat pimpinan, seminar internasional, maupun penerimaan pelapor asing.



Gambar 3.62  
Kegiatan Consecutive interpreting dalam Rapat Pimpinan Komisi Yudisial dengan Perwakilan dari Kedutaan Selandia Baru, tanggal 15 Agustus 2024

Layanan penerjemahan bahan diseminasi publik KY sepanjang tahun 2024 telah berjalan sesuai target dan mencakup beragam jenis dokumen, mulai dari teks jurnalistik, naskah dinas, teks karya ilmiah, maupun dokumen strategis lembaga lainnya. Pelaksanaan layanan penerjemahan ini diharapkan dapat terus mendukung komunikasi publik yang efektif dan memperkuat peran KY di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk mempertahankan target ke depan, peningkatan kapasitas pejabat fungsional penerjemah melalui pendidikan dan pelatihan perlu diupayakan. Hal ini untuk memastikan peningkatan kualitas dan efektivitas layanan dapat terus terjaga.

#### **D. Meningkatnya pelaksanaan edukasi publik dalam membangun integritas hakim**

##### **a. Persentase peningkatan pemahaman peserta edukasi publik tentang Komisi Yudisial**

Indikator pertama dari sasaran kegiatan ini adalah persentase peningkatan pemahaman tentang Komisi Yudisial terhadap publik yang mengikuti edukasi sebesar 15%. Pengukuran dilakukan dengan menilai pemahaman peserta tentang KY melalui pretest dan posttest saat kegiatan edukasi publik dilakukan. Kegiatan edukasi publik bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem peradilan Indonesia dan proses hukum, memberikan pemahaman nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *akses to justice*.

Komisi Yudisial menggelar edukasi publik "Menyuarakan Peradilan Bersih Lewat Media Sosial", Jumat 6 September 2024 di Bandung, Jawa Barat. Hal ini mengingatkan keterlibatan publik di media sosial dapat memberikan pemahaman penting tentang KY sekaligus mengajak publik untuk menyuarakan peradilan bersih di media sosial. Selain di Bandung, KY juga menggelar edukasi publik dengan tema yang sama pada Jumat, 6 Desember 2024 di Yogyakarta. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pengukuran pre test dan post test dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.14  
Persentase peningkatan pemahaman peserta edukasi publik tentang Komisi Yudisial

Tempat dan Waktu	Narasumber	Jumlah peserta	Pre test	Post test	%
Bandung, Jumat, 6 September 2024	Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi: Juma'in, S.E.	60 orang	61,67	71,37	15,73

	<p>Praktisi Hukum: Miko Ginting, S.H., M.A.</p> <p>Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung: Medi Mahendra, A.P., S.Sos., M.Si.</p> <p>Fasilitator : Festy Rahma Hidayati, S.Sos, M.Si</p>				
Yogyakarta ,Jumat, 6 Desember 2024	<p>Keynote: Anggota KY Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.</p> <p>Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Juma'in, S.E.</p> <p>Akademisi: Dr. Muhammad fatahillah Akbar, S.H., L.L.M.</p> <p>Praktisi Komunikasi: Diyah Ayu Karunianingsih, S.PT., M.A</p> <p>Fasilitator : Festy Rahma Hidayati, S.Sos, M.Si</p>	75 orang	62,69	71,88	14,64

Berdasarkan tabel di atas, maka edukasi publik di Bandung yang diikuti pengikut media sosial KY berdomisili di Bandung, mahasiswa Fakultas Hukum di Bandung, serta komunitas duta baca, bahwa terdapat peningkatan pemahaman tentang KY sebesar 15,73 persen



Gambar 3.63  
KY Ajak SobatKY Bandung Suarakan Peradilan Bersih di Media Sosial



Gambar 3.64  
Edukasi publik ini dihadiri 60 orang SobatKY Bandung

Selanjutnya, edukasi publik di Yogyakarta pada Jum'at, 6 Desember 2024 yang diikuti 75 orang peserta terdiri atas Sobat KY dan mahasiswa Fakultas Hukum, serta komunitas. Terdapat peningkatan pemahaman sebesar 14,64 persen.



Gambar 3.65  
Anggota KY Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum mengajak peserta untuk mengoptimalkan fungsi media sosial untuk mendukung terwujudnya peradilan bersih



Gambar 3.66  
KY Sapa Sobat KY Yogyakarta Bahas Menyuarakan Peradilan Sosial di Media Sosial

Merujuk pada data ini, target indikator kinerja persentase peningkatan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KY tercapai sebesar 103,06%.

Selain itu, sepanjang tahun 2024, Palinfo juga mengikuti 2 kali pameran yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam acara DOLC 2024 pada tanggal 15-17 Februari 2024 bertempat di Ballroom Kuningan City serta pameran yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam acara Kampung Hukum pada tanggal 19-20 Februari 2024 bertempat di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Centre (JCC). Dalam pameran Kampung Hukum tersebut, KY meraih penghargaan sebagai stand terfavorit kedua. Selain itu, dalam rangka menyebarkan informasi tentang Komisi Yudisial juga dilakukan penerimaan kunjungan tamu atau audiensi kelembagaan. Dalam kegiatan ini pihak yang berkunjung akan diberikan materi tentang profil kelembagaan Komisi Yudisial. Rincian penerimaan kunjungan yang dilakukan Palinfo sepanjang 2024 diberikan dalam tabel di bawah.



Gambar 3.67

Komisi Yudisial (KY) ikut berpartisipasi dalam Days of Law Career (DOLC) 2024 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Kamis (15/02) hingga Sabtu (17/2) di Kuningan City Ballroom, Jakarta.



Gambar 3.68

KY ikut berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) di Cendrawasih Hall Jakarta Covention Centre (JCC), Senin (19/02/2024) hingga Selasa (20/02/2024).

Tabel 3.15

Daftar Pelaksanaan Audiensi Komisi Yudisial Tahun 2024

No	Universitas	Hari, tanggal	Jumlah Peserta	Narasumber dan Moderator
1	Mahasiswa Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies	Kamis, 11 Januari 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	41 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Dinal Fedrian
2	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang	Rabu, 17 Januari 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	85 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H

3	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung	Kamis, 18 Januari 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	60 orang	Narasumber Totok Wintarto didampingi moderator Festy Rahma H.
4	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syakhyakirti Palembang	Kamis, 25 Januari 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	100 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H
5	Siswa Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 25 Pamulang	Kamis, 22 Februari 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	106 orang	Narasumber Festy Rahma H didampingi moderator Noercholysh.
6	Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Selasa, 27 Februari 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	100 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H
7	Siswa SMPIT Islamicity Kota Tangerang	Selasa, 27 Februari 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	125 orang	Narasumber Festy Rahma H didampingi moderator Noercholysh.
8	Mahasiswa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam	Senin, 29 April 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	6 orang	Narasumber Arie Sudihar didampingi moderator Festy Rahma H .
9	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Selasa, 30 April 2024, pukul 08.00	100 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.

	Yogyakarta Wahid Pekalongan	WIB s/d selesai		
10	Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	Selasa, 7 Mei 2024, pukul 10.00 WIB s/d selesai	65 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
11	Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang	Senin, 1 Juli 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	18 orang	Narasumber Totok Wintarto didampingi moderator Noercholysh
12	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Selasa, 2 Juli 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	135 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
13	Mahasiswa Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	Kamis, 4 Juli 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	8 orang	Narasumber Joko Sasmito didampingi moderator Festy Rahma H.
14	Mahasiswa DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bandung Raya	Selasa, 16 Juli 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	50 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
15	Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM	Rabu, 17 Juli 2024, pukul 10.00 WIB s/d selesai	40 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Noercholysh
16	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas	Selasa, 30 Juli 2024, pukul 13.00	103 orang	Narasumber Imron didampingi moderator Noercholysh

	Muhammadiyah Bengkulu Metro Lampung	WIB s/d selesai		
17	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang	Selasa, 6 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	50 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
18	Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional Politeknik Negeri Jakarta	Kamis, 15 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB s/d selesai	69 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Yuni Yulianita.
19	Audiensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dwijendra	Senin, 2 September 2024, pukul 10.00 WIB s/d selesai	65 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
20	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Kamis, 5 September 2024, pukul 09.00 WIB s/d selesai	170 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
21	ACICIS (Australian Consortium For In Country Indonesian Studies)	Rabu, 11 September 2024, pukul 15.00 WIB s/d selesai	65 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Dinal Fedrian
22	Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pertiba	Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	32 orang	Narasumber Totok Wintarto didampingi moderator Noercholysh
23	Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah	Selasa, 1 Oktober 2024, pukul	23 orang	Narasumber Azizah Bajuber didampingi

	Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor	13.00 WIB s/d selesai		moderator Festy Rahma H.
24	Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Selasa, 8 Oktober 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	100 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Noercholysh
25	Mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor	Senin, 21 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB s/d selesai	36 orang	Narasumber Binziad Kadafi didampingi moderator Festy Rahma H.
26	Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 09.30 WIB s/d selesai	100 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Festy Rahma H.
27	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang	Senin, 4 November 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	210 orang	Narasumber Juma'in didampingi moderator Noercholysh
28	Mahasiswa Fakultas Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII	Senin, 25 November 2024, pukul 13.00 WIB s/d selesai	18 orang	Narasumber Arie Sudihar didampingi moderator Juma'in

### **Edukasi Publik PKY**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait dengan kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan *access to justice*. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh 20 Penghubung Komisi

Yudisial dalam bentuk tatap muka dengan publik dan penguatan jejaring dengan tema “Peran Penghubung dalam Mendukung Wewenang dan Tugas Komisi Yudisial”. Adapun Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Sosialisasi Kelembagaan
2. Menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar turut serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan peradilan bersih;
3. Mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama mempercepat proses terciptanya peradilan bersih dan berwibawa.

Kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng Jejaring Komisi Yudisial, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Adapun target peserta adalah 30 orang per daerah, sehingga total yang mengikuti kegiatan Edukasi Publik PKY ada 600 orang peserta. Berikut tabel rincian pelaksanaan Edukasi Publik PKY di tahun 2024.

Tabel 3.16  
Daftar Pelaksanaan Edukasi Penghubung Komisi Yudisial Tahun 2024

No.	Penghubung	Hari/Tanggal	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Jawa Tengah	Jumat 30 Agustus 2024	Sukoharjo	1. Direktur LBH Bantu Sesama Naufal Sebastian 2. Ketua Majelis Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah Bambang Sukoco
2	Jawa Timur	Kamis 29 Agustus 2024	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	1. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UMSIDA Rifqi Ridlo 2. Advokat Sudarto
3	Kalimantan Barat	Kamis, 5 September 2024	Rumah Adat Melayu Sambas	1. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Sambas, Misni Safari 2. Dosen Dr. H. Tamrin, S.IP., M.H s

4	Lampung	Kamis 5 September 2024	Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung.	1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Metro Zoya Haspita 2. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro
5	Maluku	Jumat 30 Agustus 2024	di Negeri Morela, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah	1. Kepala Pemerintahan Negeri Morela Fadli Sialana 2. Koordinator Penghubung KY Maluku Amirudin Latuconsina
6	Nusa Tenggara Timur	Jumat, 13 September 2024	Aula Paroki Soe TTS	1. Koordinator PKY NTT 2. Direksi LBH APIK NTT 3. Ketua Pemuda Katholik
7	Papua	Selasa 3 September 2024	Kabupaten Keerom, Papua	Koordinator Penghubung KY Papua Methodius Kossay
8	Papua Barat	Jumat, 12 September 2023	Mace Kitceng	1. Koordinator PKY Papua Barat 2. Kepala Sinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab Teluk Bentuni
9	Sulawesi Utara	Kamis, 22 Agustus 2024	Kantor Camat Amurang timur, Minahasa Selatan	1. WKPN Amurang 2. Fransiskus Talokon (Akademisi) 3. Steven Tuwondila (Jurnalis)
10	Sumatera Utara	Sabtu, 7 September 2024	Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang	1. Kepala Pusat Studi HAM UNIMED Majda El Muhtaj 2. Praktisi hukum Irfan Fadila Mawi Ketua Umum BPRPI Alfi Syahri 3.
11	Sumatera Selatan	Kamis, 29 Agustus 2024	Auditorium Pascasarjana Universitas Serelo Lahat	1. Ketua Pengadilan Negeri Lahat 2. Akademisi Universitas Serelo

12	Sumatera Barat	Sabtu, 14 September 2024	Sekretariat SPI (Serikat Petani Indonesia) Pasaman Barat u	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Divisi Advokasi LBH Padang</li> <li>2. Jaringan Pembela HAM Sumbar</li> </ol>
13	Nusa Tenggara Barat	Sabtu, 12 September 2024	Aula Kantor Desa Pringgasela, Lombok Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Penghubung KY NTB Ridho Ardian Pratama</li> <li>2. Kepala Desa Pringgasela Azizan Zohri</li> </ol>
14	Riau	Rabu 28 Agustus 2024	Kantor Bupati Kampar, Bangkinang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPN Bangkinang</li> <li>2. KPA Bangkinang</li> <li>3. Kajari Kampar</li> </ol>
15	Sulawesi Selatan	Kamis, 5 September 2024	Desa Sidomukti, Bone	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator PKY Sulsel</li> <li>2. Wakil Rektor IV Universitas Andi Djemma Palopo</li> </ol>
16	Kalimantan Timur	Rabu, 4 September 2024	Bontang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akademisi dan praktisi hukum Lilik Rukita Sari</li> <li>2. Koordinator Pokja 30 Buyung Marajo</li> <li>3. Rektor Universitas Trunajaya Bontang Yantie Yophie Turang</li> </ol>
17	Kalimantan Selatan	Selasa 10 September 2024	Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris DPC Peradi Banjarmasin Ali Murtadlo</li> <li>2. Kasubag Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Arie Satya</li> </ol>
18	Aceh	Kamis, 22 Agustus 2024	D'energy Cafe, Aceh Besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh</li> <li>2. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh</li> </ol>

19	Sulawesi Tenggara	Sabtu 31 Agustus 2024	Auditorium Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua PN Kolaka I Gusti Ngurah Putra Atmaja</li> <li>2. Dekan Fakultas Hukum USN Kolaka Riezka Eka Mayasari.</li> </ol>
20	Bali	Kamis 5 September 2024	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan, Kabupaten Buleleng	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani dari LBH Lingkar Karma</li> <li>2. Yogiswara Sunu Graha Putra dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.</li> </ol>

Pengukuran pemahaman peserta edukasi publik oleh 20 Penghubung Komisi Yudisial (PKY) tahun 2024 juga dilakukan dengan membandingkan nilai pretest dan posttest saat pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan pengolahan data hasil pretest dan posttest peserta edukasi publik oleh 20 PKY, terdapat kenaikan pemahaman peserta terhadap KY sebesar 17,27% melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 15%.

#### **b. Tingkat Kepuasan Pemustaka Terhadap Layanan Perpustakaan**

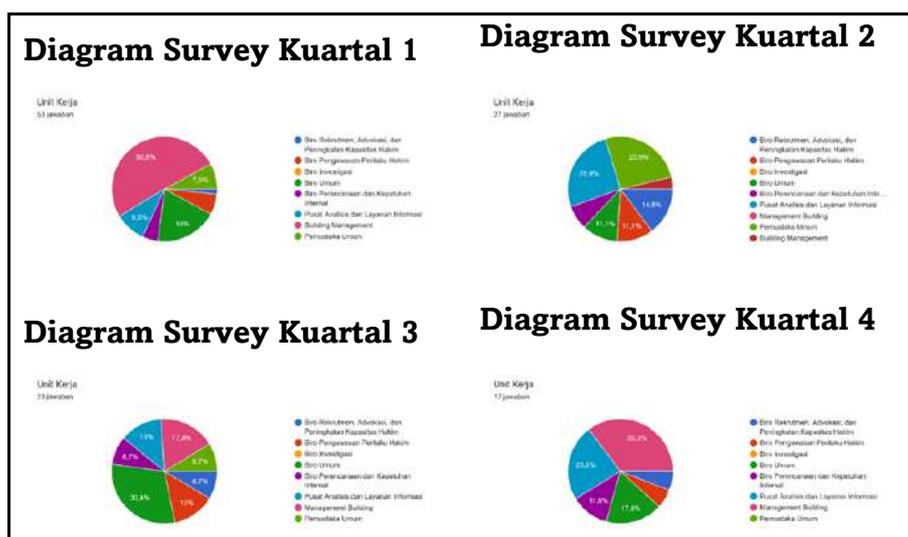
Indikator kedua dari sasaran kegiatan ini yaitu tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan. Target ini berhasil dipenuhi berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pemustaka atau pengguna perpustakaan. Kami membagi waktu pelaksanaan survei sebanyak 4 kali sepanjang Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kuartal 1 yaitu, Januari s.d Maret 2024;
- Kuartal 2 yaitu, April s.d Juni 2024;
- Kuartal 3 yaitu, Juli s.d September 2024; dan
- Kuartal 4 yaitu Oktober s.d Desember 2024 (*cut off* tanggal 16 Desember 2024).

Responden dari survei adalah pemustaka yang berasal dari unit kerja di Komisi Yudisial, management building, dan pemustaka umum yang berada di lingkungan Komisi Yudisial dengan jumlah seluruh responden sebanyak 130 orang, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Diagram Responden Layanan Perpustakaan Tahun 2024:

Diagram ini menjelaskan asal responden yang merupakan Pemustaka dari Perpustakaan Komisi Yudisial. Pada Kuartal 1 terdapat sebanyak 63 responden, Kuartal 2 sebanyak 27 responden, Kuartal 3 sebanyak 23 responden dan Kuartal 4 sebanyak 17 responden.

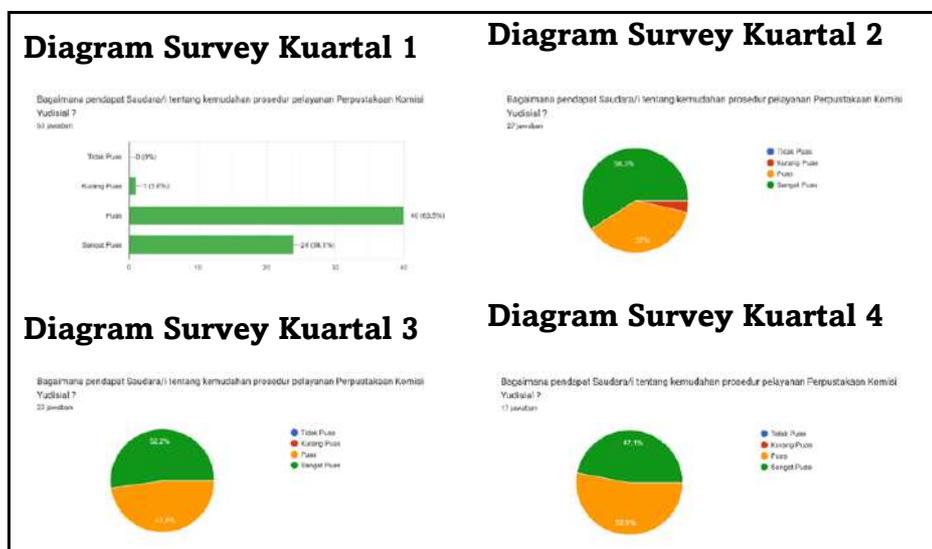


Gambar 3.69  
Diagram Responden Layanan Perpustakaan Tahun 2024

2. Pendapat Responden Tentang Kemudahan Prosedur Pelayanan Perpustakaan Komisi Yudisial Tahun 2024

Diagram berikut menjelaskan pendapat responden terkait kemudahan dari prosedur layanan Perpustakaan Komisi Yudisial. Berdasarkan data di bawah ini yang didapatkan dari Kuartal 1 s.d Kuartal 4, diketahui bahwa rata – rata setiap Kuartal, pengguna atau pemustaka Perpustakaan Komisi

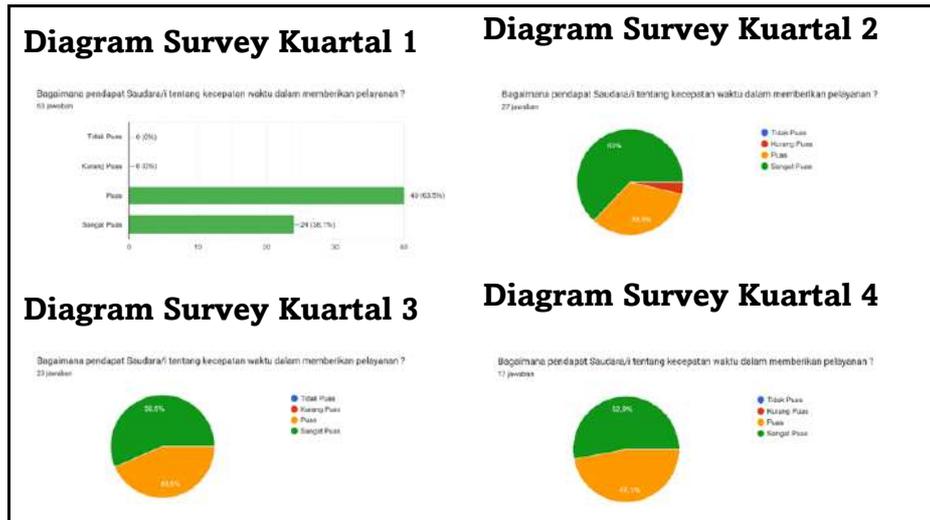
Yudisial “**Puas**” terhadap kemudahan prosedur pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial.



Gambar 3.70  
Diagram Kemudahan Prosedur Pelayanan Perpustakaan

### 3. Pendapat Responden Tentang Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan

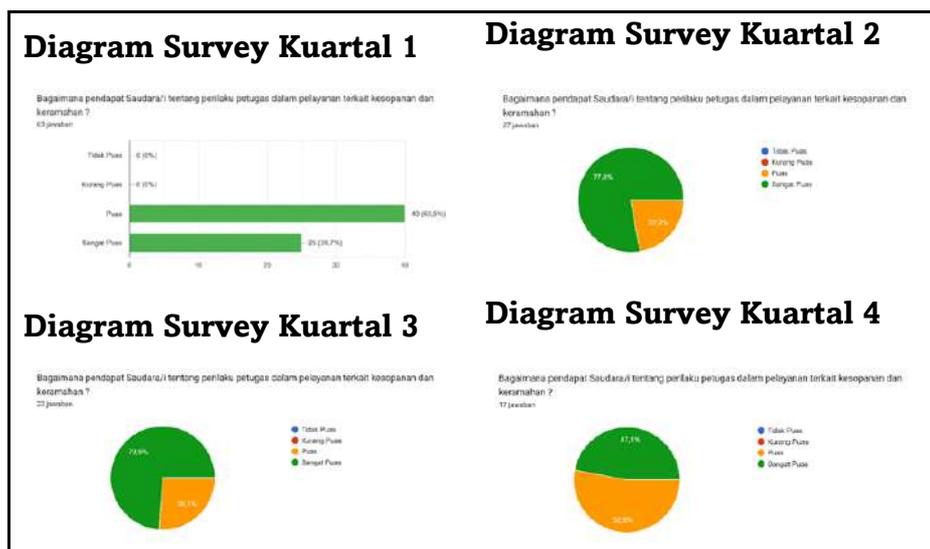
Kelompok Diagram selanjutnya menjelaskan pendapat responden terkait kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Berdasarkan data berikut dapat dicermati bahwa dari Kuartal 1 s.d Kuartal 4, rata – rata setiap Kuartal, pengguna atau pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial “Sangat Puas” terhadap kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan Perpustakaan.



Gambar 3.71  
 Diagram Kecepatan Waktu Pelayanan

#### 4. Pendapat Tentang Perilaku Petugas

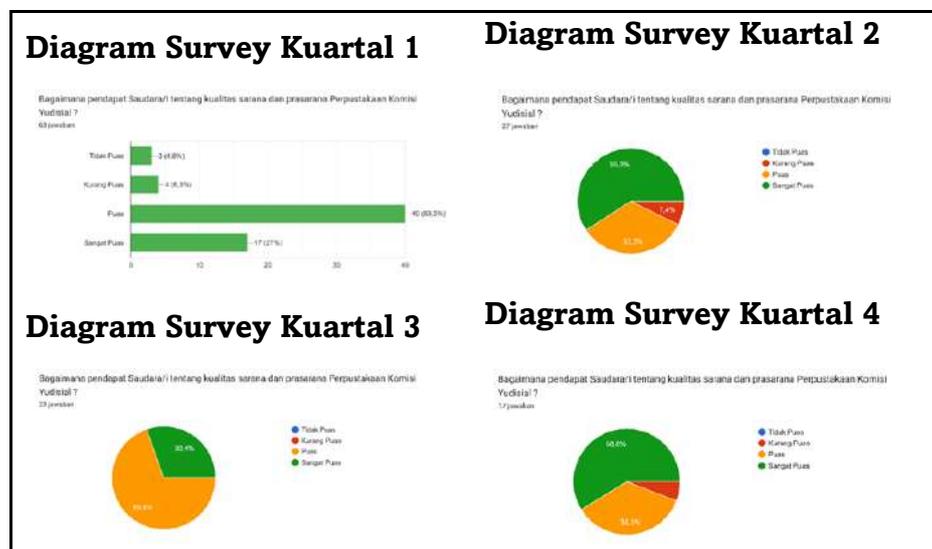
Selanjutnya adalah kelompok diagram yang menjelaskan pendapat responden terkait perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. Berdasarkan data berikut diketahui bahwa dari Kuartal 1 s.d Kuartal 4, rata – rata pengguna atau pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial “Sangat Puas” terhadap perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.



Gambar 3.72  
 Diagram Perilaku Petugas

## 5. Kualitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan Komisi Yudisial

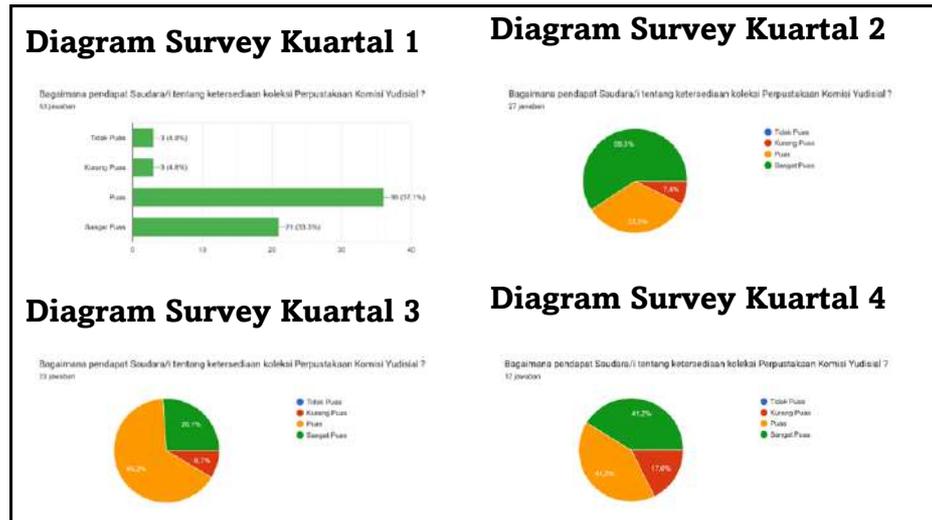
Terkait sarana prasarana yang dimiliki Perpustakaan Berdasarkan data berikut diketahui bahwa dari Kuartal 1 s.d Kuartal 4, rata – rata pengguna atau pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial “**Puas**” terhadap sarana dan prasarana Perpustakaan Komisi Yudisial. Meski demikian terdapat juga jawaban responden yang menyatakan kurang puas dan tidak puas, hal itu dapat kita cermati pada data diagram berikut.



Gambar 3.73  
Diagram Sarana Prasarana Perpustakaan

## 6. Ketersediaan Koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial

Yang terakhir adalah kelompok jawaban responden yang berkaitan dengan koleksi Perpustakaan. Berdasarkan data berikut diketahui bahwa dari Kuartal 1 s.d Kuartal 4, rata – rata pengguna atau pemustaka Perpustakaan Komisi Yudisial menyatakan “Puas” terhadap koleksi yang dimiliki perpustakaan saat ini. Sama dengan sarana prasarana sebelumnya, terdapat juga catatan bahwa ada beberapa kali pernyataan tidak dan kurang puas dari Pemustaka terhadap koleksi yang dimiliki Perpustakaan saat ini.



Gambar 3.74  
 Diagram Ketersediaan Koleksi Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan di tahun 2024, secara rutin, terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, sistem Open Public Access Catalogues (OPAC), dan Pojok Baca Komisi Yudisial. Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2024.

- **Layanan Kunjungan Perpustakaan**

Layanan kunjungan Perpustakaan Komisi Yudisial dilakukan secara rutin mengikuti jam kerja Pegawai yaitu, Pukul 08:00 s.d 16:00 WIB, dengan waktu istirahat selama 60 menit. Sepanjang Tahun 2024, tim pengelola perpustakaan mencatat kunjungan pemustaka (pengunjung perpustakaan) seperti pada grafik berikut:



Gambar 3.75  
Grafik Rekapitulasi Kunjungan Pemustaka Tahun 2024

Pada grafik rekapitulasi kunjungan Pemustaka Tahun 2024, dapat kita amati bahwa setiap bulan kunjungan pada Perpustakaan cukup tinggi, dengan rata – rata sebanyak 243 orang setiap bulannya, dengan angka tertinggi pada bulan September, sejumlah 408 orang, sedangkan angka terendah sebesar 78 orang pada bulan November. Sementara total kunjungan di Tahun 2024 sebanyak 3.215 orang. Adapun jika dilihat dari karakteristik pemustaka yang menggunakan perpustakaan, bila diklasifikasi berdasarkan interest atau minat kebutuhannya adalah sebagai berikut:

- a) RECREATION, Refreshing / Kunjungan Biasa / Baca – baca ditempat
- b) DUTY, Memanfaatkan tempat untuk Bekerja/Tugas Kantor
- c) MEETING, Menggunakan ruang untuk Rapat / Diskusi
- d) LITERATION, Literasi Kebutuhan baik akademis maupun nonakademis
- e) OBSERVING, Melihat – lihat / visit diluar kebutuhan Perpustakaan

Berdasarkan klasifikasi diatas maka, informasi yang kami dapatkan dapat diamati pada grafik berikut:



Gambar 3.76  
Grafik Karakteristik Interest Pemustaka Tahun 2024

Berdasarkan Grafik diatas maka diketahui bahwa sejauh ini karakteristik interest pemustaka di Tahun 2024, yang berkunjung ke Perpustakaan dengan keperluan Rekreasi (RECREATION) sebanyak 1.929 orang, kemudian disusul dengan pemustaka yang datang untuk bekerja, atau mengerjakan tugas (DUTY) sebanyak 841 orang, juga ada pemustaka yang menggunakan perpustakaan sebagai tempat pertemuan yaitu sebanyak 199 orang.



Gambar 3.77  
layanan kunjungan perpustakaan

- **Layanan Sirkulasi**

Layanan sirkulasi meliputi peminjaman dan pengembalian koleksi Perpustakaan, sementara basis data yang digunakan adalah data peminjaman koleksi Perpustakaan, yang dimana hal ini dapat memotret kebutuhan juga mengukur seberapa besar minat baca pemustaka terhadap koleksi yang tersedia pada Tahun 2024, seperti yang kita lihat pada Grafik berikut:



Gambar 3.78  
Grafik Jumlah Layanan Sirkulasi Tahun 2024

- **Pengelolaan Koleksi**

Pada awal Tahun 2024, telah dilakukan updating Sistem UDC (Universal Decimal Classification) untuk sistem penomoran buku Perpustakaan. Selanjutnya di Bulan Mei 2024, dilakukan instalasi dan ujicoba OPAC (Online Public Access Catalog) INLIS (Integrated Library System) Lite Versi 3 ke server KY dengan dibantu oleh pihak-3. Sementara aktivitas dalam pengelolaan koleksi di Tahun 2024, masih terus melakukan katalogisasi terhadap 3.365 koleksi yang sejauh ini dimiliki Perpustakaan. Koleksi yang telah diolah berjumlah 1.187 koleksi, sedangkan sisanya yang belum di olah berjumlah, 2.178 eksemplar. Pengelolaan menggunakan aplikasi Integrated

Library System (INLIS) Lite Versi 3, yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.



Gambar 3.79  
audiensi dengan Pustakawan Muda terkait sistem UDC Gambar

#### ▪ **Penataan Ruang Perpustakaan**

Penataan Ruang Perpustakaan sejauh ini berkoordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum, mengingat tugas dan tanggungjawab ruangan beririsan dengan Bagian tersebut, dan juga Barang Milik Negara (BMN) di Perpustakaan yang dikuasakan kepada Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi maka, kegiatan penataan ruang Perpustakaan perlu berjalan terkoordinasi serta berkesinambungan.

Beberapa hal yang telah dilakukan sejauh ini adalah:

- a. Pengiriman Nota Dinas Nomor: 8/ND/AL/PK.01.01/02/2024 tentang Permintaan Pemenuhan Kebutuhan Barang Penunjang Pekerjaan;
- b. Pengarahan langsung Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi untuk penyegaran ruang diskusi dan rak koleksi;

- c. Melakukan observasi terkait estetika penataan ruang diskusi dan koleksi pada Perpustakaan Kineruku;
- d. Melakukan penataan ruangan dengan cara mengelompokkan rak buku di satu tempat dan memisahkan ruang baca dengan rak koleksi. Penataan ruangan bertujuan untuk penyegaran suasana baru Perpustakaan Komisi Yudisial;
- e. Melakukan penambahan beberapa barang eks booth pameran perpustakaan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk pembuatan konsep / ide sticker kaca (Sandblast) Ruang Perpustakaan Komisi Yudisial; dan
- g) Melakukan koordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga untuk perbaikan saluran udara, dan pemasangan AC pada ruang pengolahan koleksi perpustakaan.



Gambar 3.80  
Penataan Ruang Lesehan

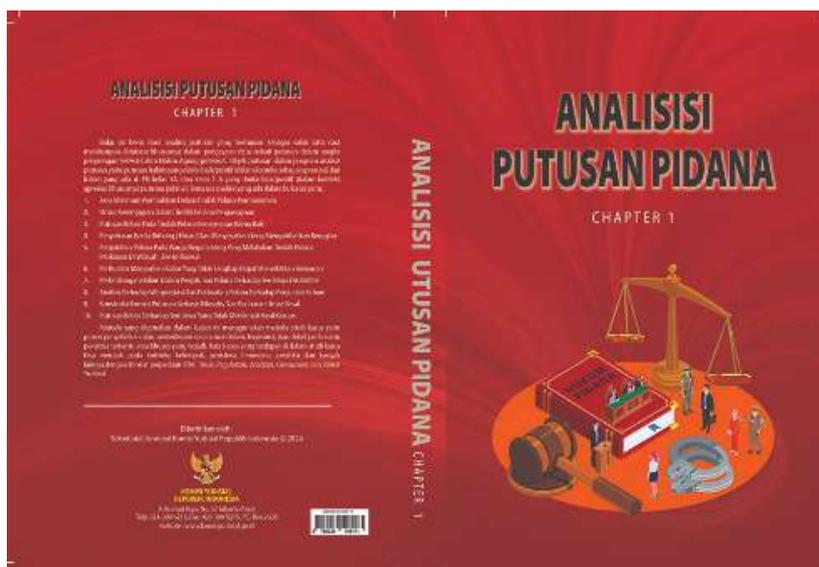


Gambar 3.81  
Penataan Ruang Baca dan diskusi

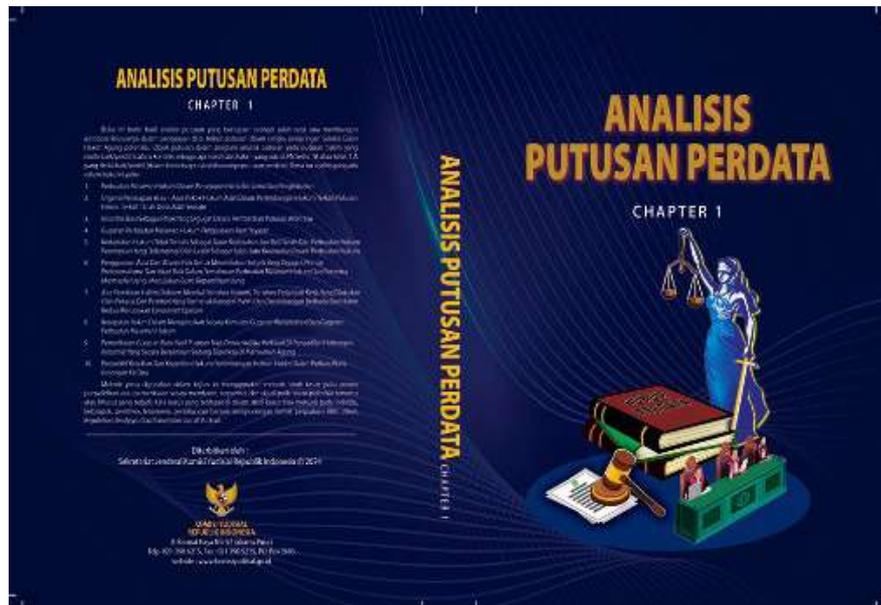
### Reproduksi Koleksi Perpustakaan

Reproduksi koleksi Perpustakaan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 yaitu:

- a. Reproduksi koleksi Buku Analisis Putusan Komisi Yudisial Chapter Pidana
- b. Reproduksi koleksi Buku Analisis Putusan Komisi Yudisial Chapter Perdata



Gambar 3.82  
Buku Analisis Putusan Chapter Pidana



Gambar3.83  
)Buku Analisis Putusan Chapter Perdata

▪ **Program Literasi Komisi Yudisial**

Program literasi yang dilakukan sepanjang Tahun 2024 adalah:

- a) Melakukan pelaksanaan pameran Perpustakaan MPR RI dalam rangka HUT MPR RI yang ke-79. Pada acara tersebut, Perpustakaan Komisi Yudisial ikut serta sebagai peserta pameran dengan mendirikan stand/booth dengan tema “Taman Literasi Komsis Yudisial”. Perpustakaan Komisi Yudisial memberikan literasi kepada pengunjung stand Taman Literasi Komsis Yudisial terkait dengan kelembagaan Komisi Yudisial. Selain itu, Perpustakaan Komisi Yudisial juga memperkenalkan berbagai macam koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial dan mengedukasi cara akses serta penggunaan koleksi tersebut.



Gambar 3.84  
Pameran Literasi Perpustakaan di MPR dan mendapatkan penghargaan sebagai Stand Terinovasi

- b) Menerima kunjungan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu dalam rangka melakukan studi “Analisis Putusan Hakim dan Perpustakaan Komisi Yudisial RI” pada Kamis, 5 September 2024. Pada acara tersebut, Perpustakaan Komisi Yudisial menerima kedatangan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang terdiri dari 1 dosen dan 10 mahasiswa. Perpustakaan Komisi Yudisial melakukan knowledge sharing seputar kelembagaan Komisi Yudisial dan pengenalan Perpustakaan Komisi Yudisial kepada UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.



Gambar 3.85  
Kegiatan kunjungan Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno  
Bengkulu

▪ **Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Kerjasama Perpustakaan**

Dalam pengembangan kapasitas SDM dan kerjasama perpustakaan, hal yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024 adalah:

- a) Melakukan Kegiatan survey penerbitan dan percetakan buku koleksi di Penerbit IPB Press dan Pustaka Obor;
- b) Melakukan penjajakan reproduksi koleksi rekam dalam rangka pembuatan video dokumenter Komisi Yudisial di Universitas Telkom;
- c) Melakukan kegiatan observasi pengelolaan koleksi hasil penelitian serta sistem OPAC pada Perpustakaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Megamendung;
- d) Melakukan penjajakan dalam rangka pencarian data dan informasi tentang pengukuran kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;

- e) Melakukan observasi mekanisme pengolahan data kepuasan pemustaka terhadap layanan sirkulasi, koleksi, dan referensi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- f) Melakukan observasi terhadap pembuatan laporan statistik pengunjung perpustakaan yang bersumber dari OPAC pada Perpustakaan Universitas Telkom;
- g) Melakukan observasi terkait estetika penataan ruang diskusi dan koleksi pada Perpustakaan Kineruku;
- h) Melakukan observasi penataan rak koleksi terkait dengan penjajaran koleksi berdasarkan sistem UDC / DDC pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor;
- i) Melakukan observasi terkait pengembangan perpustakaan digital pada Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital (P3D) di Bogor Jawa Barat;
- j) Melakukan observasi terkait program kreatif dalam rangka peningkatan minat baca pemustaka terhadap literasi asing pada Perpustakaan Universitas Telkom;
- k) Melakukan penyerahan koleksi publikasi Komisi Yudisial untuk pelestarian dan memori rekam di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bogor;
- l) Melakukan koordinasi dengan narasumber (penyusunan web perpustakaan) untuk penyusunan katalog terjemahan koleksi asing serta uji coba dan evaluasi aplikasi INLIS Lite 3 Perpustakaan Komisi Yudisial di Tangerang, Banten; dan
- m) Menghadiri kegiatan koordinasi dan advokasi dengan Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPK Indonesia) yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.



Gambar 3.86  
Observasi di Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung



Gambar 3.87  
Observasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor



Gambar 3.88  
Observasi di Perpustakaan Kineruku Bandung



Gambar 3.89  
Observasi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung

▪ **Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik Komisi Yudisial**

Indikator kinerja ketiga dari sasaran kegiatan kelima adalah persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik Komisi Yudisial. Buku publikasi yang disusun Komisi Yudisial, seperti: majalah Komisi Yudisial dan buku Bunga Rampai.

Pengukuran untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menyebarkan survei terhadap kualitas bahan diseminasi publik kepada pembaca majalah Komisi Yudisial dan Bunga Rampai Komisi Yudisial pada Desember 2024 dengan hasil SANGAT BAIK (4,43).

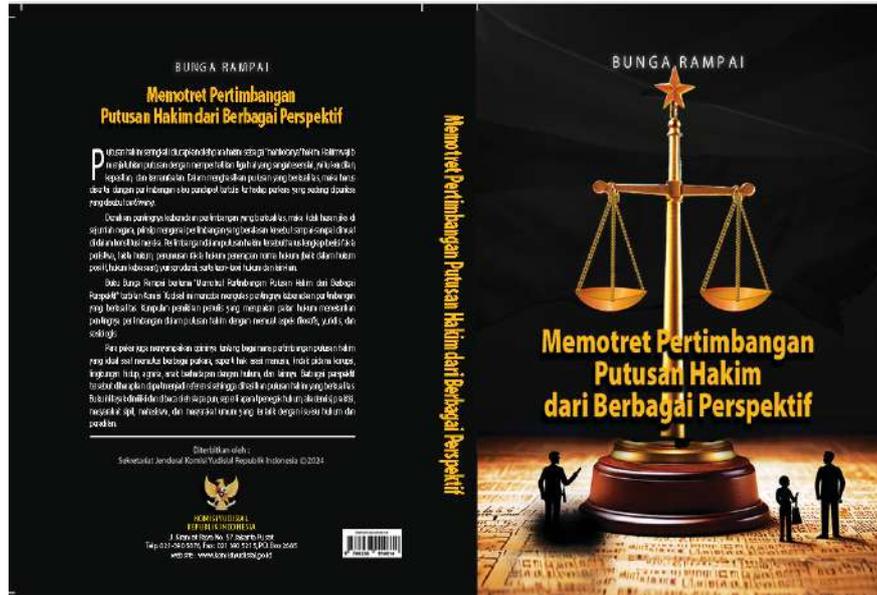
Sebanyak 83 responden mengisi secara online survei publik yang meliputi indikator-indikator: kegunaan informasi, kelengkapan informasi, kebaruan informasi, keakuratan informasi, kejelasan informasi, keragaman informasi, kemudahan akses media, daya tarik tata letak, keragaman warna, daya tarik foto atau ilustrasi, kesesuaian foto dengan informasi.

Adapun hasil survei tersebut:

1. Kegunaan informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,45)
2. Kelengkapan informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,46)
3. Kebaruan informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,43)
4. Keakuratan informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,43)
5. Kejelasan informasi

- Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,54)
6. Keragaman informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,40)
7. Kemudahan akses media  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,55)
8. Daya tarik tata letak  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,26)
9. Keragaman warna  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,32)
10. Daya tarik foto atau ilustrasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,55)
11. Kesesuaian foto dengan informasi  
Mayoritas responden menilai bahwa publikasi KY adalah Sangat Baik (4,39)
- Berdasarkan hasil survei masing-masing indikator, maka nilai publikasi KY adalah SANGAT BAIK (4.43)

Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 1.500 eksemplar Jurnal Yudisial, 4.500 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.300 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 400 eksemplar buku agenda, 17.000 eksemplar stiker, 12.000 eksemplar leaflet kelembagaan dan 8.000 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.



Gambar 3.90  
Bunga Rampai



Gambar 3.91  
Majalah Komisi Yudisial

## **E. Meningkatnya layanan perkantoran**

Target dari indikator sasaran kegiatan ini adalah kategori “Puas” (range nilai 71-85%) para pengguna layanan perkantoran khususnya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk mengetahui tingkat kepuasan tersebut diukur dengan melakukan survei kepada para pengguna layanan pengelolaan TIK. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi masukan untuk melakukan perbaikan sehingga peran TIK untuk membantu pelaksanaan tugas KY semakin dirasakan para pengguna layanan.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) ruang lingkup yang menjadi cakupan penilaian, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem Mekanisme Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/ Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan;
9. Sarana Prasarana;

### **Hasil Survei Layanan TIK**

Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 98% dengan tingkat kesalahan/margin error sebesar 10%. Populasi (N) survei sebesar 336 orang dengan minimum sampel responden sejumlah 69 orang yang dilakukan dengan penyebaran link kuesioner melalui WA Blast.

Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif didasarkan pada Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Hasil Penghitungan Kuesioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	$\Sigma$ Nilai Soal	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
				$\Sigma$ Soal Terisi				
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 69	261	3,78	3,68	254,5	A	Sangat Baik
	P2		248	3,59				
Sistem Mekanisme Prosedur	P3		0	0	3,40	235	B	Baik
	P4		0	0				
	P5		235	3,40				
Waktu Penyelesaian	P6		235	3,40	3,40	235	B	Baik
Biaya	P7		276	4	4	276	A	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		234	3,39	3,39	234	B	Baik
Kompetensi Pelaksana	P9		241	3,49	3,49	241	B	Baik
Perilaku Pelaksana	P10		243	3,52	3,52	243	B	Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11		0	0	3,33	230	B	Baik
	P12		230	3,33				
Sarana dan prasarana	P13		216	3,13	3,13	216	B	Baik
	P14	0	0					
	P15	0	0					
	P16	0	0					
	P17	0	0					
<b>Nilai Indeks</b>				<b>3,48</b>	<b>87,13</b>			
<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>				<b>B</b>	<b>BAIK/PUAS</b>			

\*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (esai)

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan pengelolaan TIK yang dilakukan oleh Palinfo menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks kinerja unit

pelayanan pada kategori B (Baik) dengan nilai 87,13 atau bisa disamakan dengan kategori **PUAS** sebagaimana merujuk pada tabel Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2024.

Tabel 3.18

Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Kerja Sesuai Dengan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
<b>1</b>	<b>1,00 – 2,5996</b>	<b>25,00 – 64,99</b>	<b>D</b>	<b>Tidak baik</b>
<b>2</b>	<b>2,60 – 3,064</b>	<b>65,00 – 76,60</b>	<b>C</b>	<b>Kurang baik</b>
<b>3</b>	<b>3,0644 – 3,532</b>	<b>76,61 – 88,30</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>
<b>4</b>	<b>3,5324 – 4,00</b>	<b>88,31 – 100,00</b>	<b>A</b>	<b>Sangat baik</b>

Berpedoman pada tabel di atas, dapat dilihat nilai rata-rata hasil survei pelayanan pengelolaan TIK adalah baik, bahkan ada beberapa unsur pelayanan yang dapat nilai sangat baik yaitu unsur biaya dan persyaratan. Namun, Untuk unsur sarana dan prasarana yang mendapat nilai baik harus menjadi perhatian karena mendapat nilai terendah dari sembilan unsur layanan yang ada. Hal ini menjadi catatan untuk melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana TIK yang dikelola oleh Palinfo baik yang ada di Komisi Yudisial atau di Penghubung KY di 20 wilayah.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat kepuasan pengelolaan layanan TIK sudah semakin baik. Pada 2023 nilai yang didapat adalah 87,07 dengan kategori B (Baik). Tahun ini nilai yang didapat menjadi 87,13 juga dengan kategori B (Baik). Nilai yang diperoleh pada tahun 2024 tidak ada nilai dengan kategori Kurang Baik atau C (Cukup) untuk masing-masing unsur layanan. Dengan demikian

layanan pengelolaan TIK yang diberikan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dipandang Baik oleh penerima manfaat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat kepuasan pengelolaan layanan TIK sudah semakin baik. Pada 2023 nilai yang didapat adalah 87,07 dengan kategori B (Baik). Tahun ini nilai yang didapat menjadi 87,13 juga dengan kategori B (Baik). Nilai yang diperoleh pada tahun 2024 tidak ada nilai dengan kategori Kurang Baik atau C (Cukup) untuk masing-masing unsur layanan. Dengan demikian layanan pengelolaan TIK yang diberikan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dipandang Baik oleh penerima manfaat.

Dari sisi layanan yang diberikan oleh Palinfo, karena berkaitan dengan pihak ketiga (provider), masalah administrasi dan proses eskalasi ketika terjadi insiden masih menjadi persoalan yang terus dilakukan evaluasi. Hal ini sudah disampaikan Bidang Data dan Layanan Informasi kepada masing-masing penyedia saat melakukan evaluasi terhadap masing-masing vendor (provider) sebelum melakukan perpanjangan atau pembaruan kontrak.

Apabila melihat realisasi indikator kinerja Palinfo sampai dengan tahun 2022 kemudian dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Palinfo 2020-2024, dapat dinyatakan bahwa Palinfo telah mencapai target jangka menengah tersebut.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang ada di Palinfo hampir semuanya atau sekitar 92% telah menduduki jabatan fungsional tertentu yang memiliki kualifikasi dan profesionalitas di bidangnya. Kedua, adanya dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Selain itu, Palinfo juga didukung oleh tim pakar yang menjalankan perannya secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Pada tahun 2022 Palinfo mendapatkan anggaran sebesar Rp11.634.920.000. Dari jumlah tersebut anggaran yang berhasil diserap sebesar Rp11.037.757.153 atau 94,87%.

## **B. FAKTOR PENDUKUNG PENGHAMBAT, DAN STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

### **1. Pendukung Keberhasilan**

Adapun beberapa faktor yang dirasakan sebagai pendukung bagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam memenuhi capaian kinerja dan anggaran secara maksimal, antara lain:

- a. SDM yang saat ini dimiliki hampir 100% sudah berada dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sehingga dari sisi kualitas sudah dianggap sebagai SDM profesional di bidangnya.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang disediakan bagi SDM yang ada secara kualitas sudah memenuhi standar kerja yang ditetapkan, dan sangat mendukung pelaksanaan tugas Pusat Analisis dan Layanan Informasi.
- c. Secara pendidikan, SDM yang ada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi telah memenuhi standar yang ditentukan di bidangnya, termasuk dalam hal pengembangan SDM melalui pendidikan informalnya.
- d. Untuk memenuhi kekurangan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Analisis dan Layanan Informasi diperbantukan satu orang tenaga jasa lainnya yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, serta satu pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN) dan dua jasa lainnya yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Data dan Layanan Informasi untuk mempelancar kinerja pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi.

### **2. Penghambat Keberhasilan**

Adapun beberapa faktor yang dirasakan sebagai penghambat bagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam memenuhi capaian kinerja dan anggaran secara maksimal, antara lain:

1. Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di Pusat Analisis dan Layanan Informasi, di mana jumlah SDM yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan terhadap Pusat Analisis dan Layanan Informasi serta kapasitas SDM yang diperlukan dalam menguasai sisi perencanaan kegiatan masih sangat terbatas.
2. Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran yang cukup menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya kebijakan “blokir anggaran” oleh Kementerian Keuangan yang menyebabkan ketidakpastian. Upaya pembukaan kembali anggaran yang diblokir tidak mudah untuk dilakukan dan tidak dapat dipastikan keberhasilannya. Pada tahun 2024, anggaran Palinfo yang terblokir tidak dapat untuk didapatkan kembali sama sekali. Hal ini menyebabkan dilakukannya efisiensi sangat ketat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Palinfo sehingga tidak ideal untuk menunjang pencapaian kinerja.
3. Masih belum begitu idealnya postur anggaran yang diberikan apabila dibandingkan dengan usulan perencanaan, sehingga terkadang ada cakupan pelaksanaan kegiatan yang dirasa tidak terlaksana secara komprehensif.

### **3. Strategi Peningkatan Kinerja**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.

- b. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh Komisi Yudisial maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.
- d. Merekrut SDM dengan status jasa lainnya untuk mengatasi kendala kekurangan jumlah SDM yang dimiliki.

### **C. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL NASIONAL**

Dari target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, ada beberapa capaian kinerja yang merujuk kepada capaian kinerja secara nasional, diantaranya:

#### **a. Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif**

##### **Sertifikasi ISO 27001:2022**

ISO/IEC 27001 berisi panduan keamanan informasi yang menjelaskan syarat-syarat untuk membuat, menerapkan, melaksanakan, memonitor, menganalisa, dan memelihara serta mendokumentasikan informasi agar tetap aman yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan atas informasi. Pada dasarnya SMKI ini menerapkan proses manajemen resiko pada keamanan informasi termasuk kepada orang, proses, dan sistem teknologi informasi.

Sejak 2017, Komisi Yudisial sudah mulai mengimplementasikan ISO/IEC 27001. Secara nasional belum banyak Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan. Pada tahun 2023 Komisi Yudisial melakukan upgrade standar sekaligus recertification ISO/IEC 27001:2022. Sesuai dengan siklus pelaksanaan audit, tahun

2024 masuk pada Surveillance 1. Hasil audit tahun 2024 merekomendasikan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya.

## KY CSIRT

Dari bahan paparan yang disampaikan BSSN, terkait rencana pembangunan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Komisi Yudisial dalam rencana pembangunan masuk pada tahun 2023. Namun dalam realisasinya, rekomendasi dari BSSN berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) KY CSIRT dapat diluncurkan pada tahun 2022 (satu tahun lebih cepat dari rencana BSSN)



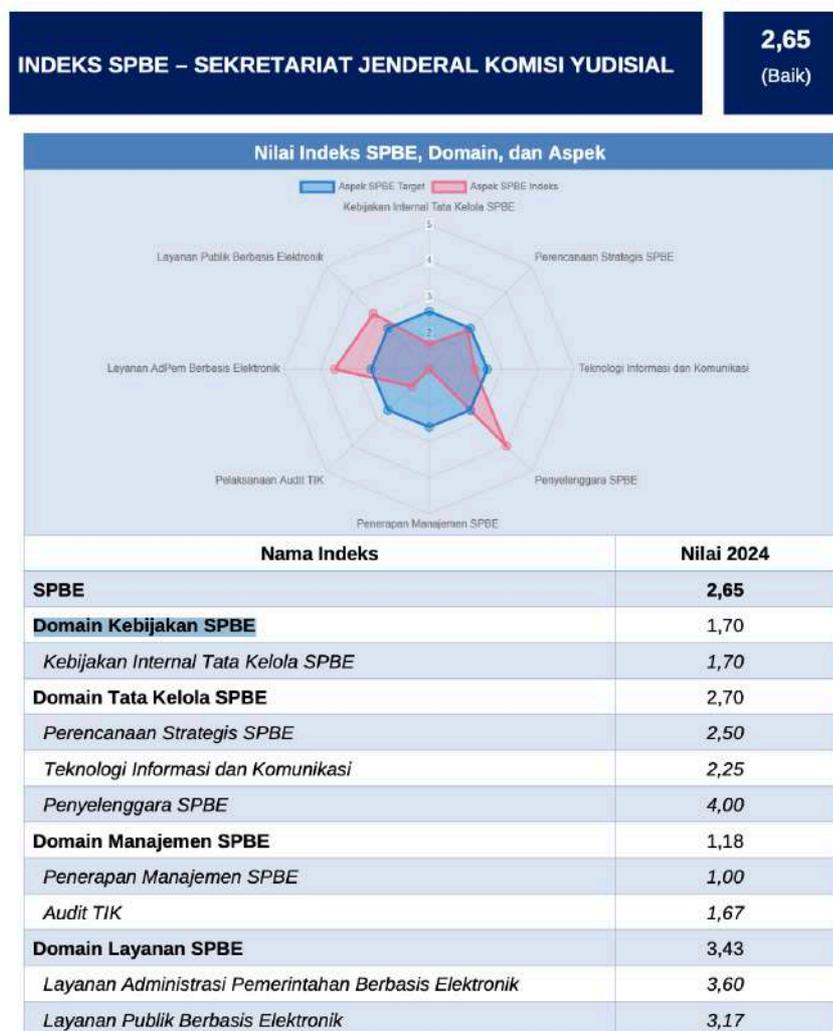
Gambar 3.92  
Peta Rencana Pembangunan CSIRT Instansi Pusat Tahun 2020-2024 yang dilakukan oleh BSSN

## Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dari 47 indikator, domain

Kebijakan SPBE dan domain Manajemen SPBE yang masih jauh dari standar.

Berikut hasil penilaian Indeks SPBE tahun 2024.



Gambar 3.93  
Indeks SPBE Komisi Yudisial tahun 2024

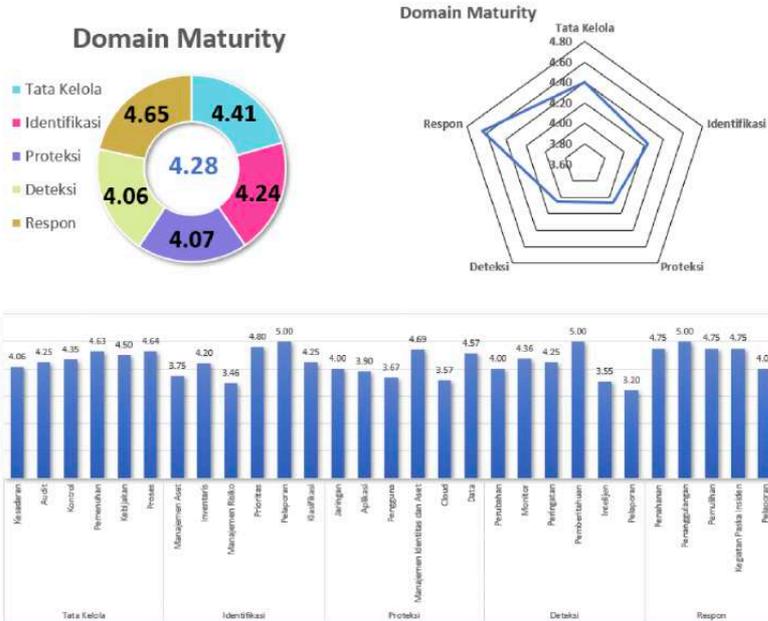
### Indeks Maturitas Keamanan Siber

Berdasarkan penilaian instrumen CSM tersebut diperoleh Total Score Indeks Kematangan 4.28. Sehingga dengan Indeks Kematangan tersebut dapat ditentukan bahwa Level Kematangannya Tingkat 4.

Dengan demikian, secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber prosesnya sudah terorganisir

dengan baik namun belum dilakukan proses otomatisasi, bersifat formal, dilakukan secara berulang dan direviu secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini dapat terukur dengan baik.

Tata Kelola		Identifikasi		Proteksi		Deteksi		Respon	
4.41		4.24		4.07		4.06		4.65	
Kesadaran	4.06	Manajemen Aset	3.75	Jaringan	4.00	Perubahan	4.00	Penahanan	4.75
Audit	4.25	Inventaris	4.20	Aplikasi	3.90	Monitor	4.36	Penanggulangan	5.00
Kontrol	4.35	Manajemen Risiko	3.46	Pengguna	3.67	Peringatan	4.25	Pemulihan	4.75
Pemenuhan	4.63	Prioritas	4.80	Manajemen Identitas dan Aset	4.69	Pemberitahuan	5.00	Kegiatan Paska Insiden	4.75
Kebijakan	4.50	Pelaporan	5.00	Cloud	3.57	Intelijen	3.55	Pelaporan	4.00
Proses	4.64	Klasifikasi	4.25	Data	4.57	Pelaporan	3.20		



Berdasarkan penilaian instrumen CSM tersebut diperoleh bahwa:  
**Total Score Indeks Kematangan: 4.28**

Gambar 3.93  
 Hasil Evaluasi Indeks CSM KY 2024

### Indeks Pembangunan Statistik

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Komisi Yudisial Tahun 2024 adalah **2,10** dengan predikat **“Cukup”**. Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk

perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sectoral di Komisi Yudisial.

**Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Lainnya**

No.	Nama Lokus	IPS	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badan Intelijen Negara	2.72	Baik
2	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.96	Cukup
3	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.04	Cukup
4	Badan Pemeriksa Keuangan	2.98	Baik
5	Badan Pengawas Pemilihan Umum	2.61	Baik
6	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam / Badan Pengusahaan Batam	2.74	Baik
7	Dewan Ketahanan Nasional	2.69	Baik
8	Dewan Perwakilan Daerah	1.90	Cukup
9	Dewan Perwakilan Rakyat	2.57	Cukup
10	Kejaksaan Republik Indonesia	2.57	Cukup
11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.58	Cukup
12	Komisi Aparatur Sipil Negara	1.98	Cukup
13	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.82	Cukup
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.05	Baik
15	Komisi Pemilihan Umum	1.96	Cukup
16	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.96	Cukup
17	Komisi Yudisial	2.10	Cukup
18	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.86	Cukup
19	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.49	Kurang
20	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	1.83	Cukup
21	Mahkamah Agung	2.03	Cukup
22	Mahkamah Konstitusi	2.03	Cukup
23	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.67	Kurang
24	Ombudsman Republik Indonesia	2.26	Cukup
25	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2.65	Baik
26	Sekretariat Kabinet	2.37	Cukup

**Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain**

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,96
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,21
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,23
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,22
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>2,10</b>

Gambar 3.94  
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Domain

## b. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 53/KEP/KIP/XII/2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 52/KEP/KIP/XII/2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024 memberikan predikat “**Informatif**” kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 95,72.

<b>LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN</b>		
<b>NO</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>
1.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	96,63
2.	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	96,46
3.	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	96,15
4.	RADIO REPUBLIK INDONESIA	96,10
5.	MAHKAMAH AGUNG	96,09
6.	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	95,97
7.	OTORITAS JASA KEUANGAN	95,97
8.	KOMISI YUDISIAL	95,72
9.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	95,71
10.	BANK INDONESIA	95,49
11.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	95,37
12.	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	95,10
13.	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	95,07
14.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	94,77
15.	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	94,67
16.	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	94,67
17.	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	94,47
18.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	94,20
19.	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	94,19
20.	SEKRETARIAT KABINET	93,76
21.	MAHKAMAH KONSTITUSI	93,69
22.	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	92,81
23.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	92,01
24.	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	91,75
25.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	91,40

Gambar 3.95  
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2024

## D. REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI

### 1. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2024 Palinfo memperoleh anggaran sebesar Rp15.118.599.000 dengan serapan sebesar Rp15.091.103.148 atau 99,82%. Rincian dari penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19  
Rincian Penggunaan Anggaran Palinfo Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1		2	3	4
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp 15,118,599,000	Rp 15,091,103,148	99,82
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 12,069,028,000	Rp 12,045,689,127	99,81
3868.EBA.001	Layanan Manajemen Keamanan TIK	Rp 240,612,000	Rp 239,540,216	99,55
051	Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK	Rp 240,612,000	Rp 239,540,216	99,55
3868.EBA.002	Layanan Komunikasi Publik	RP 668,213,000	Rp 664,738,225	99,48
051	Layanan Keterbukaan Informasi	Rp 63,178,000	Rp 62,993,705	99,71
052	Media Monitoring	Rp 224,001,000	Rp 222,016,384	99,11
053	Pengelolaan Perpustakaan	Rp 204,041,000	Rp 203,882,601	99,92
054	Layanan Penerjemah	Rp 176,993,000	Rp 175,845,535	99,35

<b>3868.EBA.003</b>	<b>Edukasi Publik</b>	<b>RP 1,451,992,000</b>	<b>Rp 1,446,485,404</b>	<b>99,62</b>
051	Penyusunan bahan diseminasi dan informasi publik	Rp 670,750,000	Rp 670,727,850	100,00
052	Pelaksanaan Edukasi Publik	Rp 781,242,000	Rp 775,757,554	99,30
<b>3868.EBA.963</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>	<b>Rp 1,137,011,000</b>	<b>Rp 1,135,054,365</b>	<b>99,83</b>
051	Pengelolaan Infrastruktur TIK Terintegrasi	Rp 446,382,000	Rp 444,944,555	99,68
052	Pemutakhiran data dan sistem Informasi	Rp 424,590,000	Rp 424,495,110	99,98
053	Implementasi SPBE	Rp 266,039,000	Rp 265,614,700	99,84
<b>3868.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>Rp 8,571,200,000</b>	<b>Rp 8,559,870,917</b>	<b>99,87</b>
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 8,571,200,000	Rp 8,559,870,917	99,87
<b>3868.EBD.</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>	<b>Rp2.703.309.000</b>	<b>Rp2.697.846.324</b>	<b>99,80</b>
<b>3868.EBD.001</b>	<b>Layanan Analisis dan Pengakajian</b>	<b>Rp 1,412,356,000</b>	<b>Rp 1,411,022,229</b>	<b>99,91</b>
051	Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan	Rp 192,440,000	Rp 192,377,400	99,97
052	Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi	Rp 496,644,000	Rp 495,610,151	99,79
053	Analisis Putusan	Rp 723,272,000	Rp 723,034,678	99,97

<b>3868.EBD.002</b>	<b>Falititasi Fungsional Penata Kehakiman</b>	<b>Rp 1,007,117,000</b>	<b>Rp 1,006,610,890</b>	<b>99,95</b>
051	Layanan Manajemen Fungsional Penata Kehakiman	Rp 377,416,000	Rp 377,088,411	99.91
052	Pengembangan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	Rp 629,701,000	Rp 629,522,479	99.97
<b>3868.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>Rp 40,098,000</b>	<b>Rp 40,091,402</b>	<b>99,98</b>
051	Laporan dan Evaluasi Kinerja Palinfo	Rp 40,098,000	Rp 40,091,402	99,98

## 2. EFISIENSI ANGGARAN

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Dari table di atas, berikut analisis efisiensi terhadap sasaran kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik memiliki kinerja 100% dan realisasi anggarannya mencapai 99,71%. Hal ini menunjukkan terdapat efisiensi sebesar 50,72%.

Tabel 3.20  
Efisiensi Anggaran Palinfo Tahun 2024

	RO	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	Efisiensi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(7)=Σ(6)/Σ(3)
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik		Rp14.446.905.000	Rp14.405.440.444	50,72%
3868.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Rp11.743.596.000	Rp11.707.594.120	
3868.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	100.00%	Rp4.893.596.000	Rp4.869.994.605	
3868.EBA.994	Layanan Perkantoran	100.00%	Rp6.850.000.000	Rp6.837.599.515	
3868.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Rp2.703.309.000	Rp2.697.846.324	

<b>3868.EBD.001</b>	<b>Dokumen Hasil Kajian Kelembagaan</b>	100.00%	<b>Rp1.907.509.000</b>	<b>Rp1.904.667.709</b>
<b>3868.EBD.002</b>	<b>Falititasi Fungsional Penata Kehakiman</b>	100.00%	<b>Rp680.000.000</b>	<b>Rp677.411.844</b>
<b>3868.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	100.00%	<b>Rp115.800.000</b>	<b>Rp115.766.771</b>

## BAB IV

# Penutup

Laporan Kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) ini merupakan uraian yang menginformasikan kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi di tahun 2024 yang barang tentu untuk mendukung penguatan kelembagaan Komisi Yudisial. Kesimpulannya adalah bahwa pada tahun 2024 Palinfo telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi tahun 2024. Penerbitan laporan akuntabilitas kinerja Palinfo ini diharapkan akan memberikan informasi serta gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Palinfo.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2020 s.d 2024, setiap bulannya selalu dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan yang apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Palinfo Periode 2020 s.d 2024 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan organisasi sebagaimana dituangkan dalam visi Komisi Yudisial yaitu “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Renstra Palinfo dalam Periode 2020 s.d 2024 selalu dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada di internal Palinfo sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Semua unit kerja diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Demikian laporan kinerja Palinfo tahun 2024 ini disusun dengan sebenarnya dan diharapkan dapat dipergunakan untuk evaluasi secara bersama sehingga di kemudian hari capaian kinerja Palinfo dan/atau Komisi

Yudisial secara umum akan semakin baik dan dapat didukung dengan penganggaran yang signifikan.

# Lampiran-lampiran

## 1. Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi

  
**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juma'in, S.E.  
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar., S.H., M. Hum  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

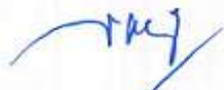
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

  
Arie Sudihar., S.H., M. Hum  
NIP 19710123 199603 1 003

  
Juma'in, S.E.  
NIP 19680515 198912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI**

**Sasaran Program:**

1. Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien
2. Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif
3. Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi 2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	3 Aplikasi 70%
2.	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3.	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 rekomendasi
4.	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP) 2. Kategori publisitas positif melalui media monitoring	Menuju Informatif Kategori positif
5.	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase jumlah publik yang mengikuti edukasi 2. Laporan pengelolaan perpustakaan 3. Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di Bidang Yudisial	15% 1 laporan 45000
6.	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

**Kegiatan:**

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik  
Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

**Anggaran:**

Rp14.995.800.000,00  
Rp2.012.372.000,00

Jakarta, 2 Januari 2023

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,

  
Arie Sudhar, S.H., M. Hum  
NIP 19710123 199603 1 003

  
Juma'in, S.E.  
NIP 19680515 198912 1 001

## 2. Certificate of Registration ISO



**CERTIFICATE OF REGISTRATION**  
**ISO/IEC 27001:2022**  
**INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS**

This is to certify, that:

**Komisi Yudisial Republik Indonesia**  
Jalan Kramat Raya No.57, RT.08 / RW.08, Kel. Kramat, Kec. Senen, Jakarta Pusat - 10450  
*has been found to conform with the requirements of the Management System Standard mentioned above.*

**Scope of Certification**  
The provision of Information Security Management Systems of Data Center, Help Desk, Application and Infrastructure Operation at Data and Information Services  
This is in-accordance with Statement of Applicability Document, Number 12/AL.2/SI.04/02/2023, Revision 5.0, Released date 13 February 2023



  
Yessiva, S.T., M.B.A.  
President Director

**Cert. Number: ISMS1001009**  
*(please click above for certificate validity)*

Initial Certification Date	: 02 February 2018
Latest Certification Date	: 22 January 2024
Issue Date	: 23 January 2024
Expired Date	: 31 January 2027



(scan me)



(Barcode KAN)

This certificate is issued according to the agreed Certification Agreement of certification services that can be accessed at [www.cbqaglobal.com/certification-agreement](http://www.cbqaglobal.com/certification-agreement). This certificate's validity is subject to the continued satisfactory maintenance of the Organisation's Management System. Certificate could be validated by clicking on the link provided above (on the left-hand side) or by scanning both codes provided above (on the middle & right-hand side) with a smartphone.  
Office Address: South Quarter Tower A, 17th floor Unit B2-C1, Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

# LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juma'in, S.E.  
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar., S.H., M. Hum  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Arie Sudihar., S.H., M. Hum  
NIP 19710123 199603 1 003

Juma'in, S.E.  
NIP 19680515 198912 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI**

**Sasaran Program:**

1. Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien
2. Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif
3. Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan pengembangan TIK yang terintegrasi	1. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi	3 Aplikasi
		2. Persentase pemutakhiran data dan informasi	80%
2.	Terkelolanya Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif	Sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi	ISO 27001
3.	Terlaksananya penelitian dan pengkajian	Rekomendasi penelitian dan pengkajian	3 Rekomendasi
4.	Meningkatnya efektifitas komunikasi publik melalui media maupun langsung	1. Kategori layanan keterbukaan informasi publik (KIP)	Informatif
		2. Kategori publisitas positif melalui media monitoring	Kategori Positif
5.	Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim	1. Persentase peningkatan pemahaman publik yang mengikuti edukasi publik tentang KY	15%
		2. Tingkat kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	Puas
		3. Persepsi terhadap kualitas bahan diseminasi publik KY	Kategori baik
6.	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas

**Kegiatan:**

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik

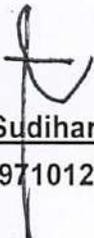
**Anggaran:**

Rp17.466.460.000,00

Jakarta, 2 Januari 2024

Sekretaris Jenderal,

Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi,

  
**Arie Sudihar, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710123 199603 1 003

  
**Juma'in, S.E.**  
NIP 19680515 198912 1 001



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial  
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat  
Telp. : 187 or (021) 390 5876  
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685  
Email : kyri@komisiyudisial.go.id